

KAART
DER
MOLUKKEN

Schaal 1:300000.

CITRA MALUKU UTARA
DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, AGUSTUS 2005

Citra Maluku Utara dalam Arsip



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandanginya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya".

Maluku Utara merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan

corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini

diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2005

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI.....	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Daftar Pustaka	18
Citra Maluku Utara dalam Arsip	19
Geografi	20
Pemerintahan	27
Kunjungan Pejabat Negara ke Maluku Utara	36
A. Presiden	37
B. Wakil Presiden	51
C. Pejabat Lain	58
Kesultanan di Maluku Utara	63
Politik.....	76
Sosial-Ekonomi	85
Pendidikan.....	106
Agama	120
Bangunan	127
Transportasi.....	147
Budaya.....	156
Pariwisata	179
Daftar Arsip yang Diserahkan.....	184

Penutup	200
---------------	-----

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang "**Pemerintahan Daerah**" telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan layanan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi pemerintahan yang selama ini terjadi. Namun dalam pelaksanaannya, Otonomi Daerah ini belum berjalan dengan mulus.

Citra Maluku Utara Dalam Arsip diharapkan dapat mengawali tumbuhnya gagasan kebangsaan. Melalui materi yang ditampilkan diharapkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa urusan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang "**Pengelolaan Arsip Statis**". Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah

dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2005 ini ANRI akan menyerahkan arsip Citra Daerah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Arsip Maluku Utara yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu mulai dari awal abad ke XVIII sampai dengan abad XX, yakni sejak Jaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Hindia Belanda sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Maluku Utara pada periode tersebut, yang diharapkan dapat memancing peningkatan upaya perluasan khasanah arsip statis yang dimiliki Provinsi Maluku Utara dan menumbuhkan rasa bangga Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari NKRI.

GAMBARAN SEJARAH

Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang "**Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat**" sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang "**Perubahan atas Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat**". Walaupun dari segi usia Provinsi Maluku Utara masih muda, namun wilayah tersebut memiliki

sejarah yang panjang. Sebelum menggambarkan perjalanan sejarah, berikut ini terlebih dahulu akan dipaparkan kondisi geografi Maluku Utara. Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 353 pulau dengan luas daratan 32.000 km persegi yang tersebar di atas perairan seluas 107.381 km persegi. Di sebelah utara wilayahnya berbatasan dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Seram, di sebelah timur dengan Laut Halmahera dan di sebelah barat dengan Provinsi Maluku. Wilayah daerah ini terletak pada lintasan Garis Khatulistiwa.

Perjalanan sejarah wilayah Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari dua faktor penting yang satu sama lain saling berkaitan, yakni tingginya potensi alam dan adanya hubungan dengan suku bangsa dan bangsa dari kawasan lain. Maluku Utara merupakan kawasan kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Berkat potensi rempah-rempah yang tinggi serta letaknya yang strategis, kawasan ini sudah dikenal dunia internasional sejak lama. Berita pertama dan tertua tentang Maluku Utara tercatat dalam Tambo Dinasti Tang di Negeri Cina (608-906). Sejak itu para pelaut dari daratan Cina sudah sering mendatangi wilayah ini untuk mencari rempah-rempah, khususnya cengkeh. Waktu itu cengkeh adalah satu-satunya tanaman yang hanya terdapat di Maluku Utara. Pada abad XIV saat Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan, perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara dikuasai para pedagang dari Jawa dengan berpusat pada pelabuhan Majapahit di Tuban, Gresik, Sedayu dan Ujung Galuh. Kedatangan agama Islam di Maluku Utara ini mempengaruhi struktur sosial politik masyarakat setempat.

Setelah kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran, pengaruh agama Islam masuk di Maluku Utara. Agama Islam memasuki Maluku Utara melalui para pedagang dan mubaliq. Mengenai waktu yang tepat dan di daerah mana pertama agama Islam masuk dan berkembang belum dapat dipastikan, namun yang jelas pada pertengahan abad XV agama Islam sudah dianut dan berkembang di Maluku Utara. Dari sumber-sumber sejarah yang menurunkan raja-raja Maluku Utara yang beragama Islam adalah seorang yang berasal dari **Arab** bernama **Jafar Sadek**. Informasi ini dapat dihubungkan dengan kegiatan para pedagang Islam yang disertai mubaliqnya sekurang-kurangnya sudah langsung mendatangi daerah itu pada abad XIV dan XV. Para pedagang Islam ini juga datang dari Jawa, Sumatera dan Malaka.

Sumber tradisi lokal lain yang hampir sama menerangkan bahwa orang Ternate sudah mulai mengenal Islam sejak abad XIV. Menurut tradisi lokal pada abad XIV diceritakan bahwa **Molotjamateya** penguasa Ternate ke-12 (1350-1357) telah bersahabat dengan seorang Arab yang memberikan pelajaran membuat kapal. Demikian pula diceritakan bahwa di Tidore ada penguasa Muslim bernama **Hasan Shah**. Tulisan Arab pada Al Quran amat indah sehingga menarik penguasa dan keluarganya untuk menirunya. Ia memohon agar mereka tidak hanya meniru huruf-huruf Arab tetapi juga mempelajari Islam dengan cara mendatangkan guru dari Jawa.

Pada perkembangan selanjutnya, perjalanan sejarah Maluku Utara mulai bersentuhan dengan bangsa Eropa. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Maluku Utara juga sama dengan yang lainnya yakni mencari rempah-rempah. Mereka menamakan

kawasan Maluku Utara sebagai **Spice Route** atau jalur rempah-rempah, sedangkan wilayahnya disebut **The Spice Islands** atau Kepulauan Rempah-rempah. Bangsa Eropa yang pertama datang ke wilayah itu adalah Portugis pada tahun 1512 dengan menggunakan dua armada di bawah pimpinan Anthoni d'Abreu dan Fransisco Serau yang langsung menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat serta mendirikan benteng. Sembilan tahun kemudian Spanyol mendarat pula di kepulauan ini dan mendirikan benteng di Tidore. Demikianlah seterusnya Inggris pada tahun 1577 dan Belanda dengan VOC-nya pada awal abad XVII datang di Maluku Utara. Akhirnya lengkaplah sentuhan dengan bangsa asing ketika Jepang datang pada tahun 1942. Walaupun pada awalnya misi bangsa asing ke Maluku Utara adalah berdagang dan mencari rempah-rempah, namun pada kenyataannya lebih tepat dikatakan sebagai usaha kolonisasi. Perjuangan menghadapi kolonialisme bangsa asing ini akan diuraikan pada bab tersendiri.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN

Maluku Utara mulai mengenal bentuk pemerintahan yang lebih rapih dan teratur setelah masuknya agama Islam ke daerah itu pada abad XIV dengan berdirinya **Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo**. Kesultanan-kesultanan ini sebelumnya merupakan kerajaan-kerajaan dengan bentuk dan susunan serta sistem pemerintahannya yang masih sangat sederhana dan lebih banyak didasarkan atas persekutuan kelompok-kelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan genealogis. Di Tidore terdapat kesatuan masyarakat terkecil yang disebut **Soa**. Mereka mendiami suatu wilayah yang disebut **Dukuh**, pemimpinnya dinamakan **Fomanyira**

yang berarti orang tertua. Beberapa Soa membentuk satu kampung yang dipimpin oleh seorang **Gemilaha**. **Gemilaha** selanjutnya membentuk persekutuan lebih besar lagi yang disebut **Boldan** yang dipimpin oleh seorang **Kolano**. Keadaan yang sama juga terdapat di Ternate dan Bacan. Di Bacan **Kolano** juga disebut dengan istilah **Jou. Kolano** dan **Jou** inilah sebagai cikal bakal munculnya kerajaan di Maluku Utara.

Masuknya Islam ke Maluku Utara membawa pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan kepemimpinan dalam kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Kerajaan-kerajaan di sana selanjutnya bernama kesultanan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Di bawah Sultan terdapat suatu aparat pemerintahan yang terdiri dari **Jogugu, Kapitahao, Hukum Soa-Sio, Hukum Sangaji** dan **Tulilimo**. Aparat ini dibantu oleh suatu dewan legislatif yaitu "**Bobato 18**" yang terdiri dari 18 anggota. Kedelapan belas anggota ini terdiri dari para **Kiloloka, Fanyira** dan **Sangaji**. Para anggota dari aparat pemerintahan ini semuanya terdiri dari para bangsawan. Sesudah itu terdapat rakyat biasa atau **Bala**.

Dengan sistem pemerintahan ini selanjutnya masyarakat mulai mengenal penggolongan-penggolongan, yaitu golongan **Sangaji, Manjira** dan **Mahimo**. Golongan **Sangaji** adalah golongan tertinggi dalam masyarakat dan mereka terdiri dari keluarga sultan dan para bangsawan kraton. Golongan **Manjira** adalah golongan menengah dalam masyarakat dan terdiri dari keluarga sultan bukan kraton, termasuk di dalamnya putera-puteri selir. Golongan **Mahimo** adalah golongan terendah dalam masyarakat yang meliputi budak, rakyat dari daerah takluk dan sebagainya.

Sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam masyarakat dan pemerintahan, Sultan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan disegani oleh masyarakat. Sultan dipandang sebagai pelindung rakyat karena dianggap memiliki kekuatan sakti yang dapat dipergunakan untuk membebaskan rakyat dari berbagai mara bahaya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada saat masuknya Islam di Maluku Utara lebih banyak menyangkut struktur pemerintahan dan kepemimpinan, sedangkan pola-pola kemasyarakatan asli tetap dipertahankan seperti kebiasaan toleransi, gotong royong dan kekeluargaan. Demikianlah struktur pemerintahan di Maluku Utara sejak masuknya Islam, yakni berdirinya empat kerajaan yang bercorak Islam, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo sejak abad XIV. Keberadaan keempat Kesultanan ini pada abad-abad berikutnya terus berkembang dan bahkan pengaruh kekuasaannya meluas ke luar wilayah Maluku Utara sampai ke Irian Barat sekarang Papua.

Kedatangan Bangsa Eropa di Maluku Utara mulai abad XVI sampai dengan abad XX, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris sampai Belanda, menunjukkan betapa pentingnya Maluku Utara. Mengenai perkembangan pemerintahan di Maluku Utara A. Bahar Mandili dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia Juni 1978/1979 menulis sebagai berikut :

Tahun 1257 Pembentukan Kerajaan Moloku dengan Bab Mansur Malamo Sebagai penguasa. Tahun 1322 Moloku dibagi menjadi 4 Kesultanan dengan nama Moloku Kieraha yang terdiri dari : 1. Kesultanan Ternate, 2. Kesultanan Tidore, 3. Kesultanan Bacan dan 4. Kesultanan Jailolo.

Tahun 1522 Perkenalan dengan Portugis; Antonio de Brito sebagai Gubernur.

Tahun 1575	Perang Pangusiran terhadap Portugis dipimpin oleh Baabullah
Tahun 1579	Kapitulasi Portugis kepada Baabullah oleh Gubernur Nuno Pareira de Lacerda.
Tahun 1811	Residen I. W. Ewer.
Tahun 1933	Residen terakhir Bakker diganti oleh Asisten Residen de Boer
Tahun 1942-1945	Kekuasaan Jepang dengan pangkat Menseibu (Gubernur).
Tahun 1945	Residen Iskandar Muda Djabir Syah.
Tahun 1959	Pejabat Sementara Bupati Soselisa.
Tahun 1969	Bupati Kepala Daerah M.S. Djahir.
Tahun 1966	Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah Let. Kol. Soemitro
Tahun 1967	Bupati Kepala Daerah J. Mansur BA.

Sejarah Administrasi Maluku Utara menurut **Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie** tahun 1870 ; berada dibawah Residensi Ternate yang merupakan bagian dari Governement der Molukken sesuai dengan Besluit No. 2 tanggal 6 Desember 1866 yang terdiri dari wilayah Kesultanan Ternate (terdiri dari Kepulauan Ternate, Kepulauan Halmahera dan Kepulauan Sula, Kesultanan Tidore (terdiri dari Kepulauan Tidore) dan Kesultanan Batjan (terdiri dari Kepulauan Batjan). Bentuk pemerintahan tersebut menurut **Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie** tahun 1930 sampai dengan 1941 terjadi perubahan pada tingkatan residen menjadi afdeeling. Dimana Maluku Utara termasuk dalam Afdeeling Ternate yang juga merupakan bagian dari Karesidenan Maluku, dibagi menjadi wilayah : Ternate (Distrik Ternate Selatan, Ternate Timur, Makian, Kacoa, Tidore) Bacan (Distrik Labuha dan Kesultanan Bacan), Jailolo (Distrik Loloda, Tolofuo, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangolie, Dodinga, Oba) Weda (Distrik Maba, Weda, Patani, Gaane) Tobelo (Distrik Kaeo, Tobelo, Galela, Morotai, Wasile) dan

Kepulauan Soela (Distrik Sanana, Taliabu Timur, Mongoli Barat, Taliabu Barat)

PERJUANGAN MENGHADAPI KOLONIALISME

Perjalanan sejarah Maluku Utara merupakan perjalanan sejarah yang panjang, seperti halnya daerah-daerah lain di Bumi Nusantara ini, Maluku Utara menarik bangsa Eropa. Walaupun kedatangan bangsa Eropa di Maluku Utara pada awalnya sama dengan bangsa-bangsa lain sebelumnya yaitu mencari rempah-rempah, namun perilaku mereka mengarah ke upaya kolonialisme. Upaya kolonialisme ini selanjutnya akan berhadapan dengan perlawanan yang ditunjukkan oleh para tokoh setempat dalam bentuk perjuangan. Demikianlah sejarah Maluku Utara mulai awal abad XVI sampai dengan XX dihiasi dengan berbagai perjuangan kesultanan-kesultanan menghadapi kolonialisme.

Datangnya bangsa Portugis dan Spanyol di Maluku Utara pada awal abad XVI merupakan pertemuan pertama antara masyarakat setempat dengan bangsa Eropa. Pertemuan ini membawa konsekuensi baru setelah beberapa saat sebelumnya berkenalan dengan Agama Islam dan melahirkan kesultanan-kesultanan bercorak Islam sebagaimana yang telah diuraikan di muka. Hubungan yang kurang baik antara bangsa Portugis dengan Kesultanan Ternate terjadi ketika Portugis mulai memaksakan kehendaknya memonopoli perdagangan rempah-rempah. Persahabatan berupa hubungan dagang antara Kesultanan Ternate dengan Portugis yang telah dirintis sejak kedatangan Portugis pada tahun 1512 kemudian berakhir pada tahun 1530. Hal ini dipicu oleh adanya perampasan hasil-hasil cengkeh milik Raja Ternate **Sultan Hairun** di Makian.

Peristiwa ini menimbulkan perlawanan dari pihak Kesultanan sehingga terjadi pertempuran. Walaupun dalam pertempuran ini Sultan Hairun tewas di Benteng Santo Paolo, namun nilai-nilai kejuangan telah lahir. Peristiwa ini sekaligus sebagai titik awal pemicu retaknya hubungan antara Portugis dengan Ternate pada periode-periode selanjutnya.

Peristiwa yang sangat heroik terjadi pada tahun 1570, yakni ketika Sultan Baabullah memerintah Ternate. Saat itu terjadi lagi peperangan antara kedua belah pihak. Dalam peperangan ini Sultan Ternate menang dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate untuk pindah ke Ambon dan Tidore. Kesultanan Ternate di bawah Sultan Baabullah ini mencapai puncak keemasannya karena hampir menguasai seluruh Kepulauan Maluku. Sementara itu Inggris yang sudah lama mengincar kepulauan rempah-rempah itu menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Ternate pada tahun 1577.

Pada awal abad ke XVII VOC datang ke Maluku Utara, VOC berusaha untuk menjadi penguasa tunggal di Maluku Utara melalui perjanjian-perjanjian dengan para Sultan setempat. Walaupun VOC merupakan institusi dagang, namun turut campur tangan dengan urusan Kesultanan. Hal ini terbukti pada tahun 1683 Kesultanan Ternate dipaksakan menjadi "**Leenstaat**" (Negara Vazal) dari VOC. Hal ini menunjukkan bahwa misi VOC tidak hanya untuk berdagang rempah-rempah, namun juga mengandung unsur kolonialisme.

Praktek-praktek kolonialisme yang dilakukan oleh VOC dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban mengikuti armada "Hongi" yang diperintahkan para gubernur kepada rakyat Maluku Utara, yang setiap saat

pelaksanaanya banyak meminta korban jiwa. Rakyat tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan kebun-kebun cengkeh mereka sendiri.

2. Kewajiban mentaati politik monopoli dalam perdagangan mengakibatkan hampir tidak ada kemajuan dalam bidang ekonomi. Rakyat tidak bebas mendapat barang-barang keperluan hidup yang dibutuhkan karena dilarang berdagang dengan para pedagang asing lainnya. Barang-barang kebutuhan pokok hanya dapat diperoleh pada loji-loji VOC.
3. Suatu faktor dalam dunia perekonomian yang juga menggelisahkan rakyat adalah politik perdagangan VOC yang merugikan dan mengancam kehidupan rakyat. Turun naiknya harga rempah-rempah di pasaran Eropa selalu dibarengi dengan politik pengaturan hasil produksi yang seimbang. Penebangan pohon-pohon cengkeh yang berlebihan menimbulkan amarah rakyat. Sebaliknya perintah penambahan penanaman pohon-pohon cengkeh jika sedang dibutuhkan menimbulkan beban yang berat pula.
4. Dalam hubungan kemasyarakatan antara rakyat pribumi dengan bangsa Eropa terdapat perbedaan perlakuan yang menempatkan posisi bangsa Eropa lebih tinggi dari orang pribumi.

Penggambaran praktek-praktek kolonialisme tersebut melahirkan perlawanan dari masyarakat Maluku Utara. Kesultanan Ternate dan Tidore melakukan penyerangan terhadap markas Belanda, dan memberikan bantuan kepada Pattimura yang sedang berperang melawan Belanda di Ambon. Demikianlah ketika VOC

yang dilanjutkan dengan Pemerintahan Hindia Belanda berada di Maluku Utara abad XVII sampai dengan abad XX penuh dengan konflik dan perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda.

Pada zaman pendudukan Jepang, daerah Maluku termasuk Maluku Utara merupakan salah satu dari ke empat wilayah pemerintahan di Indonesia bagian Timur dengan pusatnya di kota Makassar. Ke empat wilayah itu adalah Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin, Sulawesi dengan ibukota Makassar, Nusa Tenggara dengan ibukota Denpasar di Bali dan Maluku dengan ibukota Ambon. Masing-masing wilayah ini dikuasai seorang Gubernur Militer. Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan Laut Jepang (***Kaigun***).

Selama pendudukan Jepang tidak terdapat perubahan-perubahan yang penting didalam tata pemerintahan. Pemerintahan lebih bersifat militer atau disesuaikan dengan kepentingan militer. Pada waktu itu terdapat juga aparat-aparat pemerintahan sipil yaitu ***Minseibu Chokan***, semacam kepala daerah yang berkedudukan di Ambon, Tual dan Ternate.

Dalam banyak hal kekuasaan pemerintahan sipil dibatasi atau tunduk kepada kekuasaan militer, sehingga wewenang pemerintahan sipil hampir tidak ada sama sekali. Selain itu suasana penjajahan tetap berlangsung, dakwah di mesjid-mesjid selalu diawasi. Perkumpulan-perkumpulan keagamaan dianggap berbahaya bagi stabilitas pemerintahan Jepang. Ibadah Islam tidak bisa dijalankan dengan baik, Rukun Islam yang kelima Ibadah Haji tidak diberi kesempatan oleh Jepang karena hubungan dengan dunia luar ditutup sama sekali. Keadaan tersebut berlangsung hingga Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945.

MASA REPUBLIK

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya NKRI, maka secara de jure Maluku Utara merupakan bagian dari NKRI dan kedudukannya sebagai Karesiden dengan Residennya Iskandar Muda Djabir Syah dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku. Di daerah Maluku, Pemerintahan Nederlands Indies Civil Administrations (NICA) masuk bersama dengan tibanya tentara Sekutu setelah menyerahnya Jepang kemudian mereka menjalankan kekuasaan pemerintahan masing-masing dengan seorang ***Chef Conica*** yang juga menjabat Residen untuk Maluku Utara dan Maluku Selatan. Dewan Maluku Utara diketuai oleh seorang ***Asisten Residen***.

Pembagian Maluku Utara serta pembentukan Dewan Perwakilan merupakan realisasi dari Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 mengenai Pembinaan Otonomi Daerah. Demikianlah selanjutnya ketika Provinsi Maluku secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku.

Pada perkembangan selanjutnya kedudukan Maluku Utara sebagai Daerah Tingkat II atau Kabupaten masih merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Tahun 1968 melalui surat kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tanggal 9 Desember 1968 Nomor Odes 25/1/6 Halmahera Tengah berdiri sendiri sebagai wilayah administratif lalu menjadi kabupaten tersendiri dan berada langsung di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang lahir di Era Reformasi, babakan sejarah baru bagi wilayah Maluku Utara terjadi. Wilayah ini menjadi provinsi tersendiri dan terpisah dari Provinsi

Maluku. Melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Provinsi Maluku Utara terbentuk dengan ibukotanya Ternate.

MALUKU UTARA DALAM KHASANAH ARSIP

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa arsip yang akan diserahkan melalui Program Citra Daerah ini adalah khasanah arsip statis yang berada di ANRI tentang berbagai transaksi dan interaksi di wilayah Maluku Utara, baik pada masa Penguasaan Belanda maupun Republik Indonesia.

Arsip yang ditampilkan dalam Citra Daerah ini berupa arsip tekstual, peta-peta dan foto-foto yang menggambarkan berbagai aktivitas di wilayah Maluku Utara sejak abad XVIII sampai dengan abad XX.

Secara **Geografis** Wilayah Maluku Utara merupakan kawasan kepulauan, hal ini dapat dilihat dalam peta wilayah Halmahera tahun 1933, peta wilayah Pulau Tidore, Pulau Mare, Pulau Moti dan Pulau Makian tahun 1944. Kawasan ini sejak dulu telah dikunjungi berbagai bangsa dari belahan bumi dunia dengan pusat kotanya Ternate. Sebagai bukti bahwa Kota Ternate merupakan kota penting dan telah dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia dapat dilihat dalam peta ibukota Ternate dan sekitarnya.

Arsip yang menggambarkan perjalanan sejarah **Pemerintahan** Maluku Utara dengan berbagai aktivitasnya sejak abad XIX sampai dengan abad XX dapat dilihat dalam Surat Serah Terima Jabatan Residensi Ternate tahun 1853, Laporan Singkat Residen Ternate Kepada Gubernur Kepulauan Maluku di Ambon tahun 1858, Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tanggal

10 Desember 1946 tentang Pemilihan Dewan Kota Praja Ternate, dan Undang-undang No. 46 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Propinsi Maluku Utara.

Kunjungan Pejabat Negara Presiden Soekarno beserta istri, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mohammad Roem, Mr. Sunarjo, Roeslan Abdul Gani, Maladi dan lain-lain ke Maluku Utara pada tahun 1951, 1954 dan 1956 . Hal ini dapat dilihat dalam foto-foto Kunjungan Presiden Soekarno ke Wilayah-wilayah : Istana Kesultanan Ternate, Kepulauan Ternate, Kepulauan Tidore, Makian, Tobelo, Buli, Labuha, Weda dan Beo. Kunjungan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Ternate dan Jailolo.

Kegiatan **Kesultanan** di Maluku Utara dapat dilihat dalam arsip dan foto Bagian Catatan Perjalanan Komisi untuk Empat Negeri dengan Kesultanan Ternate tahun 1779 dan 1780; Ringkasan Surat-surat Rahasia Pangeran Noekoe tahun 1800, Surat Ucapan Terima Kasih Sultan Tidore, foto-foto Sultan dan Istana Kesultanan.

Arsip yang berkaitan dengan masalah **Politik** dan Pemilu dapat dilihat dari Surat Direktur Kabinet Presiden tentang Proklamasi berdirinya Propinsi Maluku Utara, keputusan Presiden RIS No. 204 tahun 1950 tentang Penetapan Keadaan Darurat Perang, Poster Ajakan Melaksanakan Pemilu tahun 1954, Rapat Umum di Weda tentang pemilu tahun 1954. Ketika terjadi pertempuran antara Sekutu dengan Jepang pada tahun 1945, Morotai merupakan daerah sangat penting sebagai Wilayah Pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari telegram Pemberitaan Pendaratan Pasukan Sekutu di Morotai tahun 1945, Dan foto Pesawat Tempur Sekutu di Morotai.

Hasil alam dan kehidupan **Ekonomi** masyarakat Maluku Utara tergambar dalam Laporan Pertanian tahun 1862, Hasil Survey Ekonomi

tahun 1931; Hasil Hutan Wilayah Morotai, Kehidupan Nelayan di Tidore, Pengolahan Sagu di Loloda, Pasar Tradisional di Halmahera, Gudang Yayasan Kopra di Wajabula, Kebun Percobaan dari Jawatan Pertanian Ternate, Kebun Coklat di Halmahera.

Data dan kegiatan pelajar dapat dilihat dalam masalah **Pendidikan** di Maluku Utara antara lain terlihat dalam Laporan Residen Ternate tentang Jumlah Pelajar tahun 1876 di Ternate dan Bacan; Surat Keputusan Direktur Pekerjaan Umum No. 24 tanggal 7 April 1900 tentang Pembangunan Sekolah Umum Kelas Dua, suasana sekolah pribumi di Buli, Piru dan Galela.

Ketika Gunung Gamalama meletus Pemerintah Republik Indonesia mendapat bantuan dari Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam masalah **Sosial** tentang surat Duta Besar Belanda kepada Wakil Presiden RI tanggal 14 Oktober 1980.

Tempat ibadah dan kegiatan **Keagamaan** dapat dilihat dalam foto dan arsip Mesjid dan Gereja di daerah Ternate dan Halmahera; Rombongan Jama'ah Haji yang akan bertolak dari Pelabuhan Ternate tahun 1954.

Bangunan-bangunan bersejarah yang menggambarkan perjuangan rakyat Maluku Utara, rumah adat dan masalah pemukiman dapat dilihat dalam foto dan arsip Proyek Stasiun Bumi Kecil di Soa Sio; Gedung Studio RRI di Ternate, Denah dan Foto Benteng Kayu Merah, Benteng Castella, Benteng Kalimati, Benteng Oranje dan Benteng Tolukho.

Pengadan prasarana khususnya **Transportasi** dapat dilihat dalam Peta Situasi Jalan Ternate Castella Tahun 1932, foto-foto Perahu Tradisional dan Kapal Uap.

Foto-foto yang menggambarkan **Etnis, Budaya** dan kesenian masyarakat Maluku Utara tampak pada Para Sangadji dari Kepulauan Togal, Suku bangsa Tobelo, Suku Bangsa Sasana dan Anak-anak Suku Gebe, Permainan Rakyat Morotai, Alat Musik Tradisional Kumbi-Kumbi, Seruling Bambu, Tifa, Seruling. Tarian Adat Ternate, Tarian Adat Jailolo, Tarian Soya-Soya, Pakaian Adat Suku Morotai dan Suku Jailolo.

Foto-foto yang menggambarkan **Pariwisata** dapat dilihat dalam Pemandangan Gunung Gamalama, Pantai Morotai, dan Pantai Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie Tahun 1870, 1930 dan 1941

Andili Bahar A., "*Profil Daerah Maluku Utara*", Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Jilid 8, No. 1.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, "*Profil Propinsi Republik Indonesia Maluku*", Desember 1992.

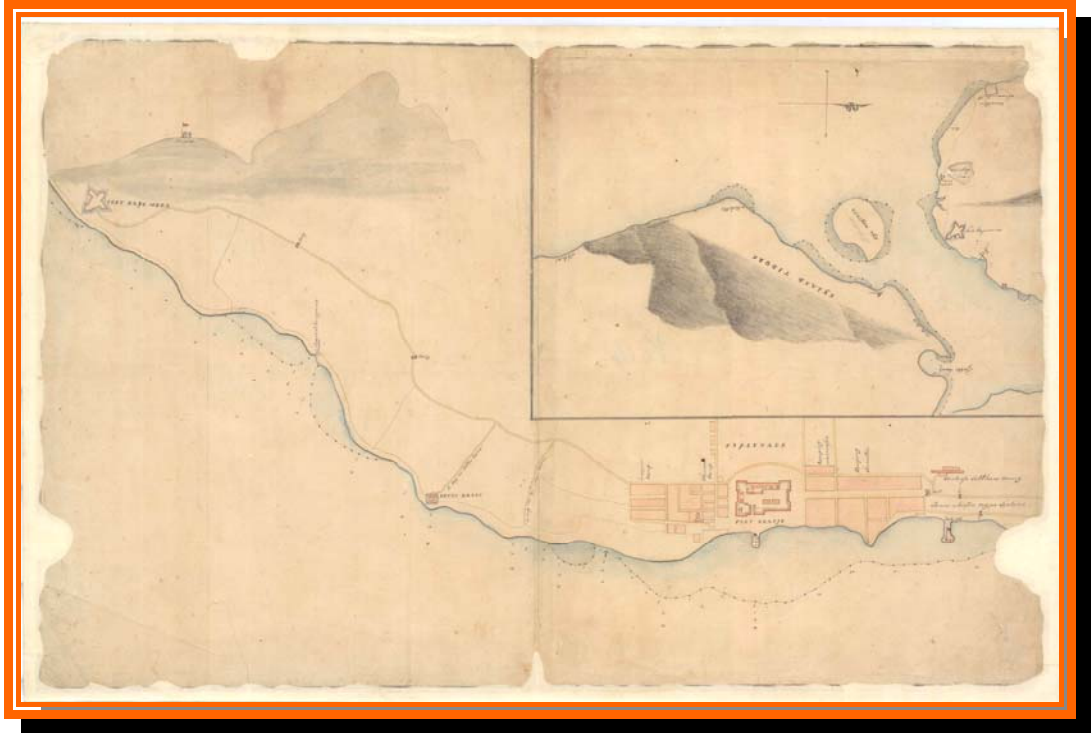
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Sejarah Daerah Maluku*", 23 Juni 1977.

"*Sejarah Kebudayaan Maluku*". Jakarta 1999.

"*Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra*", Jakarta 1999.

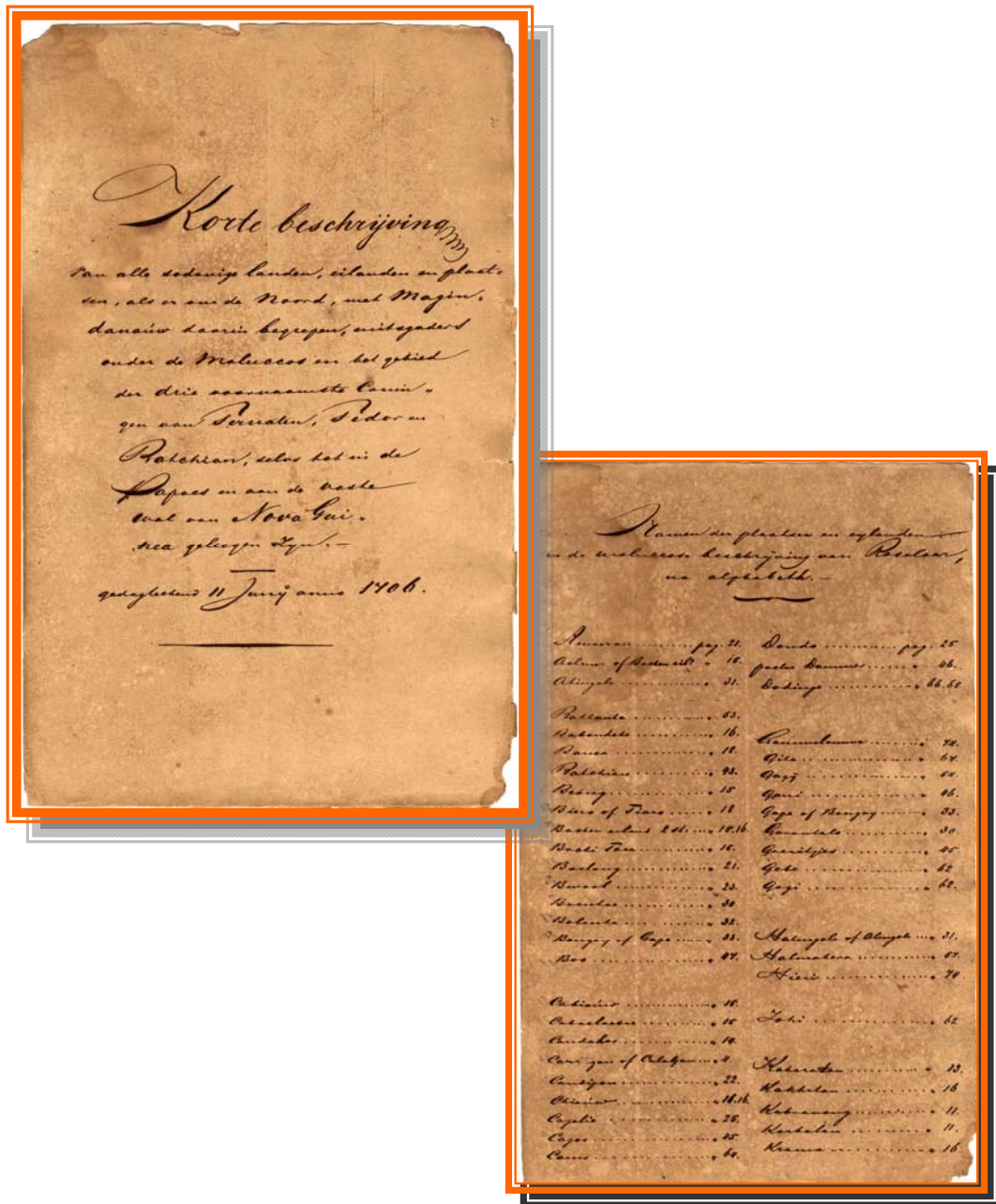
Citra Maluku Utara dalam Arsip

Geografis



Peta Kota Ternate dan sekitarnya antara lain ; Kampung Eropa, Kampung Cina, Explanade, Gereja, Benteng Oranje, Kampung Ternate, Kampung Makassar

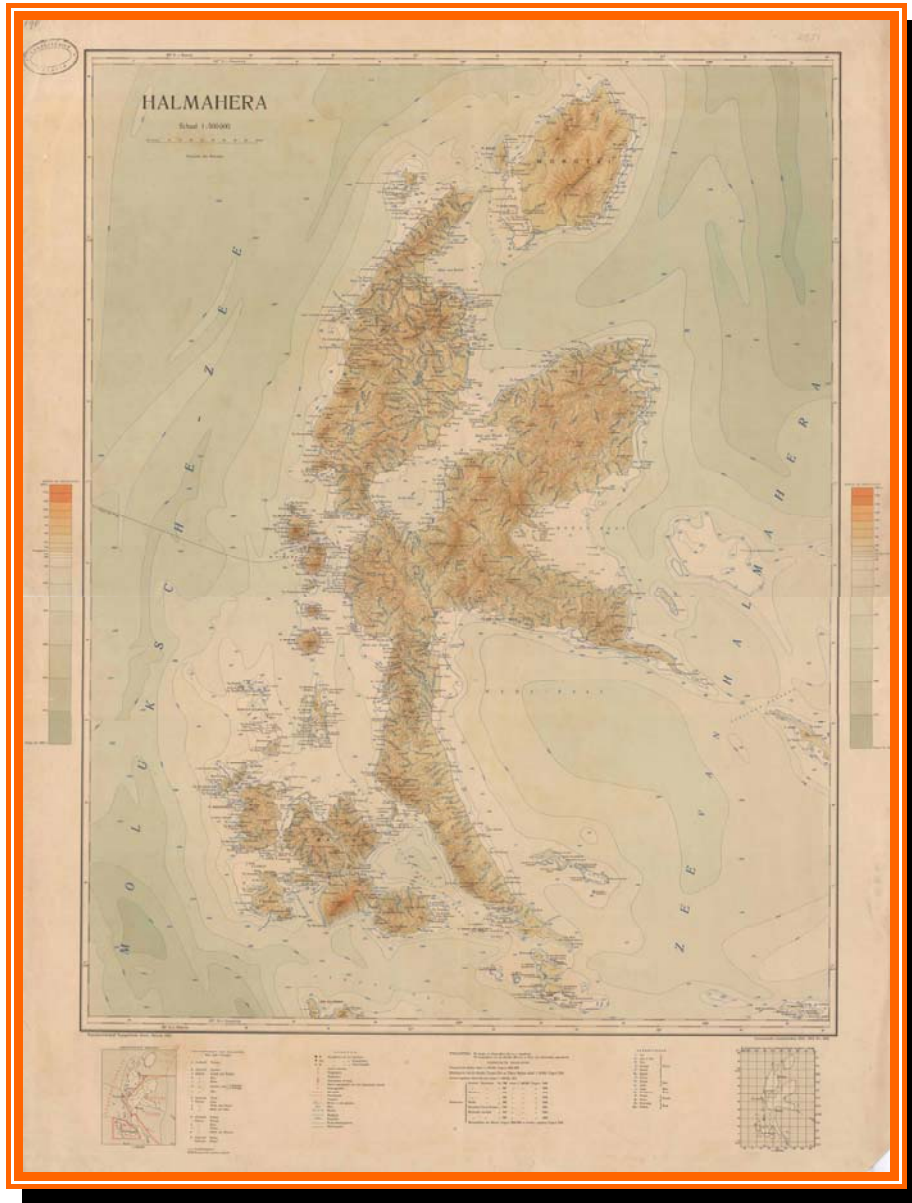
De Haan No. K 14



Laporan singkat situasi pulau-pulau dan tempat-tempat di Maluku, seperti sebelah utara Magindanaw, Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan sampai Papua dan Neuw Guinea, 11 Juni 1706
Ternate No. 134

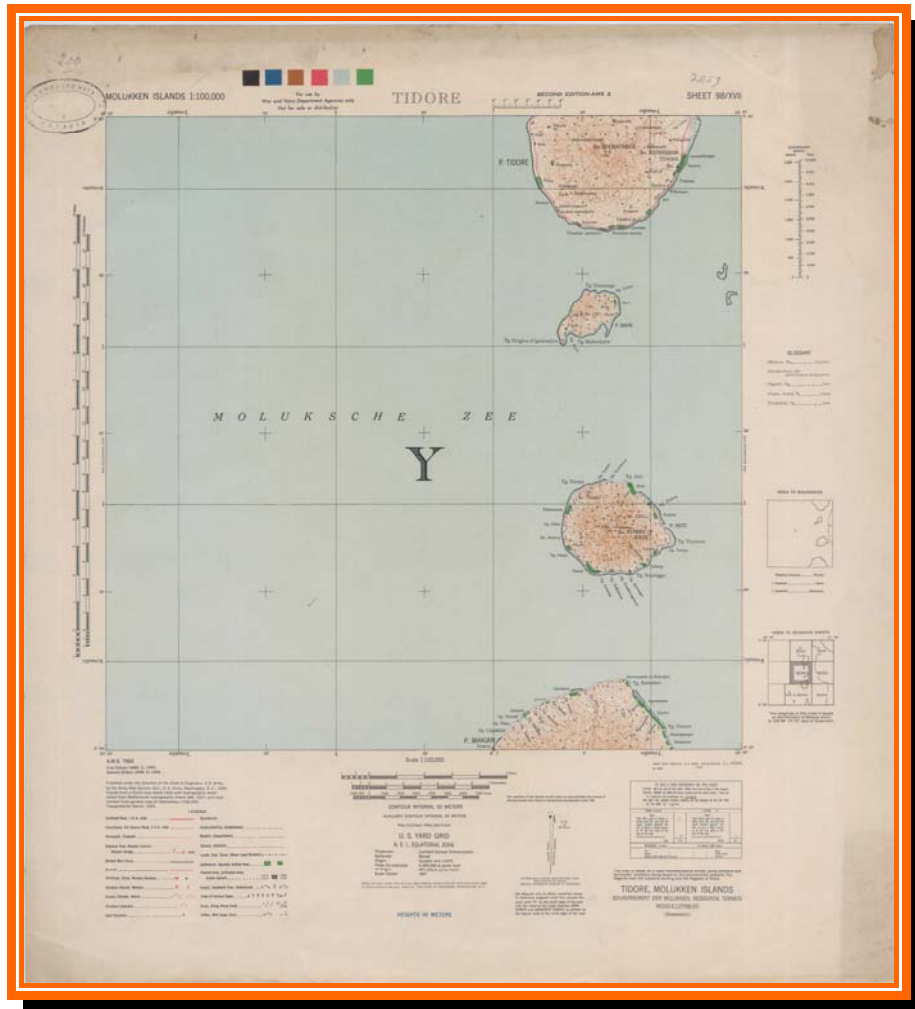


Peta Maluku, 1883 – 1885
ANRI No. 14

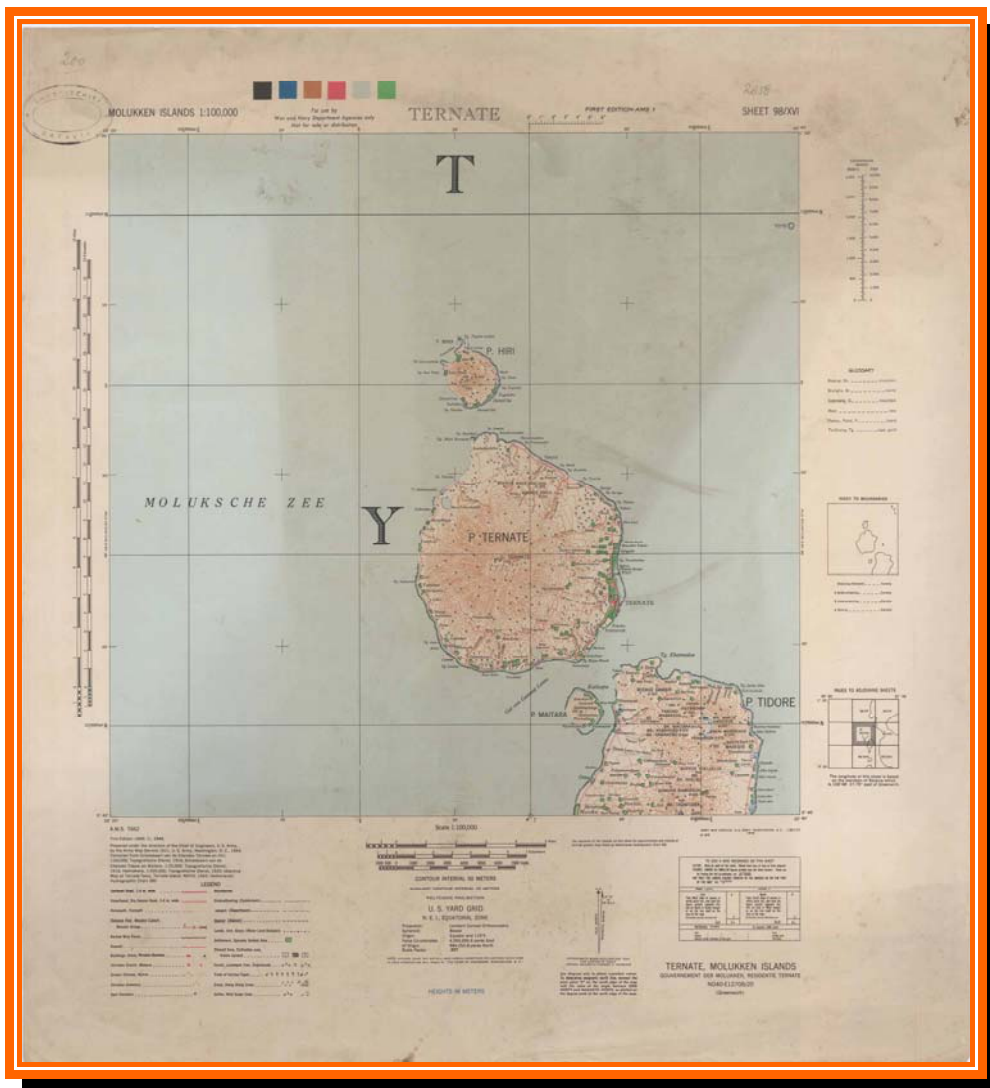


Peta Halmahera, 1933

ANRI No. 2851



Peta Pulau Tidore, Pulau Mare,
Pulau Moti dan Pulau Makian, 1944
ANRI 2859



Peta Pulau Hiri, Pulau Ternate,
Pulau Maitara dan Pulau Tidore, 1944
ANRI No. 2859

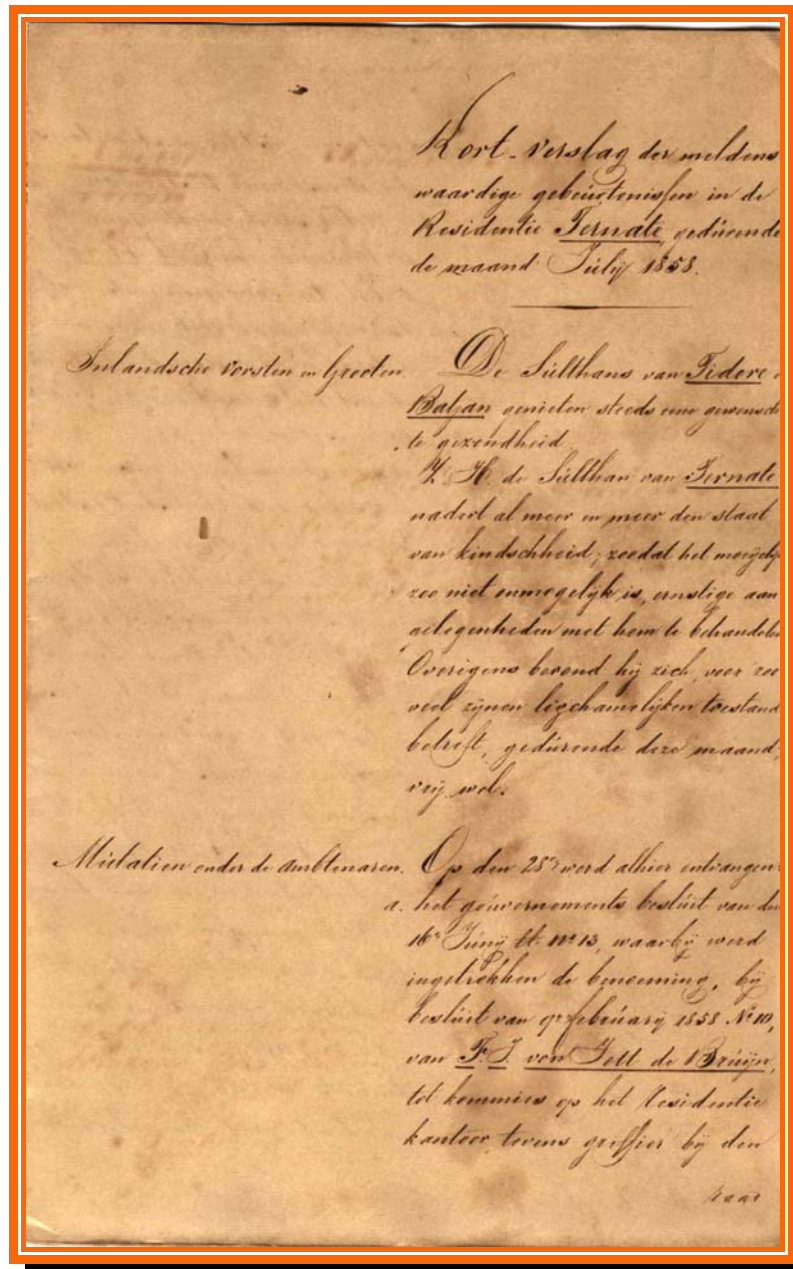
Pemerintahan

Memorie van overgave
 van het bestuur der
 Residentie Ternate
 van den afgetreden
 Resident J. H. Tobias
 aan den benoemden
 Resident C. Bosscher

Memorie van overgave van het bestuur der Residentie Ternate van den afgetreden Resident J. H. Tobias aan den benoemden Resident C. Bosscher.

Der volbrenging aan den last verzoekt in 8 Januarij 1853 te Ternate is te bevestigen. In de Memorie van 8 April 1853 is te zien, dat de Memorie van overgave van het bestuur der Residentie Ternate aangekomen, onder de navolgende opmerkingen. Door Verschillen van onderschieden, is een nypen, voorganger niet kunnen worden, volstaan en den inhoud van boven aangehaald besluit, waarom ik heb gemerkt, alhier ook (Kortelij) te maken, van de Memorie van overgave, welke gediens het Kerk bestuur van den Hoop van Ternate in deze Residentie. Zijn voorgaallen, bevatten die eige Memorie al de bijgevoegde, te Ternate, 1853.

Surat serah terima jabatan pengunduran diri Residen Ternate; J.H. Tobias dan pengangkatan C. Bosscher sebagai residen baru, 1853
Ambon No. 1513



Bagian dari Laporan Singkat Residen Ternate kepada Gubernur Kepulauan Maluku di Ambon tentang kejadian-kejadian di Karesidenan Ternate selama bulan Juli 1858

Ambon No. 1509

Op Gouvernement's grondgebied.

5. Eiland Bacan

Nederlanders in Nederland of elders buiten Nederland	13.
Indie geboren	45.
Nederlanders in Nederlandsch Indie geboren	4.
Vreemden buiten Nederlandsch Indie geboren	6.
Vreemden in Nederlandsch Indie geboren	383.
Mestiezen en andere kleinslingen	381.
Chinezen	22.
Arabieren	1.108.
Andere vreemde bevolkingen	
Tegamen	2014.
in 1861	2062.
afg. meer	251.

6. Eiland Halmahera

Nederlanders in Nederland of elders geboren	1.
Nederlanders in Nederlandsch Indie geboren	4.
Mestiezen en andere kleinslingen	220.
Chinezen	5.
Arabieren	14.
Vreemde bevolkingen	46.
Tegamen	310.
in 1861	309.
afg. meer	9.

Op Vondst gebied

a. Het Rijk van Ternate

Eiland Ternate	4425.
Halmahera	27.450.
Makian in December 1861 overwoest en nog niet bewoond	360.
Karoa	
Tegamen	36,515.

Catatan tentang jumlah penduduk di Pulau Ternate, Bacan, termasuk wilayah-wilayah kerajaan Ternate, Tidore, Bacan yang terdapat dalam Laporan Umum Residensi Ternate 1862.

Ambon No. 1561

*Algemeen overzicht
der
Nederlandsche Indië
over het jaar 1867.*

Indië gebied *Indoende het jaar 1867*
hebben geene veranderingen
in het grensgebied plaats gemaakt

Bevolking *Op den laatste December*
1867 bedroeg de bevolking
volgens opgaven

I. Gouvernements onderdanen

<i>Nederlands in Nederlands of elders buiten Nederland</i>	
<i>Indie geboren</i>	45
<i>Nederlands in Nederlandsch-Indie geboren</i>	113
<i>Vrouwen in Nederlandsch-Indie geboren</i>	5
<i>Vrouwen buiten Nederlandsch-Indie geboren</i>	1
<i>Afkomstige en andere kleurlingen</i>	672
<i>Chinezen</i>	320
<i>Arabieren</i>	29
<i>Andere vreemde oosterlingen (Indië)</i>	122

II. Het Rijk van Ternate

<i>Ternate</i>	4090
<i>Kalnakewa</i>	11262
<i>Kakuan</i>	6415
<i>Blaja</i>	555
<i>Solea eilanden</i>	2784
<i>Sanghaatische bezittingen</i>	11648
<i>Pombokeo</i>	2778

III. Het Rijk van Tidore

<i>Tidore</i>	10513
<i>Kalnakewa</i>	6369
<i>Moere</i>	621
<i>Saba</i>	1020
<i>Waigeo</i>	2205
<i>Salawati</i>	1242
<i>Stidde</i>	1984
<i>Siamu Simeu</i>	1363

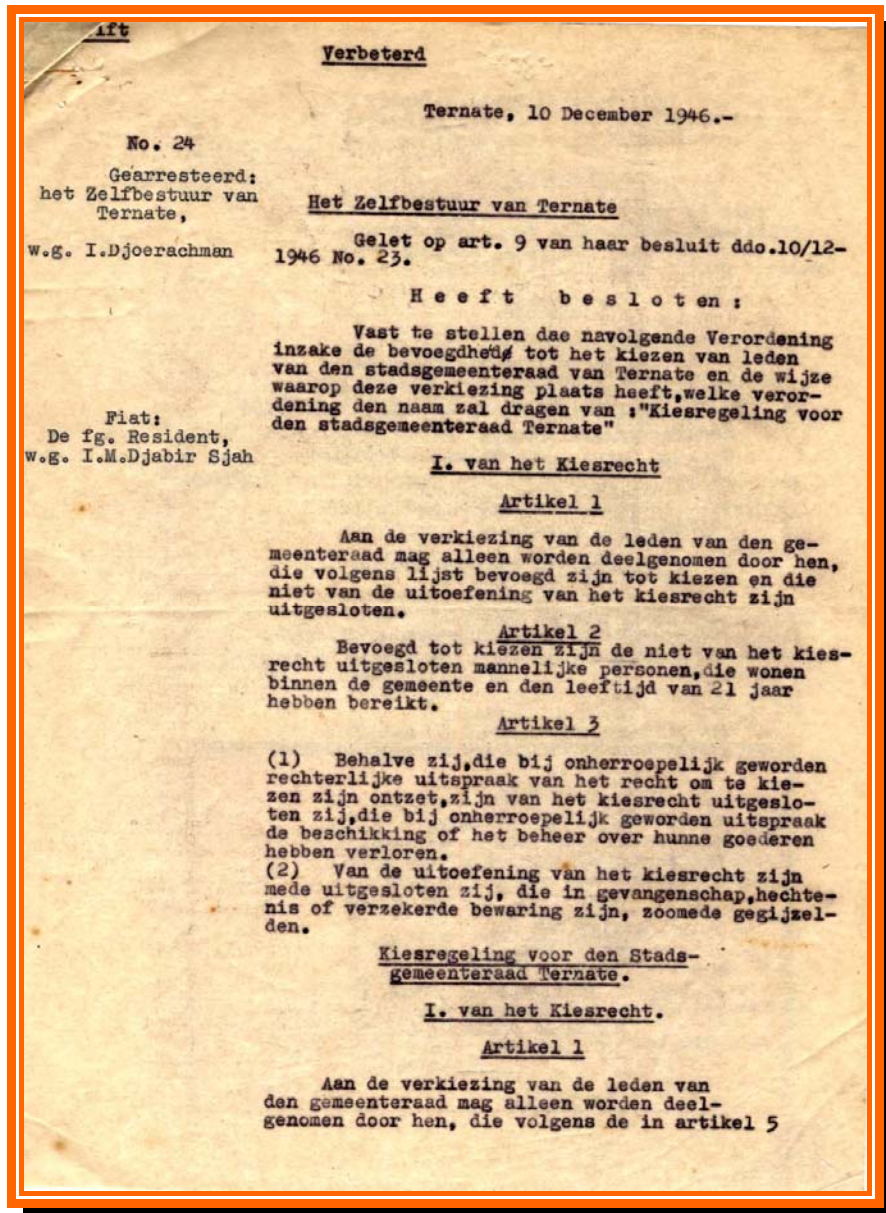
IV. Het Rijk van Dufon

<i>Gouvernements onderdanen</i>	209
<i>Tamarora</i>	126
<i>Sultans onderdanen</i>	1002

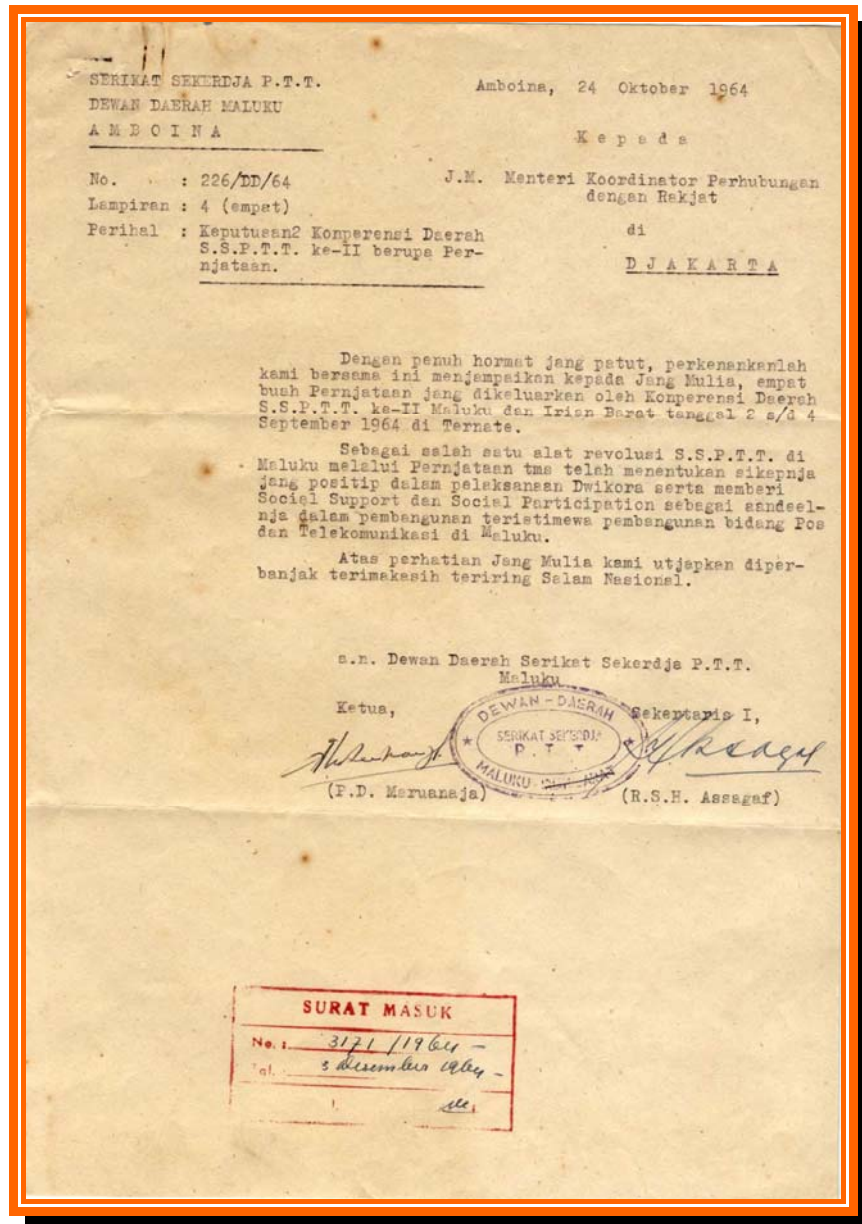
Van deze eijfers verdienen
alleen die verbruiken die den
een naauwkeurige kennis der
de soepmeestert van de ben
voornemst onderdanen ver
breuen zijn
De eijfers verbruiken in de
verbruiken zijn verbruiken van
der eenige naauwkeurige kennis
geijele
Van de afgelegen eilanden
kan ook meegest worden den
by gijfing geijele worden
By den bevestigden
stand zijn geijele 1867

Laporan umum Karesidenan Ternate tentang wilayah, kependudukan, kepolisian, pengairan, situasi, dinas pekerjaan umum, perikanan, perdagangan pelabuhan, perputaran uang, dan keagamaan, 1867.

Ternate 162

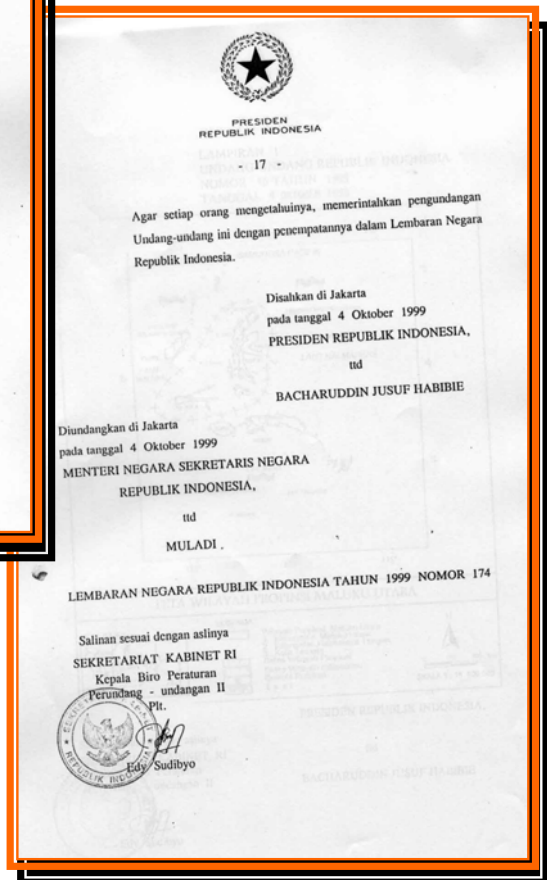
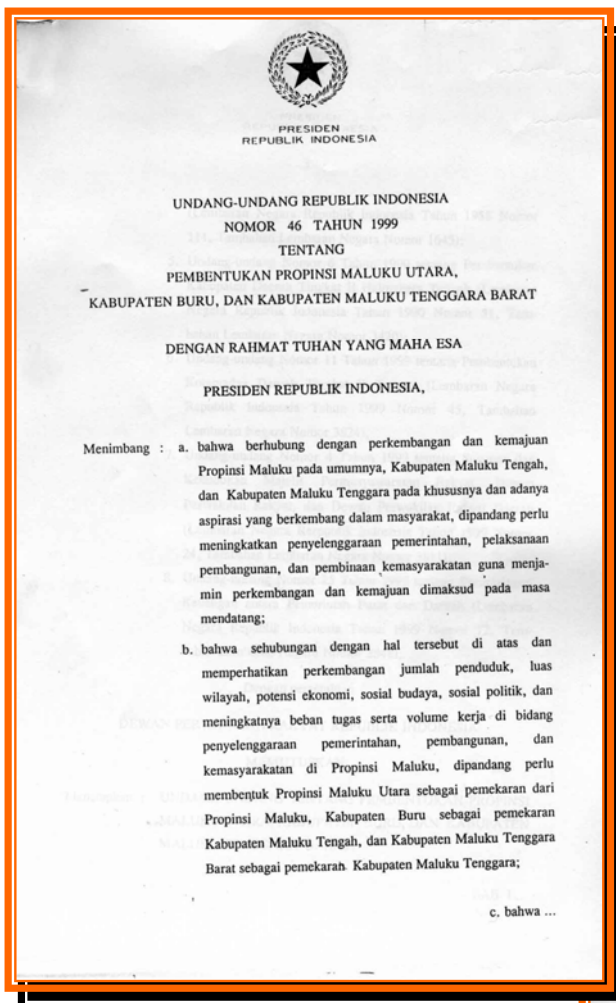


Bagian Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tanggal
10 Desember 1946 tentang Peraturan Pemilihan Dewan Kota
Praja Ternate
Algemene Secretarie No. 1336



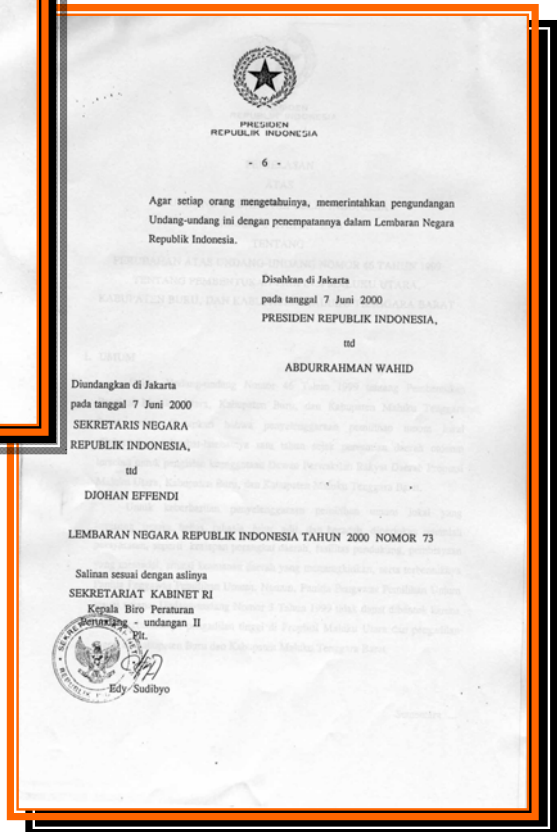
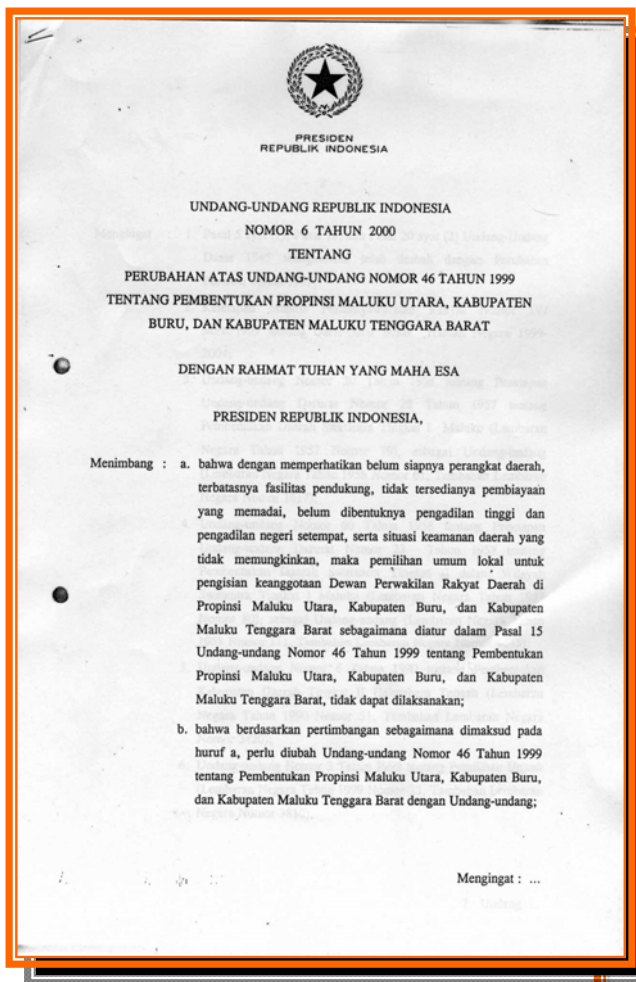
Surat Dewan Daerah Serikat Sekerja PTT Maluku dan Irian Barat kepada Menteri Koordinasi Perhubungan Dengan Rakyat tentang keputusan-keputusan Konferensi Daerah SSPTT ke II Maluku dan Irian Barat di Ternate, 24 Oktober 1964

Roeslan Abdul Gani No. 1566



Undang-Undang No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4 Oktober 1999

Setkab RI



Undang-Undang No. 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

7 Juni 2000

Setkab RI

Kunjungan Pejabat Negara ke Maluku Utara

A. Presiden



Presiden Soekarno berfoto bersama dengan Keluarga Sultan Ternate di Istana Kesultanan Ternate dalam rangkaian perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 17 November 1951

Kempen 511117 V V 20



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati meninggalkan pelabuhan
Ternate dalam rangkaian kegiatan perjalanan
peninjauan ke Maluku Utara

17 Juli 1954

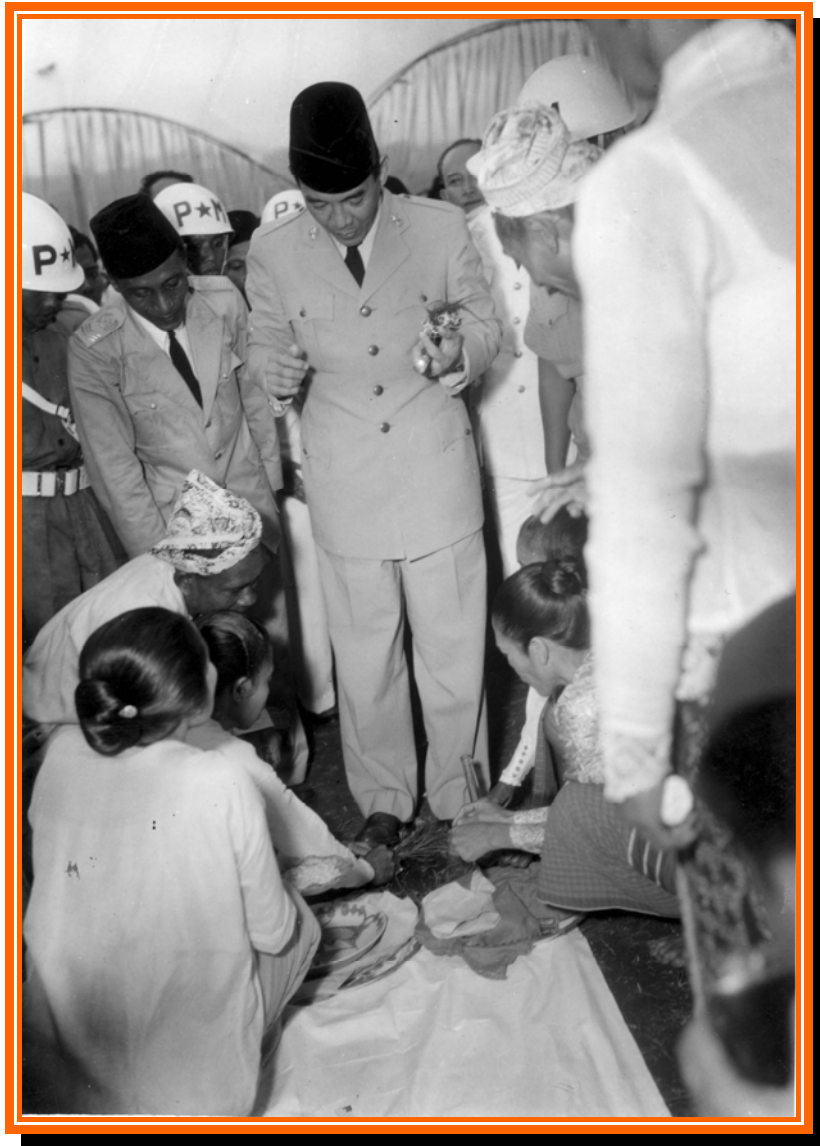
Kempen 540717 V V 18



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati menggunakan perahu
menuju ke pantai di Tidore dalam rangkaian kegiatan
perjalanan peninjauan ke Maluku Utara

18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 3-2



Presiden Soekarno disambut dengan acara adat menginjak telur pada saat tiba di Jailolo (Pulau Tidore) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 25



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati beserta rombongan
menghadiri Rapat Umum di Pulau Makian dalam rangkaian
kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 13



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati meneriakkan pekik
Merdeka pada Rapat Umum di Makian dalam rangkaian
kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 32



Presiden Soekarno tengah menerima persembahan dari rakyat Tobelo (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954
Kempen 540718 V V 80



Masyarakat Tobelo menyambut kedatangan Presiden Soekarno
dan Ibu Fatmawati disepanjang jalan dalam
rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 108



Presiden Soekarno menghadiri Rapat Umum di Buli
(Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan
perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 570902 V V 28



Masyarakat Labuha menyambut kedatangan
Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disepanjang jalan dalam
rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 83



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati menggunakan perahu motor menuju Weda (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 112



Presiden Soekarno memukul tetabuhan yang mengiringi tarian adat Weda (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara

18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 130



Pidato Presiden Soekarno pada rapat umum di Beo
(Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan
peninjauan ke Maluku Utara
18 Juli 1954

Kempen 540718 V V 101

B. Wakil Presiden



Wakil Presiden Moh. Hatta menerima sambutan di pelabuhan
Labuha (Pulau Bacan) dalam rangkaian kegiatan perjalanan
peninjauan ke Maluku Utara

15 Maret 1951

Kempen 511823



Wakil Presiden Moh. Hatta berfoto bersama keluarga
Kepala Daerah Ternate dalam rangkaian kegiatan
perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
16 Maret 1951
Kempen 511798



Wakil presiden Moh. Hatta menghadiri Rapat Umum
di Ternate dalam rangkaian kegiatan
perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
16 Maret 1951
Kempen 511799



Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Jailolo (Pulau Halmahera)
dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan
pembangunan di daerah Maluku Utara

14 Oktober 1954

Kempen 541014 V V 4



Peletakan karangan bunga di Tugu Proklamasi Sasana oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku Utara, 17 Oktober 1954
Kempen 541017 V V 6



Peletakan batu pertama gedung S.G.B Sasana oleh Wakil
Presiden Moh. Hatta dalam rangkaian kegiatan perjalanan
peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku
Utara

17 Oktober 1954

Kempen 541017 V V 4

C. Pejabat Lain



Sekjen Kementerian Penerangan Roeslan Abdul Gani foto bersama dengan istri Sultan Ternate dalam rangkaian perjalanan peninjauan ke Maluku Utara

17 November 1951

Kempen 511117 V V 19



Menteri Pertahanan Dr. F.L. Tobing mendampingi presiden
tengah menerima ucapan selamat dari masyarakat yang hadir
pada resepsi di rumah Kepala Daerah Ternate dalam rangkaian
perjalanan peninjauan ke Maluku Utara

17 Juli 1954

Kempen 540717 V V 2



Sekjen Kementerian Dalam Negeri Mr. Sumarman sedang mengadakan rapat dengan Pamong Praja di Ternate mendampingi Wakil Presiden dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku Utara

14 Oktober 1954

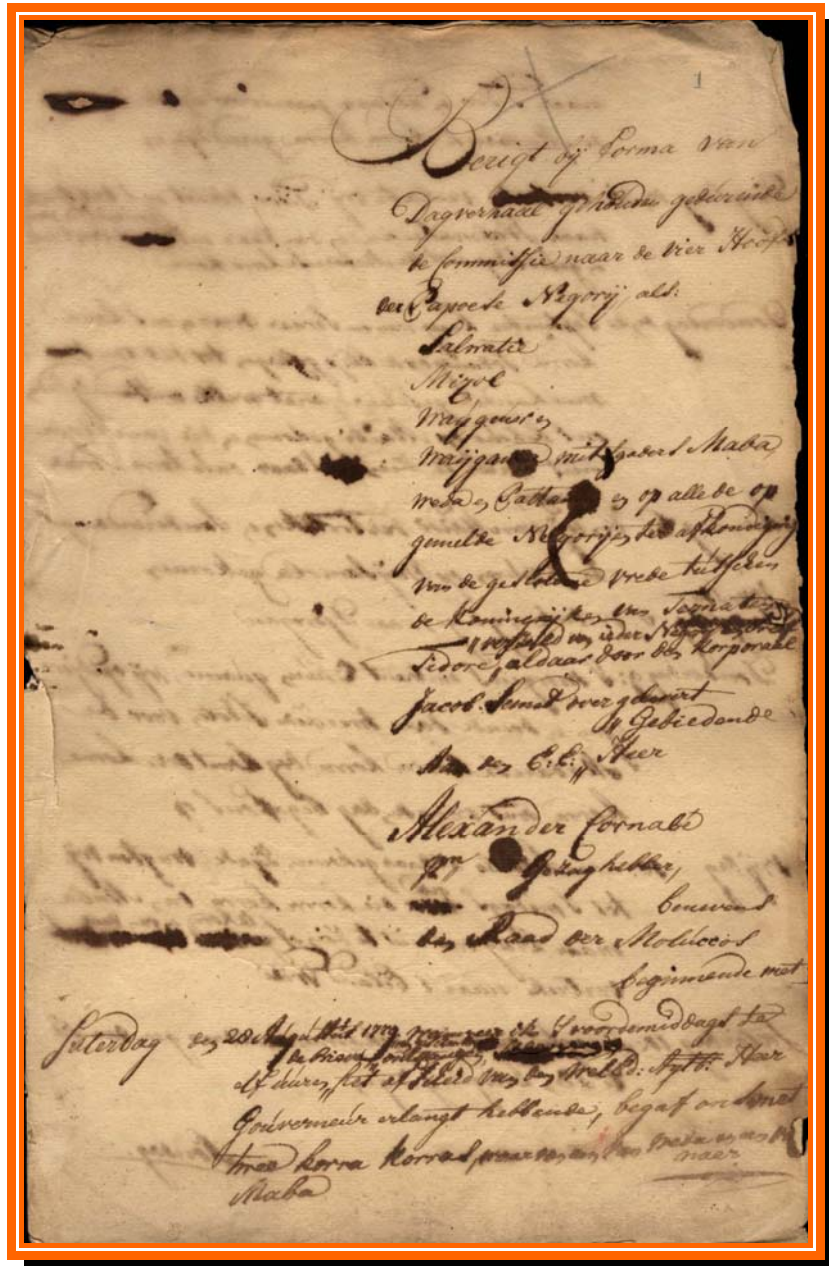
Kempen 541014 V V 16



Dari kiri ke kanan : Direktur Jenderal RRI Maladi,
Menteri Negara urusan Umum K.H. Rusli Abdul Wahid,
Wakil Perdana Menteri I Mr. Moh. Roem, Menteri Dalam
Negeri Mr. Sunarjo, Menteri Penerangan Sudibjo tengah
menyambut aubade pelajar di Tidore dalam rangkaian
kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara
2 Juni 1956

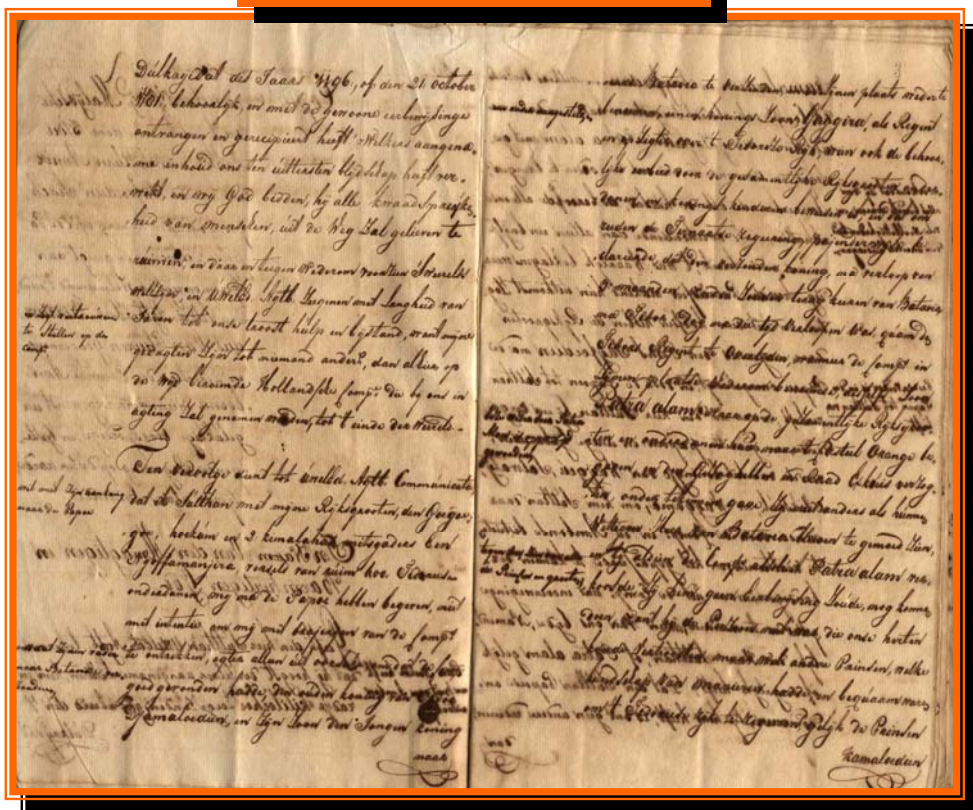
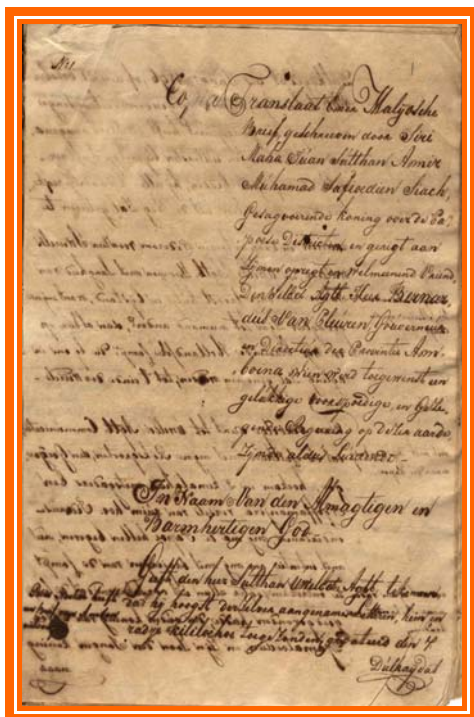
Kempen 560602 V V 1 -23

Kesultanan di Maluku Utara



Bagian dari catatan perjalanan komisi untuk Empat negeri di Papua yang telah melakukan perjanjian persahabatan dengan Kesultanan Ternate, Agustus 1779 sampai Oktober 1780.

Ternate No. 138

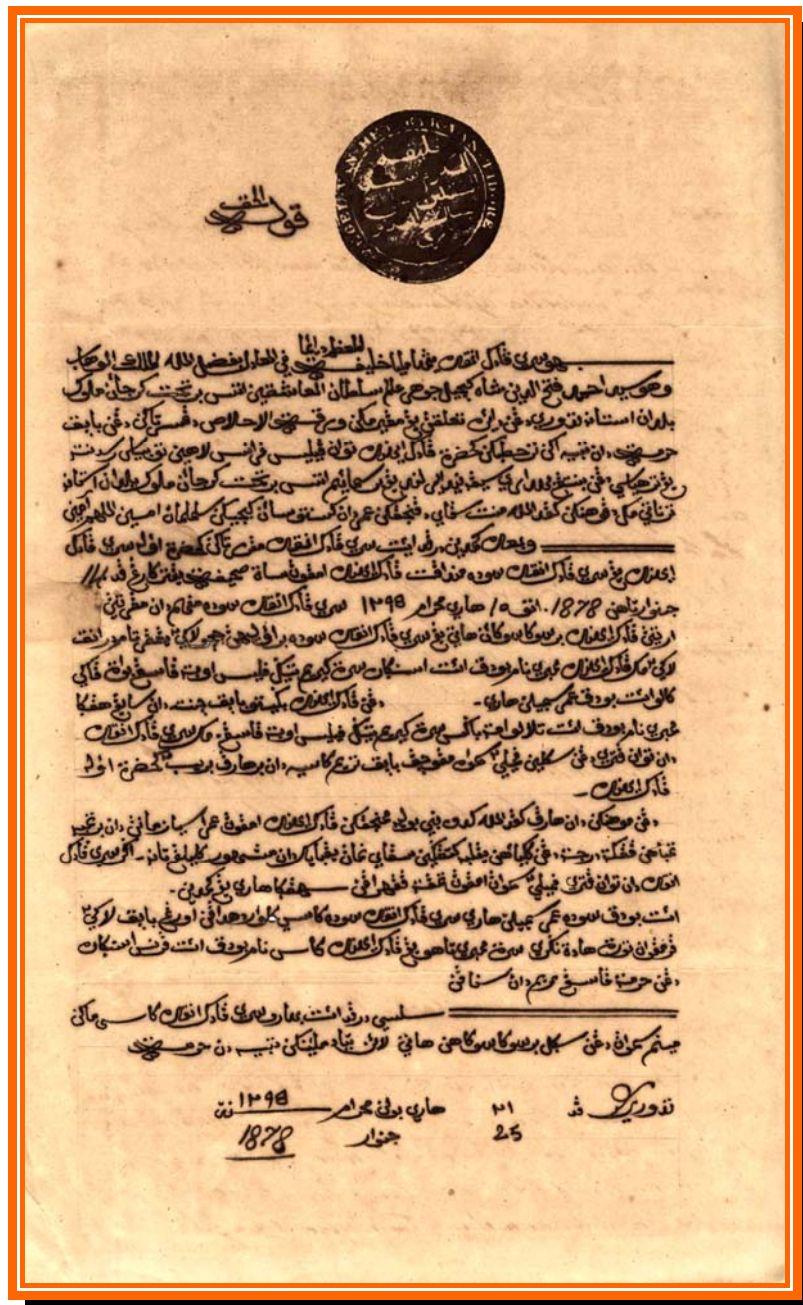


Ringkasan surat-surat rahasia Pangeran Noekoe dari Kesultanan Tidore, tahun 1800.

Ternate No. 138b



Sultan Nuku (Paduka Sri Sultan Saidul Jihad Muh. El Mabus Amirudin Syah Kaicil Papanrangan), tanpa tahun
Koleksi Museum Memorial Kesultanan Tidore



Surat ucapan terima kasih kepada Residen Ternate, atas pemberian nama Pangeran cucu pertama "Asa Nagara" Sultan Tidore, salinan, 25 Januari 1878. Tulisan dan bahasa Arab Melayu. Ternate No. 416



Mahkota Sultan Tidore, tanpa tahun
Koleksi Museum Memorial Kesultanan Tidore



Sultan Bacan bergambar bersama pembesar Belanda di depan
Istana Kesultanan Bacan

KIT No. 328/4



Sultan Bacan ke 18, Haji Mohammad Usman
Koleksi Pribadi Kesultanan Bacan



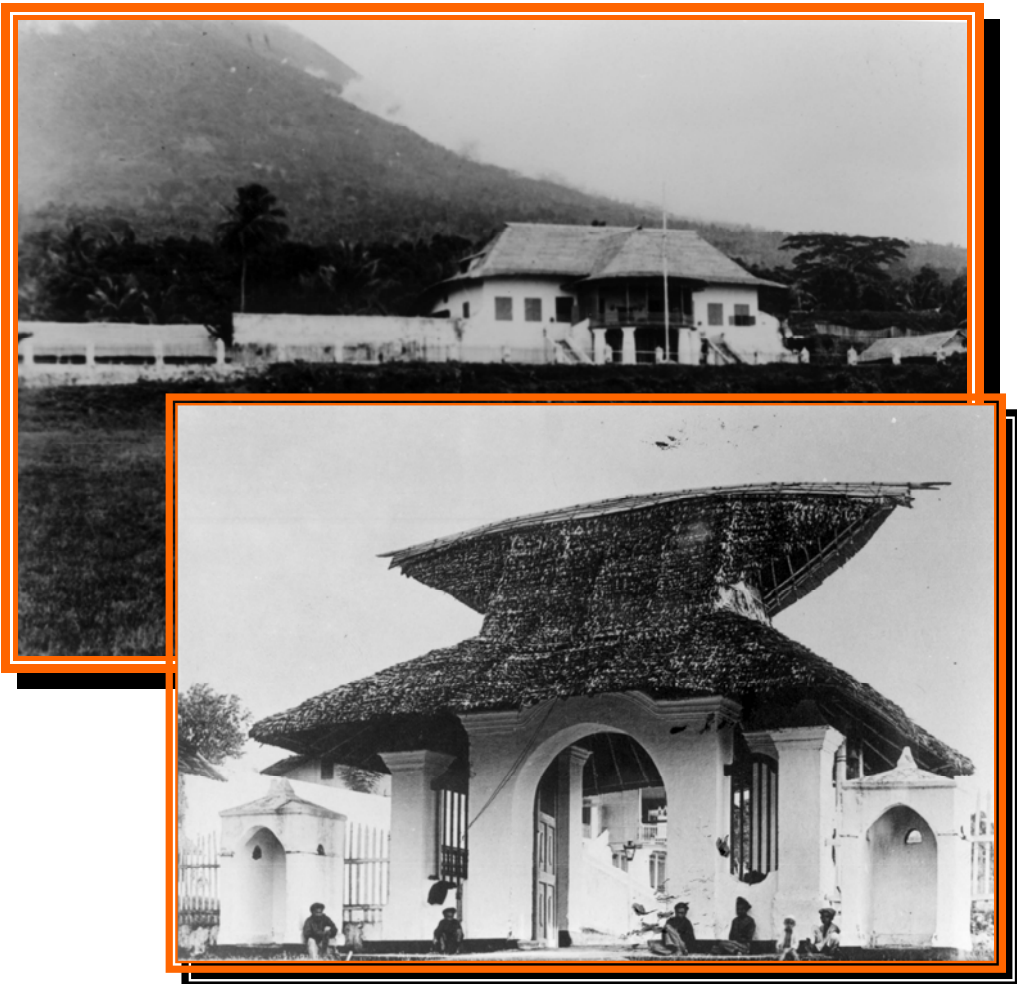
Mahkota Kesultanan Bacan, tanpa tahun
Koleksi Pribadi Kesultanan Bacan



Istana Kesultanan Bacan, tanpa tahun
Koleksi Pribadi Kesultanan Bacan



Mesjid Kesultanan Bacan, tanpa tahun
Koleksi Pribadi Kesultanan Bacan



Istana Kesultanan Ternate
KIT No. 775/81 dan KIT 148/61



Sultan Ternate, 1901

KIT 270 / 54

Politik



Beberapa pesawat tempur Amerika
ketika perang dengan Jepang di Morotai.
1942

KIT No. 342/78.

8033

COL V CRA NR C10 *had a hat?*
 TO LSCA
 FROM VEH *Timor*
 VOOR NEDINREG . ERISBANE VAN CONICA TIMOR VOOR DEPT BB
 PER THEDENS ALHIER GARRIVEERD 12 TIMOREEZEN AAN WIE DOOR LT
 PIETERS MIV 7 SEPTEMBER DAGGELD EEN GULDEN PER PERSOON
 VERZOEKE BEVESTIGING
 ET 041030Z GR B K
 COL R NR C 10 1004-1428 EJO KKK *imagodun* 5-10-45

afdel. De HB 2 w

8016 ANIE

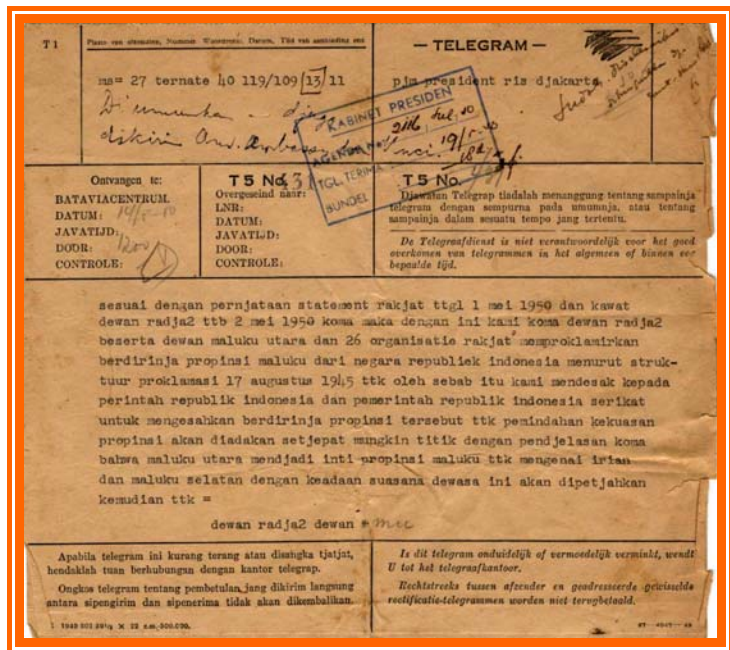
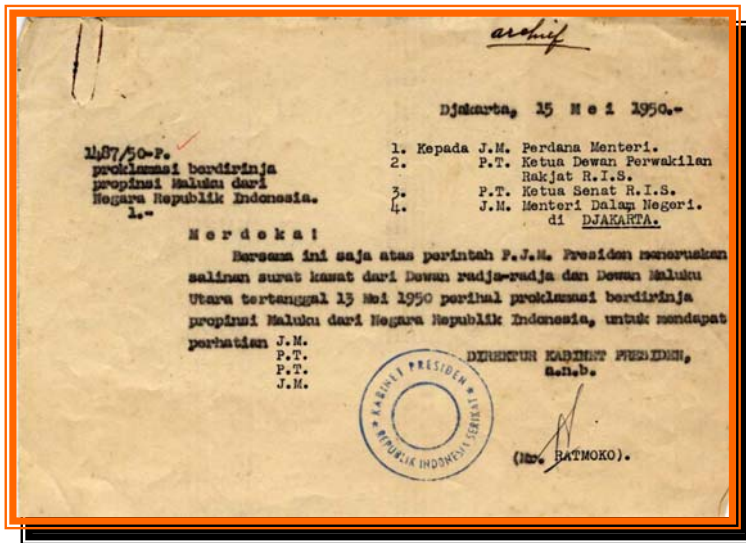
afdel. de lfd kotak 1004-0923

COL V MEL M57
 TO NEDINREG ERISBANE
 FROM CLG MELBOURNE
 NR 211--491 VOLGEND BERICHT ONTVANGEN VAN LHQ QUOTE FOLLOWING IS
 SUMMARY OF LANDOPS SITREPS UP TO 011200I. TIMOR. CDR 48 JAP DIV
 AND PARTY ARRIVED AMBON 251245I IN TWO PLANES. CDR TIMOR FORCE
 AND PARTY LANDED DILLI 25 SEPT AND FORMERLY ADVISED GOVERNOR
 PORTUGESE TIMOR OF SURRENDER JAPANESE FORCES TIMOR STOP ONE COMPANY
 DUTCH TROOPS ARRIVED KOEPANG 270800H ON SS THEEDENS STOP
 200 REPATRIATED INDONESIANS ARRIVED KOEPANG FROM LATEM ON 2 COR-
 VETTES STOP AFTER INTERROGATION CHIEF OF STAFF 48 JAP DIV ON 29
 SEPT PLAN FOR CONCENTRATION JAP FORCES LESSER SUNDA FORMULATED.
 CHIEF OF STAF ALSO ADVISED THAT 23 INDONESIAN NURSES AND 6 OTHER
 PERSONS LEFT MAOCAENE FOR KOEPANG. AMBON. ~~THE~~ HMAS "WESTRALIA"
 ARRIVED AMBON 270930I AND DISCHARGED PHASE TWO AUSTR OCCUPATIONAL
 FORCE. ~~ALL~~ ALL JAPS SAPAROEVA EVACUATED SERANG BY 29 SEPT EVACUATION
 AMBON TO SERANG COMMENCES 29 SEPT. 2 OFFICERS 36 OTHER
 RANKS JAP PW CAMP PERSONNEL ARRESTED. MAKASSAR. FOLLOWING BRITISH
 PW AND INTERNEES EVACUATED BY HMAS "MAIDSTONE" 241200I ETA
 FREMANTLE 29 SEPTEMBER OFFICERS 8 ROYAL NAVY 2 ARMY OTHER RANKS 439
 ROYAL NAVY 10 RAF 2 ARMY 5 MERCHANT NAVY TOTAL 416.
 ROYAL AUSTR NAVY REPORTS VESSELS UP TO 25 FEET DRAFT CAN BERTH
 JULIANA WHARF. FURTHER AUSTR TROOPS 10 OFF 101 OTHER
 RANKS FOR PHASE TWO OCCUPATION FORCE ARRIVED MAKASSAR 281500I.
 JAP FACTORIES TAKEN OVER BY 1 OCT. AND JAP GUARDS ON STORES
 DUMPS BELIEVED BY AUSTR TROOPS. NICA READY ASSUME COMPLETE
 CIVIL CONTROL 1 OCT HMAS / "BURDEKIN" AND GASCOYNE ETD MAKASSAR
 FOR BALIKPAPAN 21000I WITH 105 DUTCH CIVILIAN INTERNEES.
 DUTCH BORNEO. CONCENTRATION JAP STORES AND EQUIPMENT IN SEMOI
 SEPAKOE AREA BY 7 AUST DIV PRACTICALLY COMPLETE BY 26 SEP.
 18 JAP CIVILIANS 153 SERVICE PERSONNEL EMBARKED FOR MOVE TO
 BANDJERMASIN FROM KOTADUNDINGAN 26 SEPT. 1 PLATOON 2/31 AUST
 INF BAT DEPARTED BANDJERMASIN BY LAUNCH 261400I FOR
 POEROEKTAJAOE ALL DUMPS THIS AREA CLEARED. 2 OIL WELLS KANDANGAN
 IN WORKING ORDER. PATROL 2/25 AUST INF BAT DEPARTED SANGA SANGA
 280700I BY MAHAKAN RIVER FOR LONGORAN. BANDJERMASIN. PREPARATIONS
 MADE EVACUATION 322 JAPS KANDANGAN TO MARSAPUERA COMPOUND.
 2 VESSELS WITH JAPS KOTAWARING AREA DUE AT BANDJERMASIN 281200I
 OF COLLABORATION. NIGHT 28-29 SEPT 3 RIVERBOATS ARRIVED FROM
 POEROEKTAJAOE WITH 62 JAP AND JAP NURSES SAMARINDA. PATROL 2/25
 AUS INF BAT REACH MOERAKAMAN. SOME JAPS BEING MOVED KANDANGAN
 TO MARTAPOERA FOR EMBARKATION. SAMARINDA AREA. THREE DAY PATROL
 2/25 AUST INF BAT DEPARTED SAMARINDA 280950I TO INSPECT JAP
 AREAS NORTH OF TENGGARONG. MANADO. COMPOSITE AMF AND DUTCH FORCE
 FOR OCCUPATION NORTH EAST CELEBES CALLED MANADO FORCE. AMF AND
 NICA COMPONENT STRENGTH 37 OFFICERS 85 ORS DEPARTED MOROTAI
 1 OCT. NEI COMPANY EX TARAKAN FOLLOWS AT LATER DATE
 E 041035K
 UNQUOTE
 ET DM K
 COL REC NR M 57 1004-0923 LB *imagodun* 5-10-45

9890 ANIE

Telegram Pemberitaan tentang pendaratan pasukan Sekutu dan
 penetapan pagkalan Militer Sekutu di Morotai,
 5 Oktober 1945

Algemene Secretarie No. 172



Surat Direktur Kabinet Presiden Mr. Ratmoko kepada Perdana Menteri tentang penyampaian salinan surat kawat dari Dewan Raja-raja dan Dewan Maluku Utara tertanggal 13 Mei 1950 mengenai proklamasi berdirinya Provinsi Maluku dan Negara Republik Indonesia dengan penjelasan bahwa Maluku Utara menjadi inti provinsi Maluku, dengan lampiran
Kabinet Presiden RIS No.187



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 204 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa keamanan di daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan telah diganggu sebagai akibat pemberontakan di Ambon dan belum terdjamin kembalinja ketertiban umum;

bahwa tidak mungkin mengembalikan ketertiban umum itu dengan alat-alat kekuasaan biasa;

bahwa karenanja ada alasan untuk menjatakan daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan keadaan darurat perang agar supaja Pemerintah Sipil dan Pembesar-pembesar Militer mempunjai kesempatan mendjalankan kekuasaan luar biasa;

Mengingat : "Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg" (Staatsblad 1939 No.582 seperti telah diubah), juncto pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 26 April 1950 No.160 dan tertanggal 10 Mei 1950 No.169;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menjatakan, bahwa mulai tanggal 4 Djuli 1950 daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan (jang dimaksudkan jaitu daerah Maluku Selatan sebelum daerah tersebut diubah territoirnja berhubung dengan "Affaire Maluku Selatan") ada dalam keadaan darurat perang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,



SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

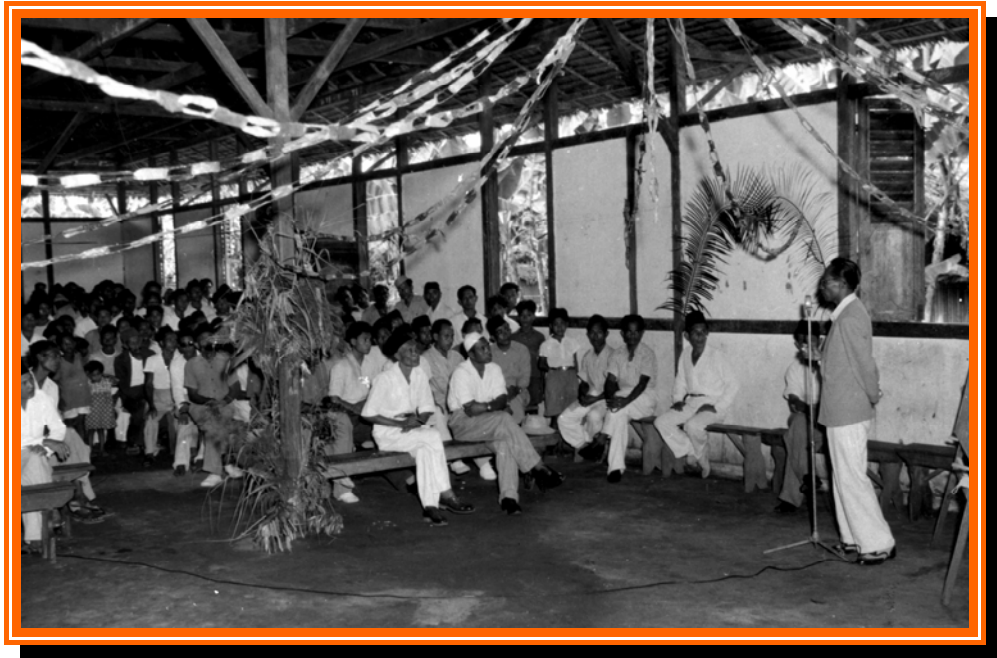


HAMENGKU BUWONO IX.

Keputusan Presiden RIS No. 204 tahun 1950 tentang penetapan keadaan darurat perang untuk daerah Maluku Utara dan Maluku Selatan terhitung tanggal 4 Juli 1950, *Setkab Perundang-undangan Keppres No. 187*



Poster ajakan melaksanakan pemilu "Tidak Turut Memilih -
Tidak Turut Memerintah" di depan Kantor Kabupaten
Daerah Ternate
1 Juni 1954
Kempen 540601 V V 1 - 5



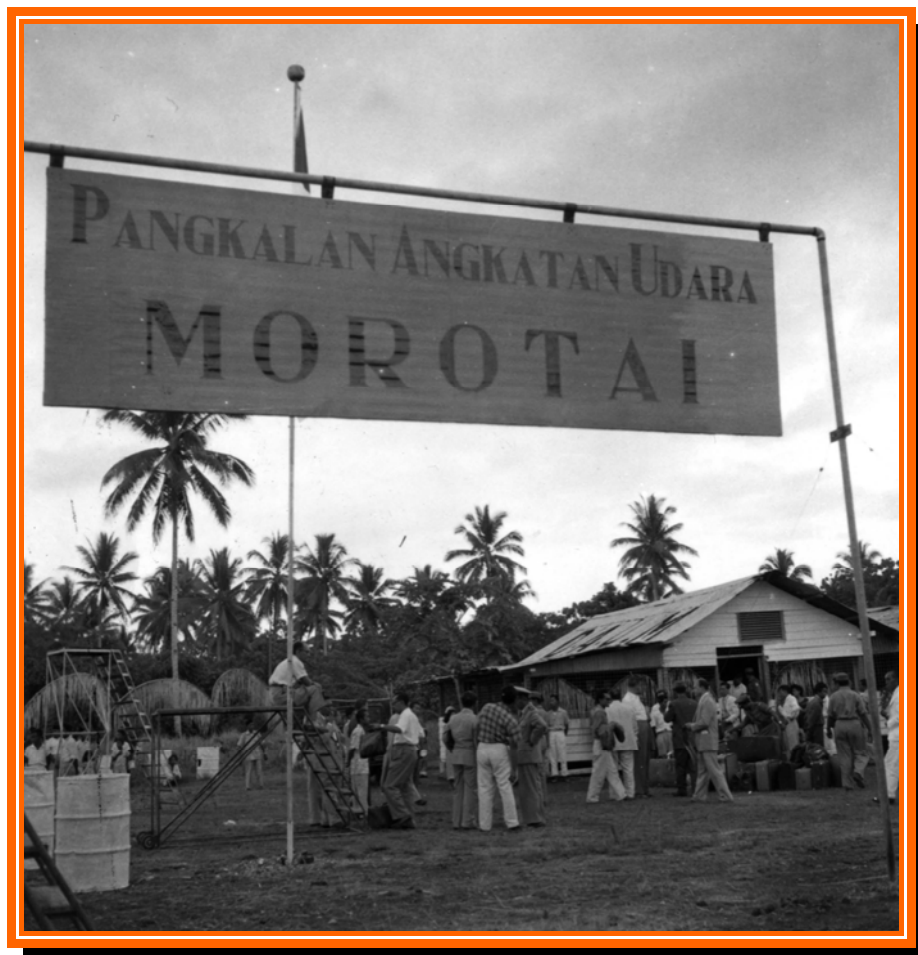
Staf Kementerian Penerangan Sdr. Husni Abbas tengah
memberi penjelasan Pemilihan Umum pada Rapat Umum di
Weda

7 Juni 1954

Kempen 540607 V V 1

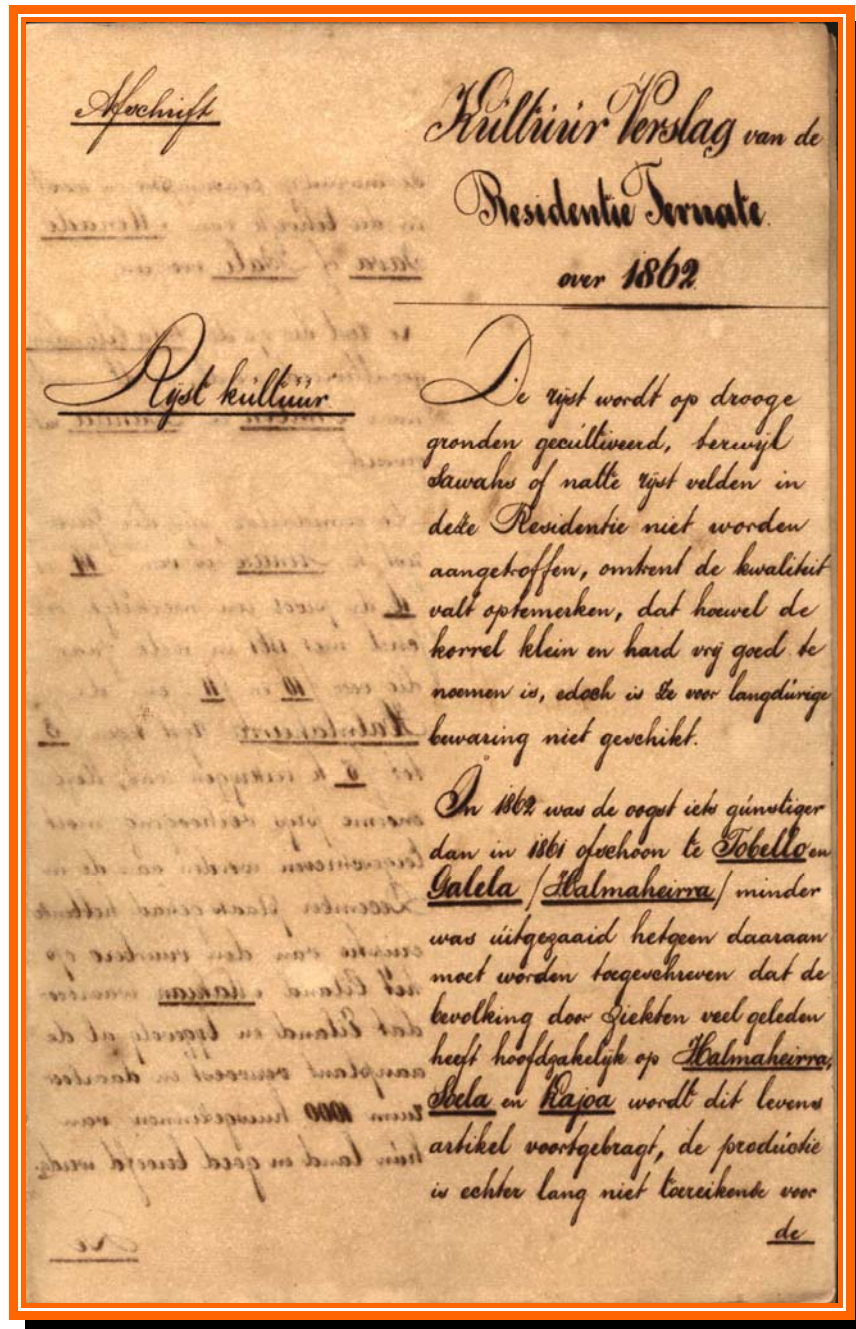


Rapat Umum tentang Pemilihan Umum
di Komisi Pemungutan Suara Weda
7 Juni 1954
Kempen K 540607 V V 2



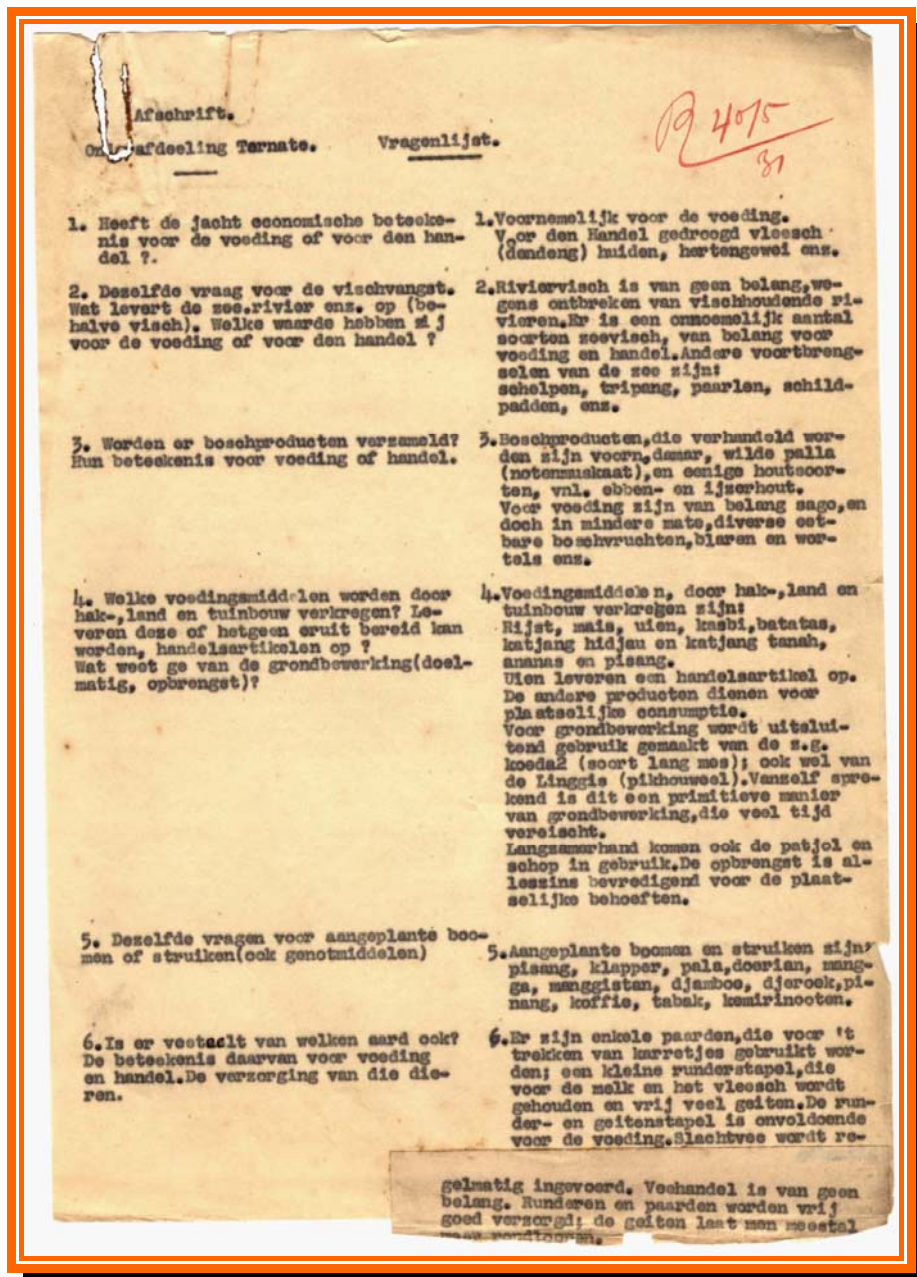
Pangkalan Angkatan Udara Morotai
3 September 1957
Kempen 571103 V V 17

Sosial - Ekonomi



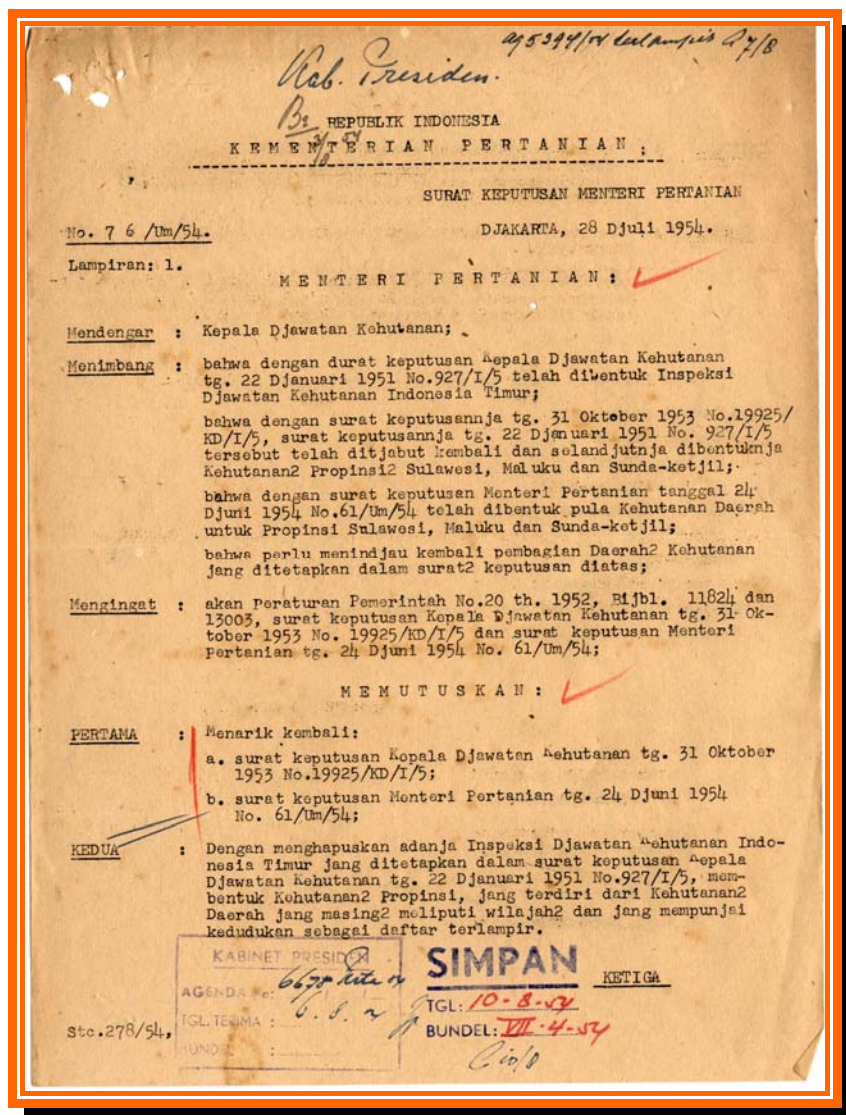
Laporan pertanian tentang penanaman padi, jagung, tembakau, tebu, kopi, sagu, kapas, coklat, rempah-rempah, pala, cengkeh, lada, peternakan, 1862

Ambon No. 1562



Hasil survey tentang situasi ekonomi di daerah Ternate oleh Prof. Dr. J.H.F Kohlbrugge dari Utrecht, 29 September 1931

Binnenlands Bestuur No. 1144

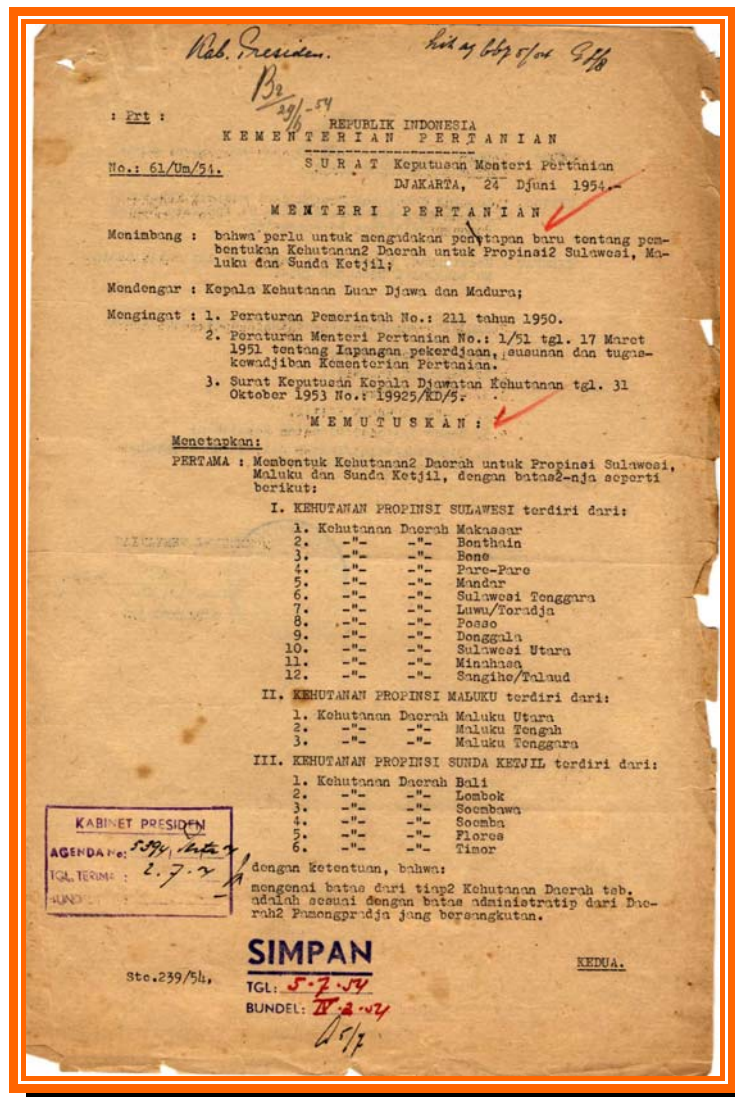


Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 76/UM/54 tentang penghapusan adanya Inspeksi Djawatan Kehutanan Indonesia Timur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Djawatan Kehutanan tanggal 22 Januari 1951 No. 927/I/5, membentuk kehutanan-kehutanan propinsi yang terdiri dari kehutanan daerah Maluku Utara yang mempunyai kedudukan sederajat dengan
Sub Daerah Hutan
Kabinet Presiden No. 2153



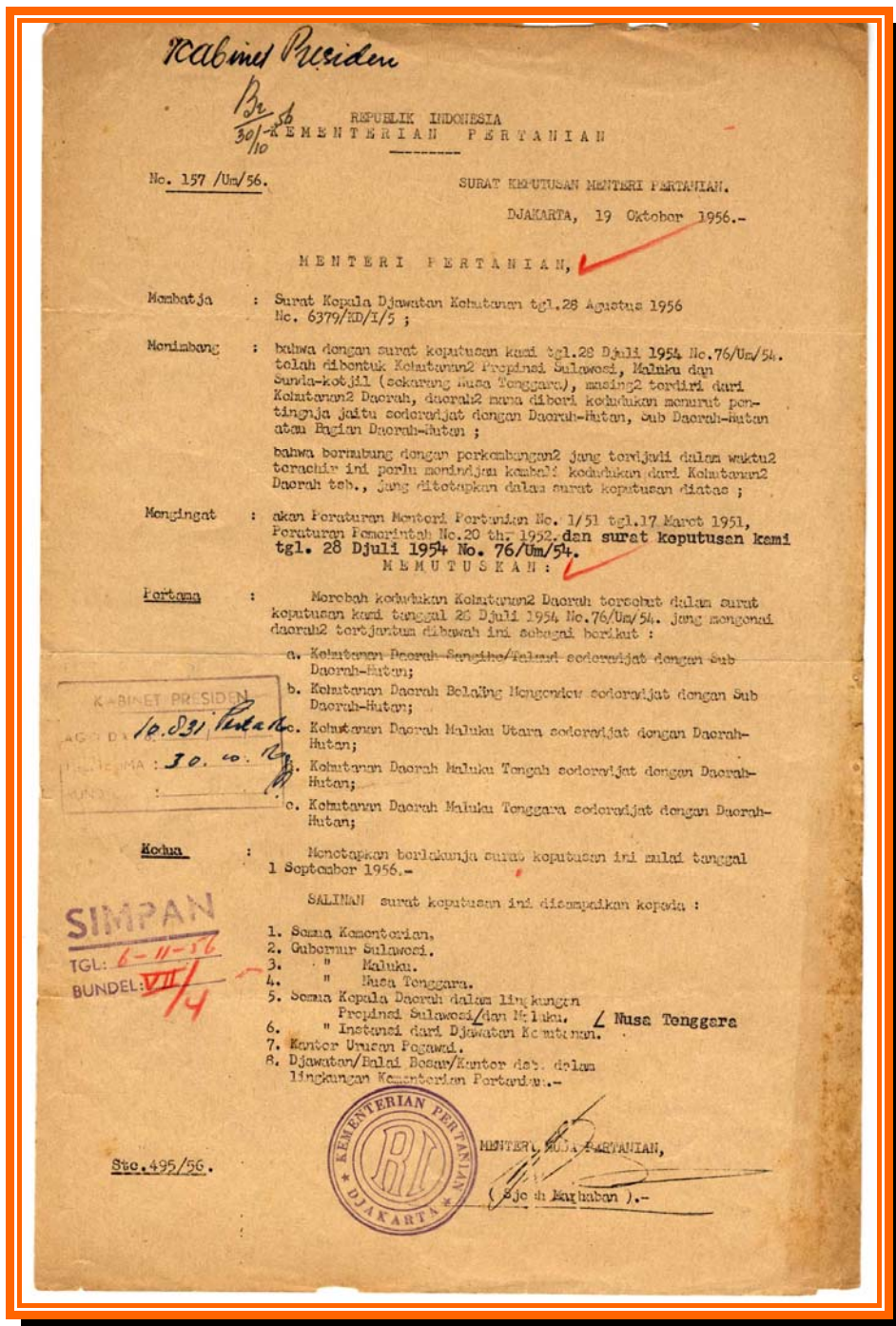
Hasil rotan yang diangkut dari hutan
di pantai Wajabula, Morotai

KIT No. 574/22



Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 61/UM/54 tentang pembentukan kehutanan-kehutanan daerah untuk Provinsi Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Batas kehutanan Provinsi Maluku terdiri dari kehutanan daerah Maluku Utara batas administratif dan daerah pamong praja sesuai dengan daerah yang bersangkutan, 24 Juni 1954

Kabinet Presiden No. 2153



Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 157/UM/56 tentang perubahan kedudukan kehutanan-kehutanan daerah Maluku Utara sederajat dengan daerah hutan, 19 Oktober 1956

Kabinet Presiden No. 2153



Nelayan Tidore bekerja dengan suka cita
di Galela, Halmahera

KIT No. 827/71



Jaring dan bubu sebagai alat penangkap ikan di Halmahera
KIT No. 679/20



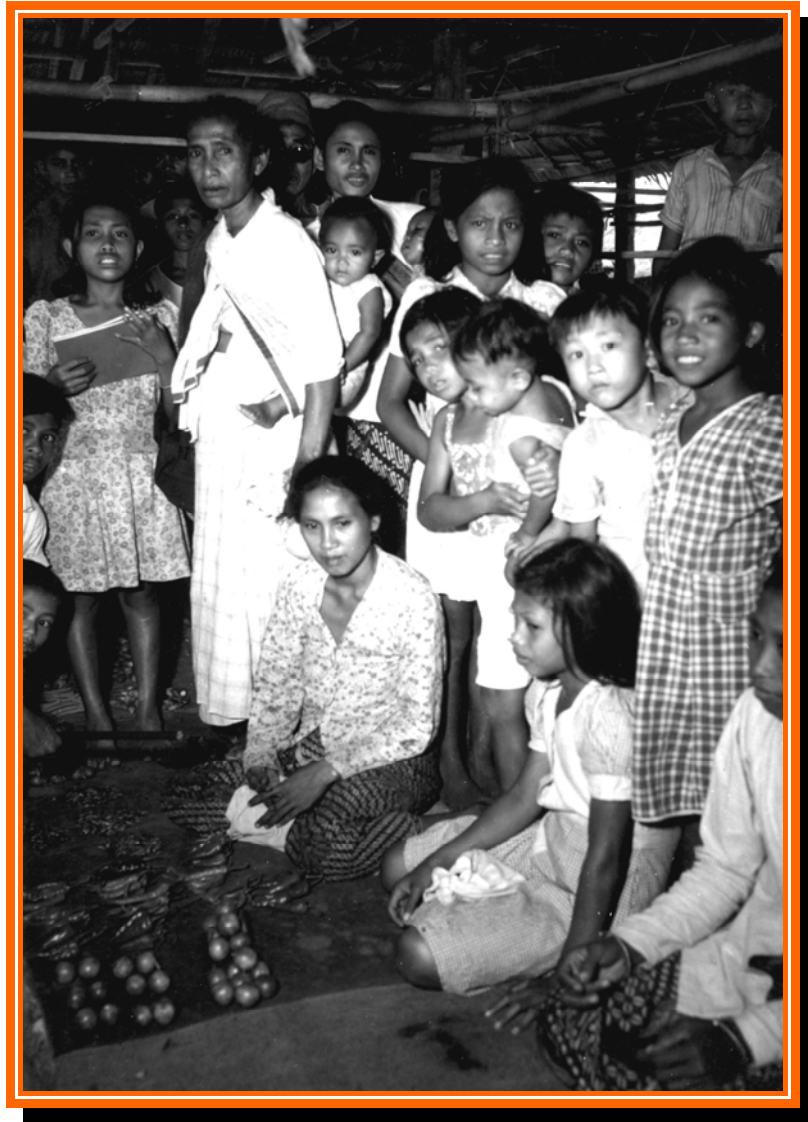
Para wanita menumbuk padi di ladang Galela, Halmahera
KIT No. 563/46



Pengolahan sago di Loloda, Halmahera
KIT No. 564/48



Membuat sagu aren di Halmahera
Kempen 90514 V V 1-6



Pasar tradisional di Halmahera
Kempen 90514 V V 1-1



Penjual makanan dengan menggunakan gendongan
di Soa Siu (Pulau Tidore)
25 September 1956
Kempen 560925 V V 4-1



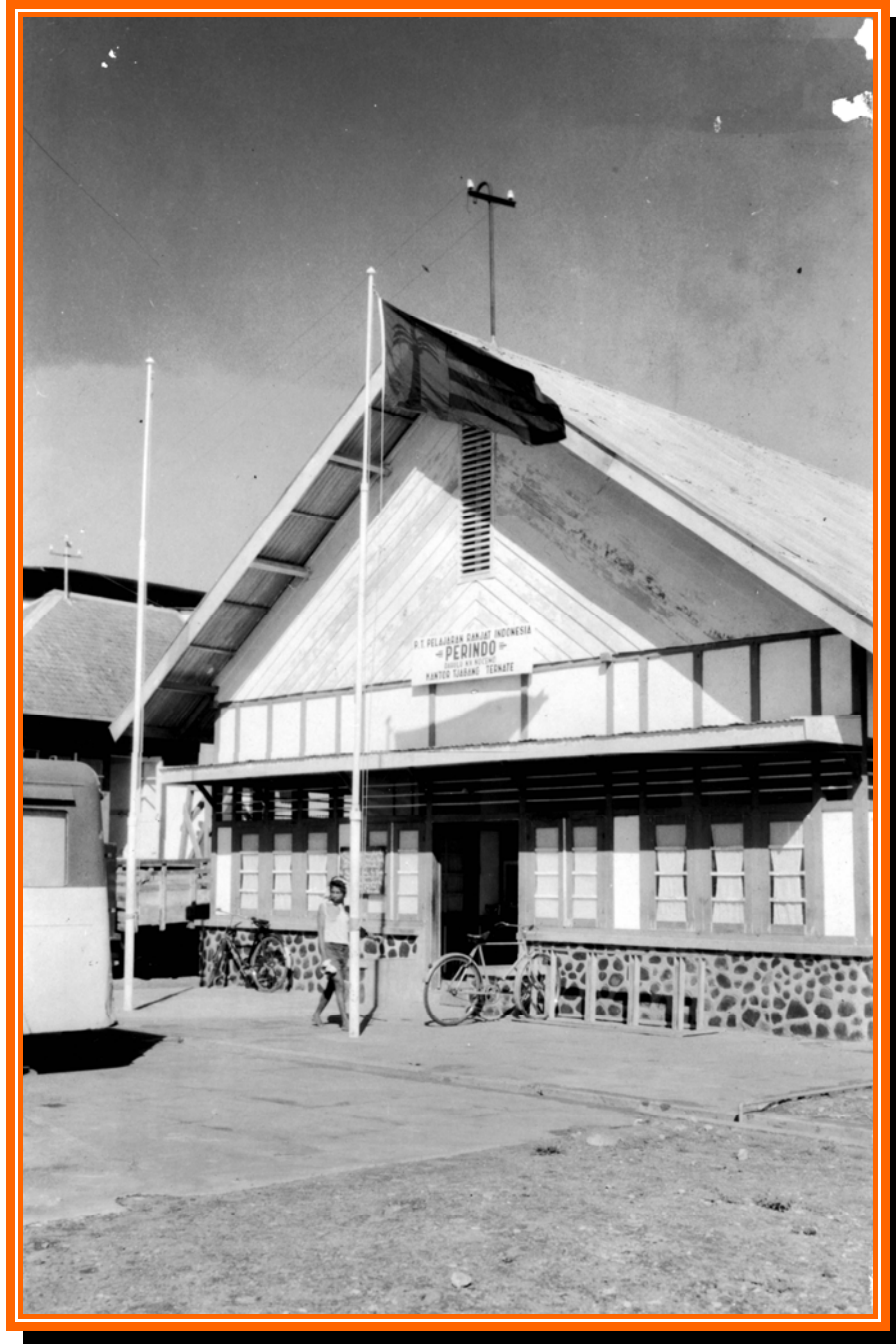
Gudang Yayasan Kopra
di pantai Pelabuhan Wajabula (Pulau Morotai)
5 Juni 1954

Sumber : Kempen 540605 V V 2-1



Kebun Percobaan dari Jawatan Pertanian Ternate
4 Juni 1954

Kempen 540604 V V 1



Kantor PT. Pelayaran Rakyat Indonesia (PELINDO) di Ternate
1 Juni 1954

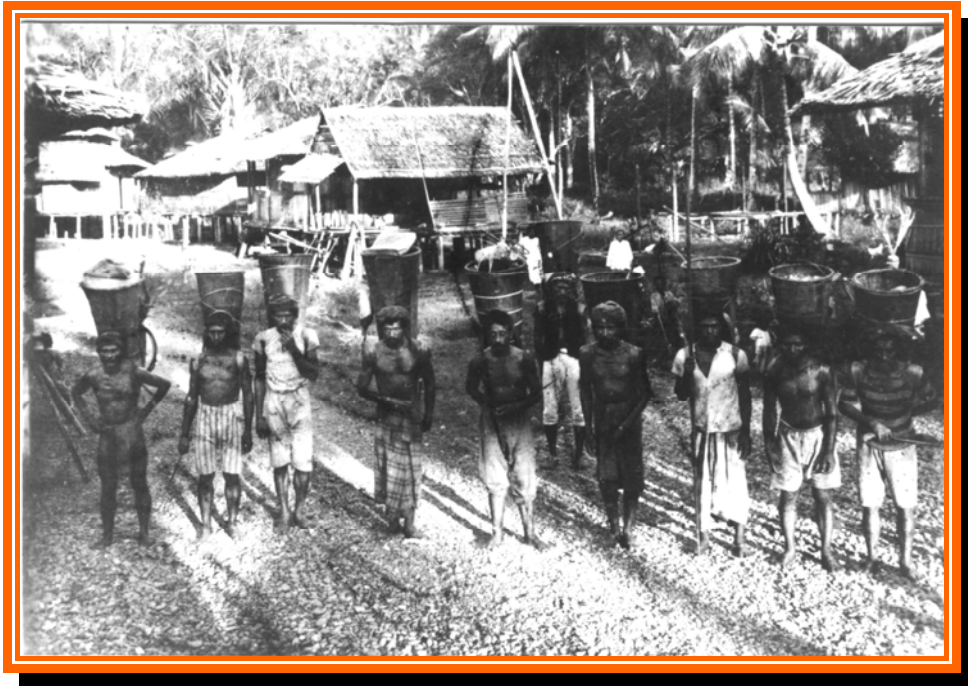
Kempen 540601 V V 1-4



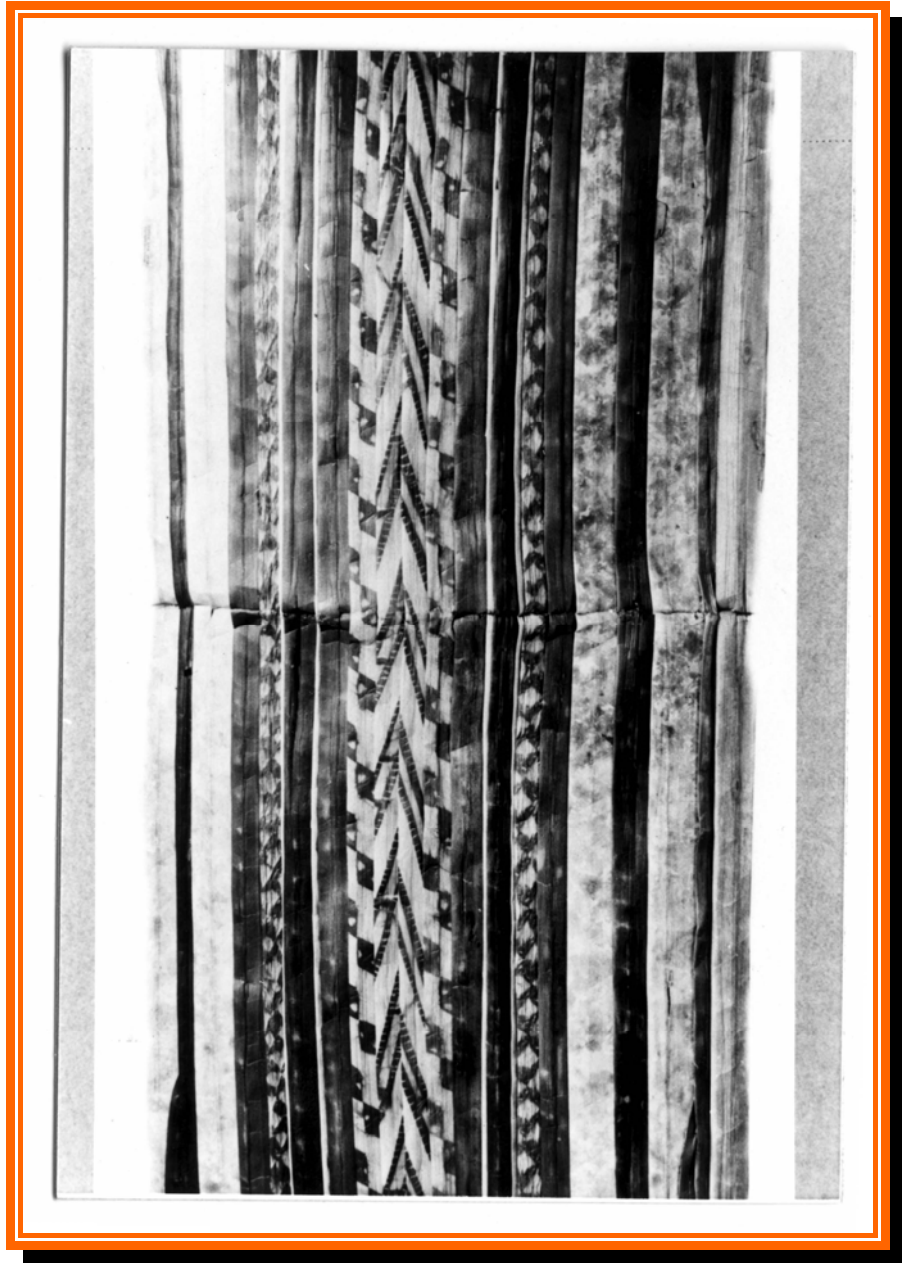
Tempat pengumpulan kelapa
di Koperasi Tani Kelapa di Rum (Pulau Tidore)
4 Desember 1956
Kempen 561204 V V 5



Kebun Cacao/Coklat di Halmahera
Kempen 90514 V V 1-3



Pengumpul Damar dari Halmahera
di Kampung Polamea, Bacan
KIT 649/89



Tikar pandan untuk tidur dari Halmahera
KIT 728/36

Pendidikan

Residentie Ternate
Afdeling *Bacan*

VERSLAG van de Inlandsche (*) *Government* school te *Bacan* over het jaar 1876.

I. AANTAL LEERLINGEN.

Aanwezig op 1 Januarij.		Gedurende het verslagjaar bijgekomen.		Totaal.		Gedurende het verslagjaar afgegaan.		Waarvan gedurende het verslagjaar op school gekomen en in hetzelfde jaar afgegaan.		Aanwezig op 31 December.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.						
j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.
35	25	0	7	46	30	5	1	-	-	41	29

(De cijfers, voorkomende in de kolom a, moeten dezelfde zijn als die voorkomende in kolom f van den staat over het jaar, voortgaande aan dat, waarover de in te dienen staat loopt, b. v. indien op den staat voor het jaar 1869 in de kolom f voorkomende 31 jongens en 23 meisjes, dan moeten de cijfers teruggevoerd worden in de kolom a van den staat voor het jaar 1870, behalve in het geval, dat op 31 December één of meer leerlingen de school verlaten, dan wel op 1^o Januarij de school voor het eerst bezoeken. In dat geval moet het verschil door den verslaggever worden opgehelderd.)

Bedenken voor de buitengewone toename of vermindering van het aantal leerlingen.

Kinderen van niet inlanders gelijkgestelde personen die de scholen bezoeken, moeten in deze en de volgende tabellen worden opgenomen en in staat III afzonderlijk vermeld.

II. WARE OF GEDISTE OUDERDOM DER LEERLINGEN.

Van 5—8 jaar.		Van 9—12 jaar.		Van 13—16 jaar.		Van 17—20 jaar.		Van 21—24 jaar.		Van ouderen leeftijd.		Totaal.	
j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.
15	20	22	8	9	2	-	-	-	-	-	-	46	30

NB. Het totaal van dezen staat moet overeenkomen met dat in staat I c.

III. AANTAL LEERLINGEN NAAR DEN STAND HUNNER OUDERS.

Aantal leerlingen wier ouders zijn:

Ambtelijke personen of aanzienlijken	Nering doende lieden of in dienst van particulieren	Landbouwers.	Totaal
4	8	60	76

NB. Het totaal van dezen staat moet overeenkomen met dat in staat I, c.

(*) Is te vallen of de school is een government of particuliere school.

Laporan Afdeling Bacan, Karesidenan Ternate tentang jumlah pelajar sekolah, usia pelajar sekolah dan jenis pekerjaan orang tua siswa pada sekolah pribumi milik pemerintah daerah Ternate tahun 1876

Ternate No. 416

Residentie Ternate
Afdeling *Ternate*

VERSLAG van de Inlandsche (*) *Government* school te *Ternate* over het jaar 1876

I. AANTAL LEERLINGEN

Aanwezig op 1 Januarij.		Gedurende het verslagjaar bijgekomen.		Totaal.		Gedurende het verslagjaar afgegaan.		Waaran gedurende het verslagjaar op school gekomen en in hetzelfde jaar afgegaan.		Aanwezig op 31 December.	
a.		b.		c.		d.		e.		f.	
j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.
26	14	27	5	60	19	87	11	2	-	29	9

(De cijfers, voorkomende in de kolom a., moeten dezelfde zijn als die voorkomende in kolom f van den staat over het jaar, voorafgaande aan dat, waarover de in te dienen staat loopt, b. v. indien op den staat voor het jaar 1869 in de kolom f voorkomende 51 jongens en 23 meisjes, dan moeten de cijfers teruggevonden worden in de kolom a van den staat voor het jaar 1870, behalve in het geval, dat op 31 December één of meer leerlingen de school verlaten, dan wel op 1^o Januarij de school voor het eerst bezoeken. In dat geval moet het verschil door den verslaggever worden opgehelderd.)

Redenen voor de buitengewone toename of vermindering van het aantal leerlingen.

Kinderen van niet inlanders gelijkgestelde personen die de scholen bezoeken, moeten in deze en de volgende tabellen worden opgenomen en in staat III afzonderlijk vermeld.

II. WARE OF REGISTE OUDERDOM DER LEERLINGEN.

Van 5—8 jaar.		Van 9—12 jaar.		Van 13—16 jaar.		Van 17—20 jaar.		Van 21—24 jaar.		Van anderen leeftijd.		Totaal.	
j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.	j.	m.
21	10	18	4	23	4	-	-	-	-	-	-	60	19

NB. Het totaal van dezen staat moet overeenkomen met dat in staat I c.

III. AANTAL LEERLINGEN NAAR DEN STAND HUNNER OUDERS.

Aantal leerlingen wier ouders zijn:

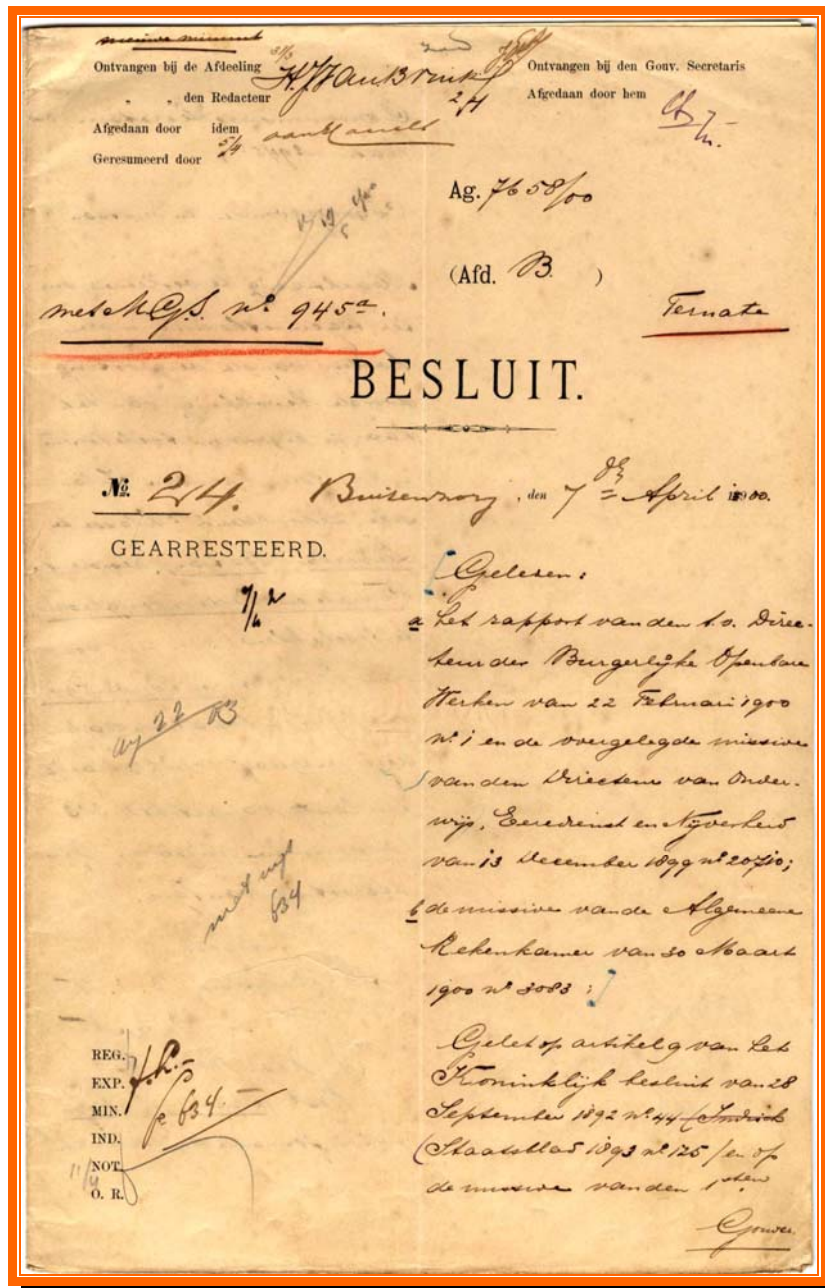
Ambtelijke personen of aanzienlijken.	Nering doende lieden of in dienst van particulieren.	Landbouwers.	Totaal.
1	29	11	41

NB. Het totaal van dezen staat moet overeenkomen met dat in staat I. c.

(*) In te vullen of de school is een *government* of particuliere school.

Laporan Afdeling Ternate, Karesidenan Ternate tentang jumlah pelajar sekolah, usia pelajar sekolah dan jenis pekerjaan orang tua siswa pada sekolah pribumi milik pemerintah daerah Bacan tahun 1876

Ternate No. 416



Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 24, 7 April 1900 tentang pemberian ijin ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Umum Kelas Dua di Labuha (Bacan), Karesidenan Ternate
BT No. 24 tanggal 7 April 1900



Murid sekolah Kristen pribumi di depan gedung sekolah
di Buli, Halmahera
KIT No. 362/20



Sekelompok murid sekolah dengan guru dan guru bantu
di Piru, Halmahera
KIT No. 320/60



Murid sekolah lanjutan sedang belajar didalam kelas
di Galela, Halmahera

KIT No. 362 / 50



Pawai Pelajar Wanita di Ternate Maluku Utara
15 Oktober 1954
Kempen 541015 VV 1-12



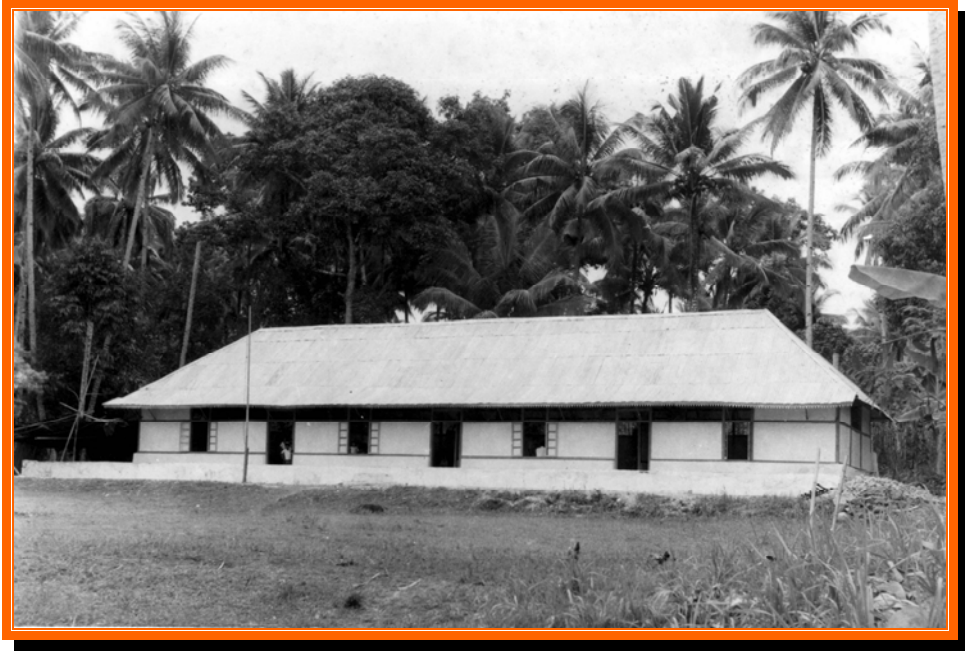
Murid Sekolah Rakyat sedang memainkan
alat musik seruling Bambu di Sasana, Pulau Bacan
17 Oktober 1954

Kempen 541017 V V 7 - 1



Bangunan Sekolah Rakyat di Labuha. Pulau Bacan
17 Oktober 1954

Kempen 541017 V V 5-1



Bangunan Sekolah Rakyat yang didanai atas swadaya rakyat
di Soa Sio, Pulau Tidore
Juli 1957

Kempen 5707 No. 17-8



Peresmian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Morotai
3 September 1957
Kempen 570903 V V 16



ROYAL NETHERLANDS EMBASSY
ZvD/ps

Arsip

No. 17410

Jakarta, October 14th, 1980

Dear Mr. Vice President,

Re: visit to Ternate

In view of your coming visit to Ternate in the North Moluccas, I would like to inform you that the Netherlands Government has donated medicines and milkpowder at a total value of Rp.6.000.000,- to the victims of the eruption of the vulcano Gamalama.

One of my assistants personally delivered the relief goods to the Bupati of Ternate on October 6th, 1980, and has been cordially received by the local authorities. He also viewed the vaccination of the population and visited some of the refugee camps.

I am very impressed about the relief operations of the Indonesian Government and I feel proud that the Netherlands Government could assist you in providing the relief goods.

Please accept, Sir, the assurances of my highest regards.

Your sincerely,

L.H.J.B. van Gorkom
Ambassador of The Netherlands

His Excellency H. Adam Malik
Vice President R.I.
Jakarta

n73

2621/1001/om/80

Surat LHJB Van Gorkom Duta Besar Belanda kepada Wakil Presiden RI tentang rencana kunjungan ke Ternate dalam rangka pemberian bantuan obat-obatan dan susu sejumlah Rp. 6.000.000 untuk korban gunung merapi GAMALAMA, 14 Oktober 1980

Setpres Adam Malik No. 935



Rumah Sosial Budi Santausa di Ternate yang dibangun 1953
1 Juni 1954

Kempen 540601 V V 1-3

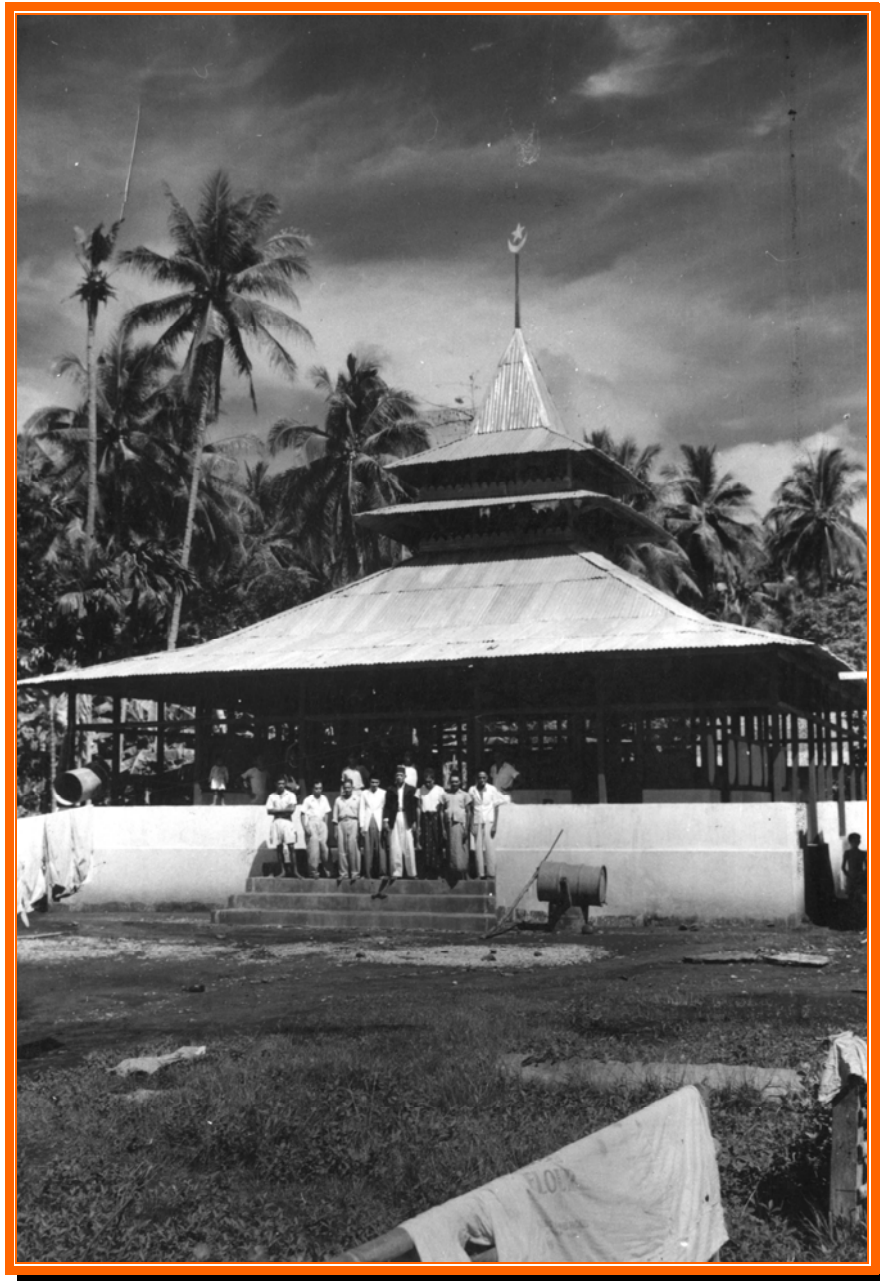
Agama



Masjid tampak dari depan, Ternate, Maluku
KIT No. 803/81



Tempat peribadatan tradisional
di Desa Todokki (Iboe), Halmahera
KIT No. 312/34



Jama'ah foto bersama di depan Masjid Gorua, Tobelo,
Halmahera

8 Juni 1954

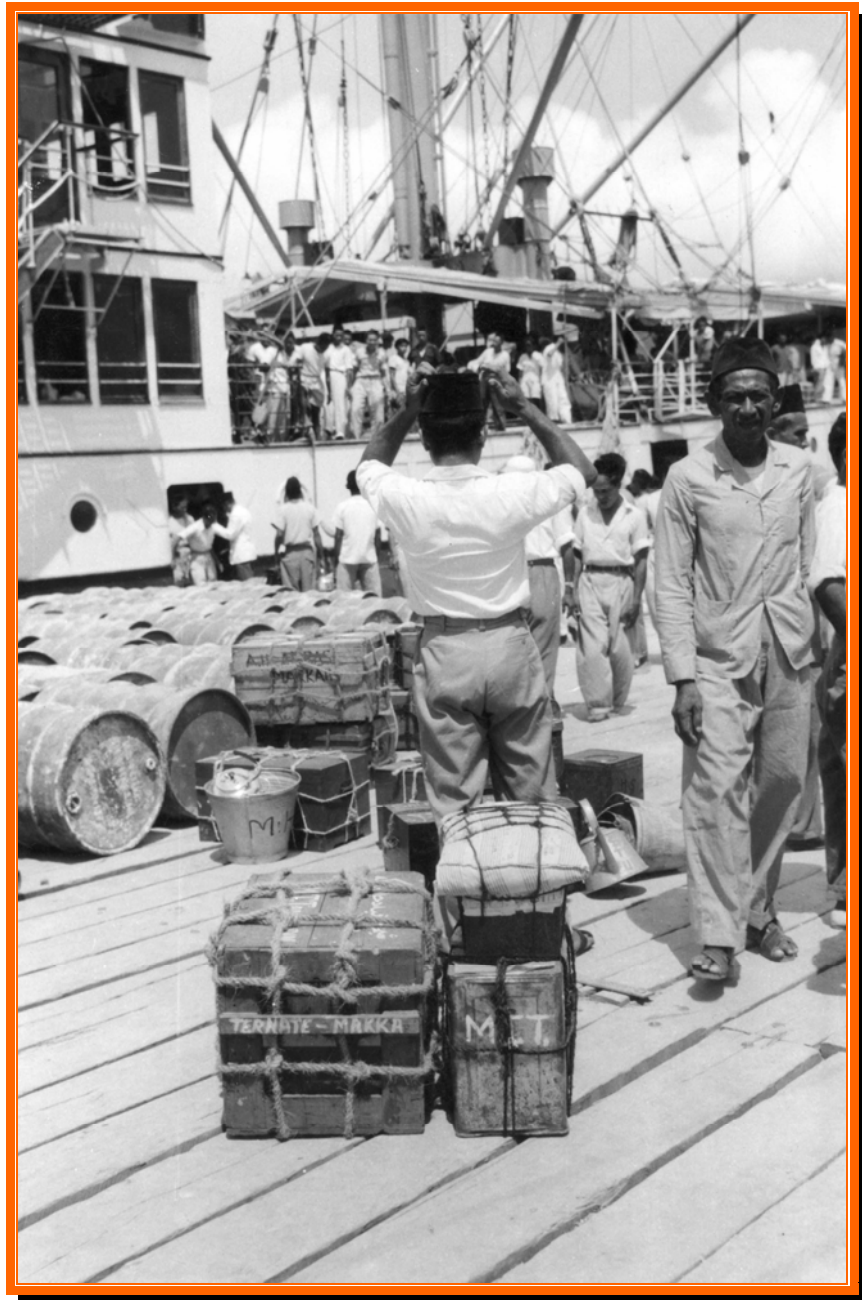
Kempen 540608 V V 4-1



Gereja Protestan Kota Ternate

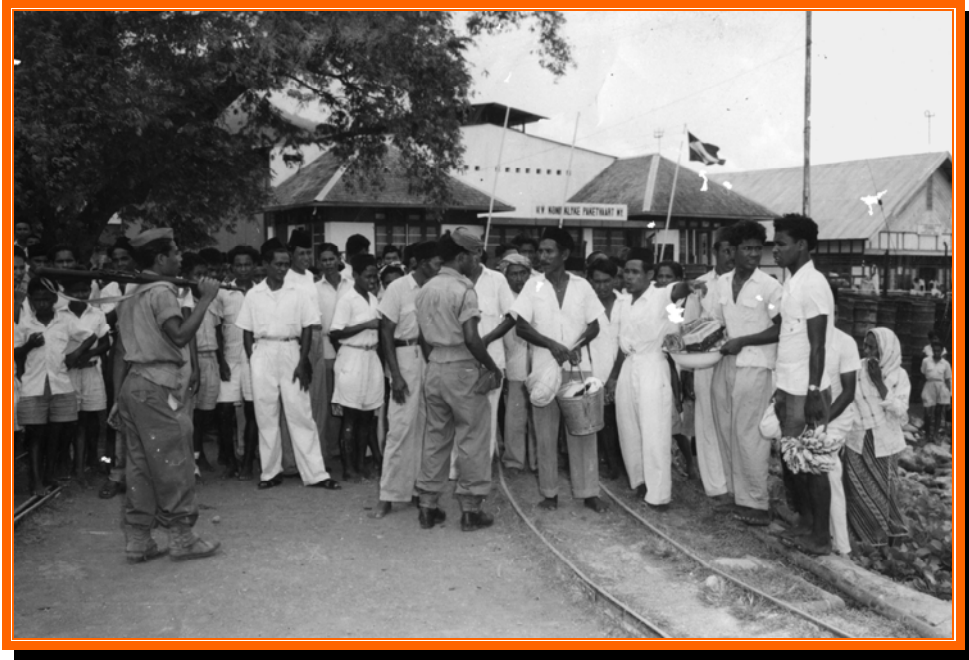
1 Juni 1954

Kempen 540601 V V 2-2



Rombongan Jama'ah Haji yang akan bertolak ke Mekkah dari
Pelabuhan Ternate dengan menumpang kapal
2 Juni 1954

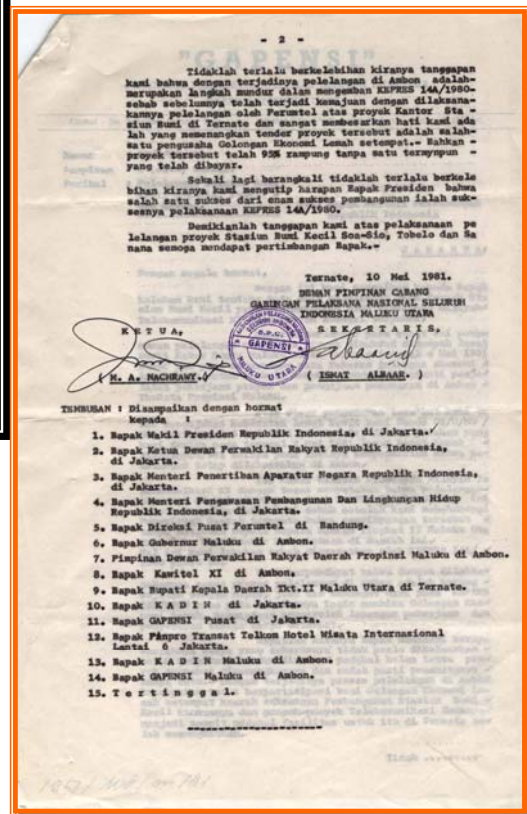
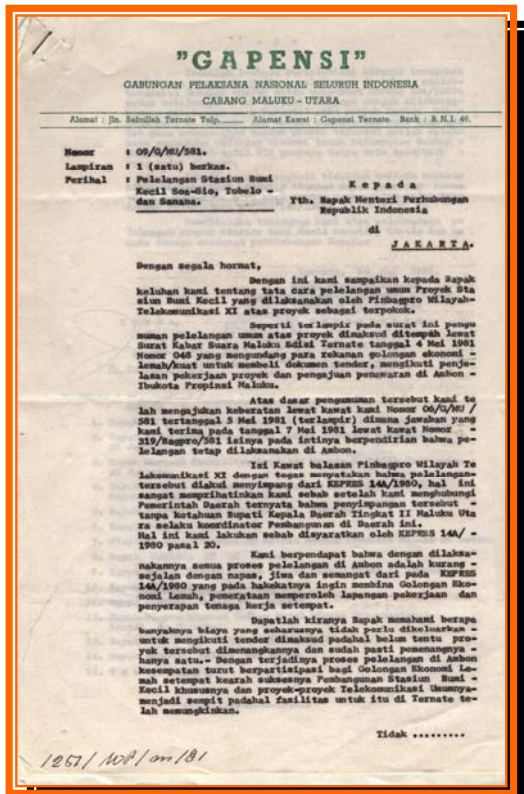
Kempen 540602 V V 2



Rombongan Jama'ah Haji dan para pengantarnya sebelum bertolak dengan kapal dari Pelabuhan Ternate
2 Juni 1954

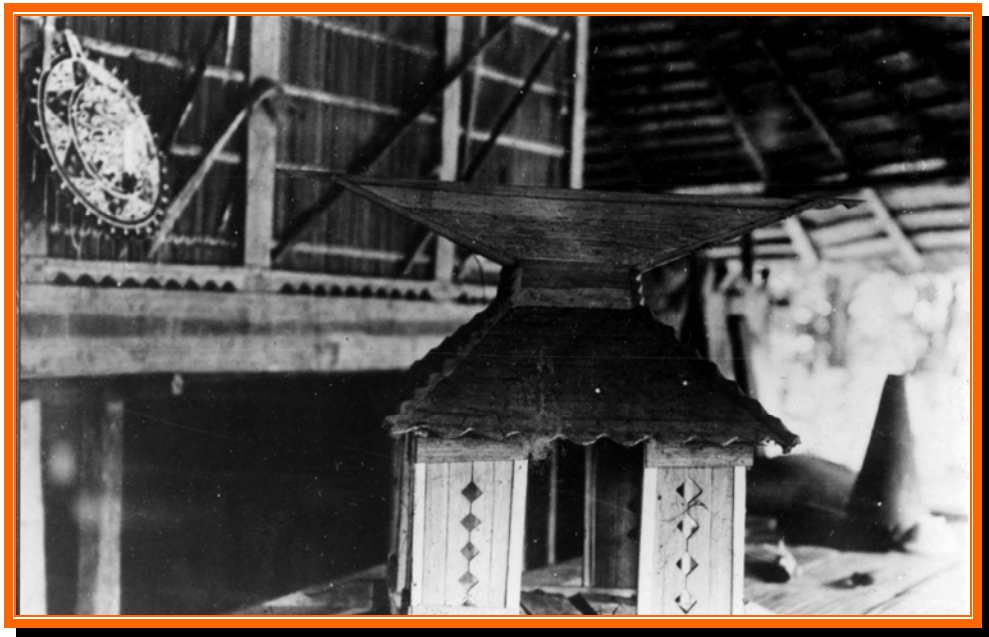
Kempen 540602 V V 3

Bangunan



Surat dari DPC Gapensi (Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia) Maluku Utara kepada Menteri Perhubungan tentang tanggapan terhadap tata cara pelelangan proyek Stasiun Bumi Kecil Soa Sio, Tobelo dan Sanana yang dilakukan oleh Pimbagpro wilayah Telekomunikasi XI, dengan lampiran.
10 Mei 1981.

Setwapres Adam Malik No.1061

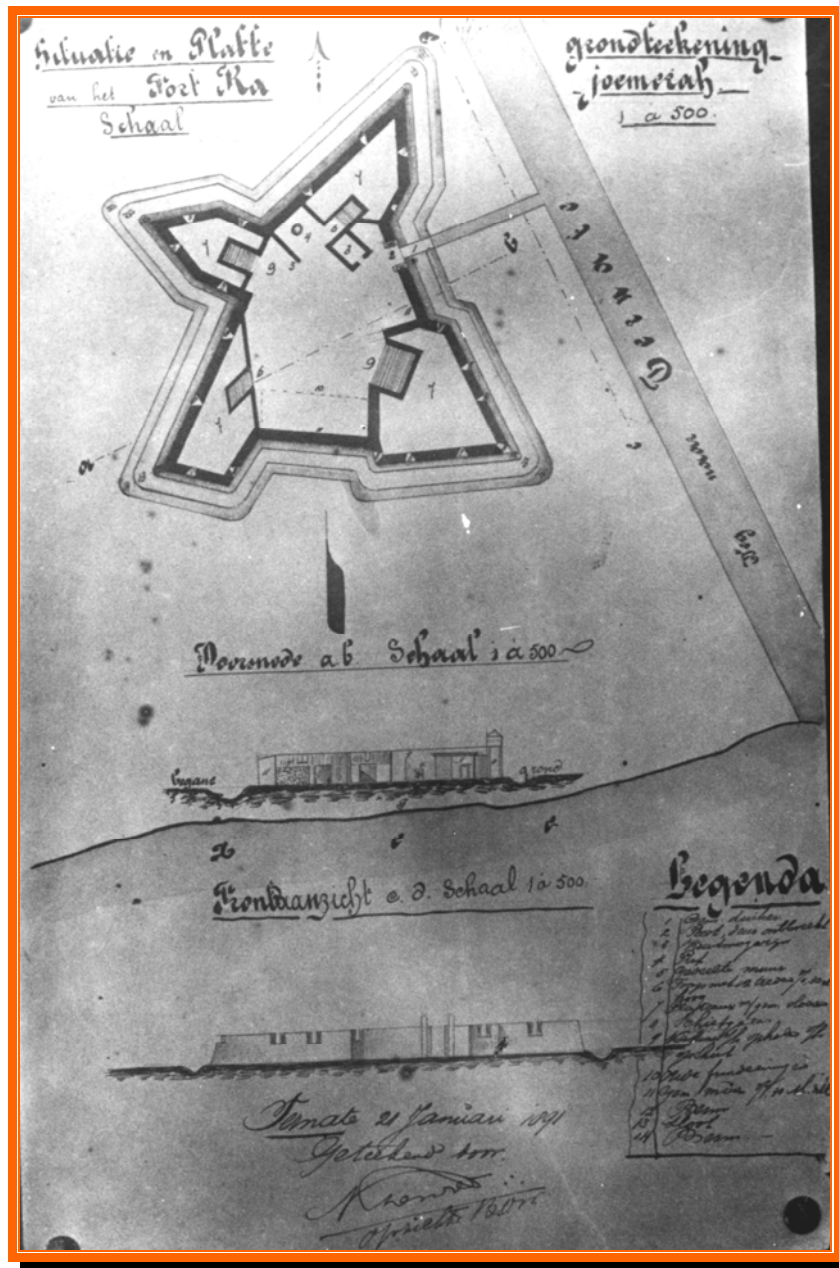


Miniaturn Rumah sebagai hiasan didalam upacara adat pemakaman, Halmahera

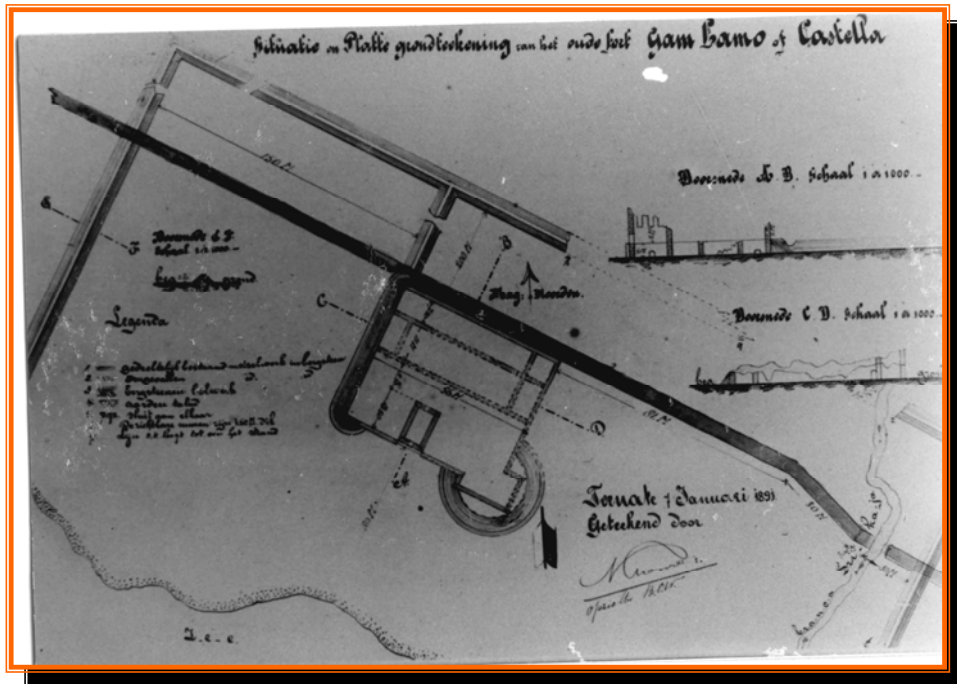
KIT No. 312/40



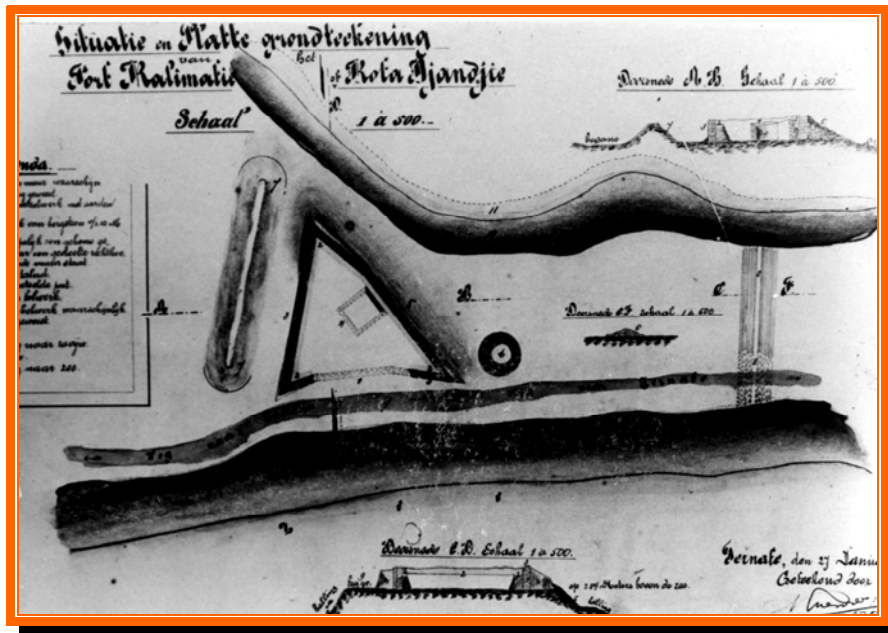
Gedung Studio RRI di Ternate
1 Juni 1954
Kempen 540601 V V 2



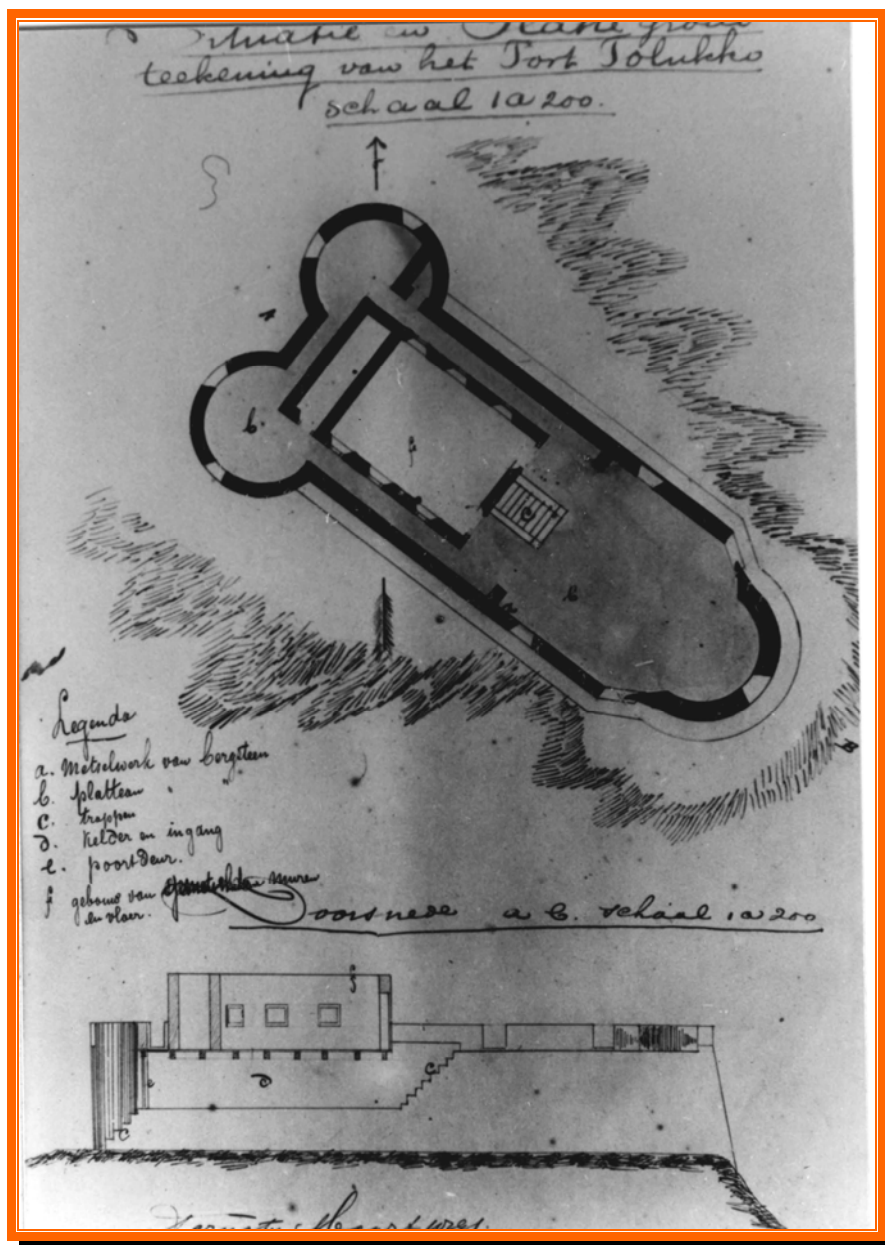
Gambar denah dasar Benteng Kayu Merah, Ternate.
21 Januari 1891
KIT No. 71/82



Gambar denah Benteng atau Castella tua Gambama, Ternate.
 1 Januari 1891
KIT No. 990/48



Gambar denah Benteng Kalimati/Kota Janji, Ternate
KIT No. 990/46



Gambar denah Benteng Tolukho
 KIT No. 990/41 (Maret 1891)



Benteng Oranje, Ternate.

KIT No. 269/46



Tembok Benteng Oranje di Ternate
KIT No. 221/2



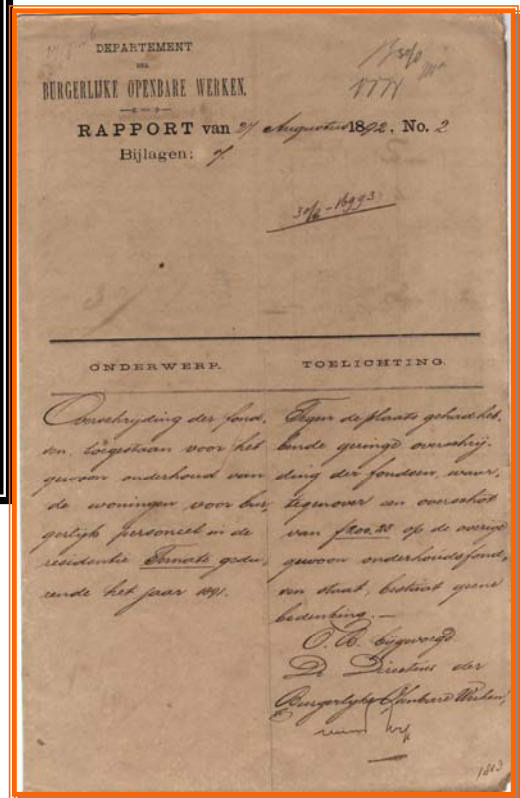
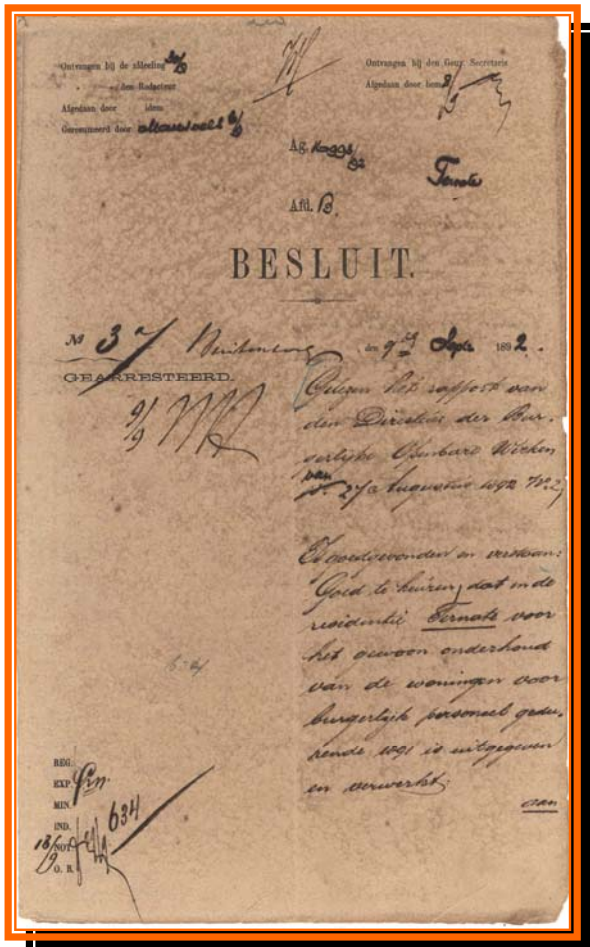
Situasi di dalam Benteng Oranje, Ternate
KIT No. 337/52



Tembok Benteng Tafasoho di Pulau Makian
KIT No. 344/33



Rumah penjaga pada Benteng Kalamatta Ternate
KIT No. 345/83



Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 37 tanggal 9 September 1892 tentang persetujuan pemberian rumah sederhana kepada penduduk sipil di Karesidenan Ternate, disertai lampiran

BT No. 37 / 9 Sept 1892



Pemukiman di kampung Tobaku, Halmahera.

KIT No. 836/74



Rumah penduduk asli di tepi laut, Ternate.

KIT No. 148/67



Rumah yang dibuat dari bambu dan
beratap kirai di Ternate
3 Juni 1954
Kempen 540603 V V 2



Rumah buruh Tambang Mangan dengan latar belakang
pemandangan Pantai Pulau Doi, Halmahera
6 juni 1954

Kempen 540606 V V 2-3



Perkampungan rakyat di Pantai Weda, Halmahera
7 Juni 1954

Kempen 540707 V V 5-2

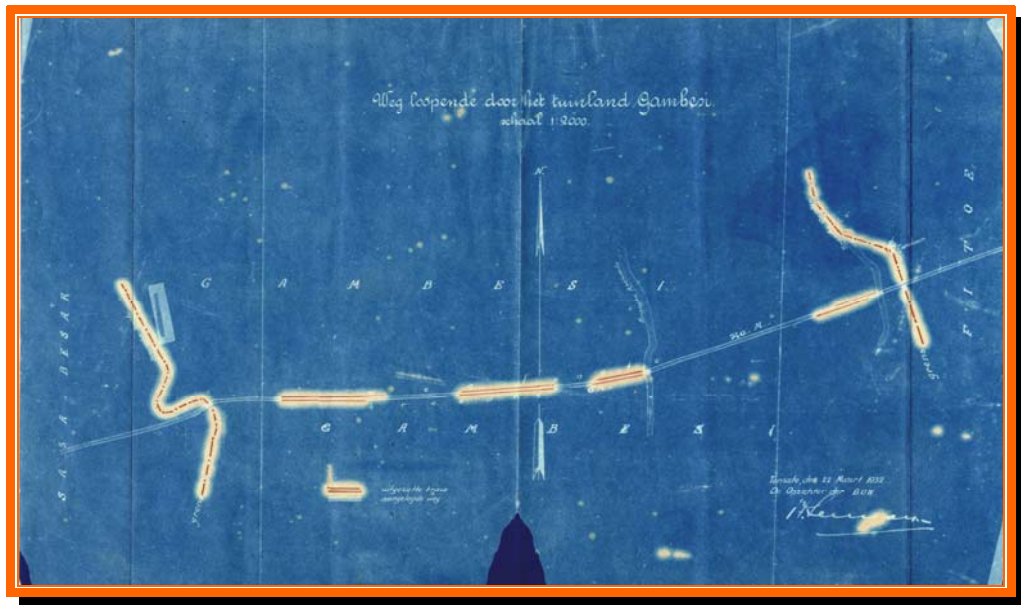


Rumah di Wajabula, yang dibuat dari bahan-bahan seng, besi
tua bekas peninggalan Tentara AS di Morotai

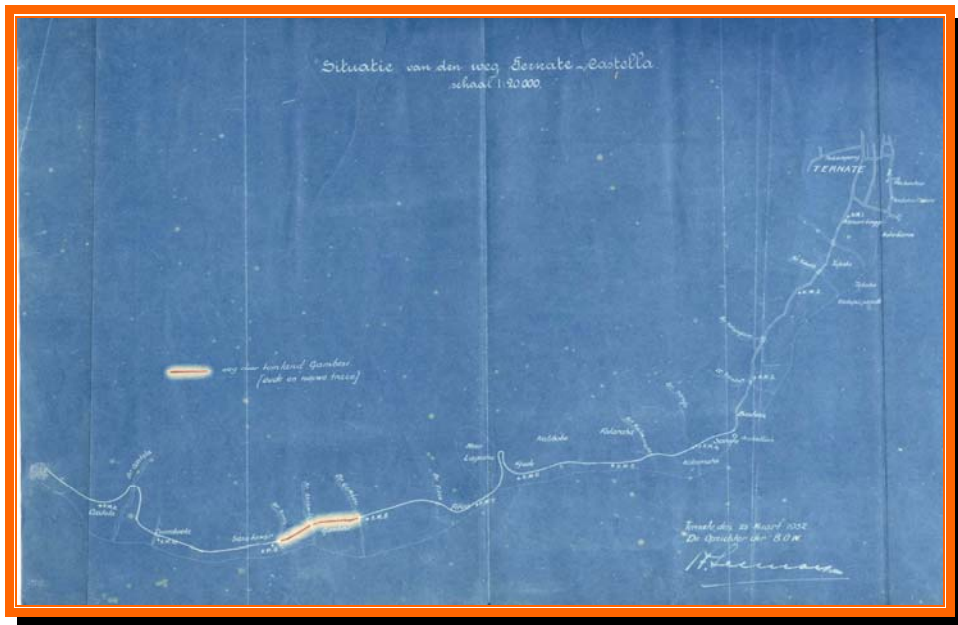
5 Juni 1954

Kempen 540605 VV 1-1

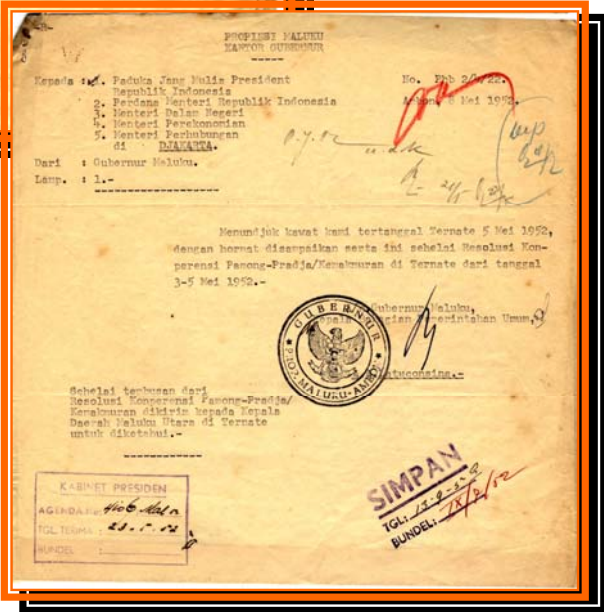
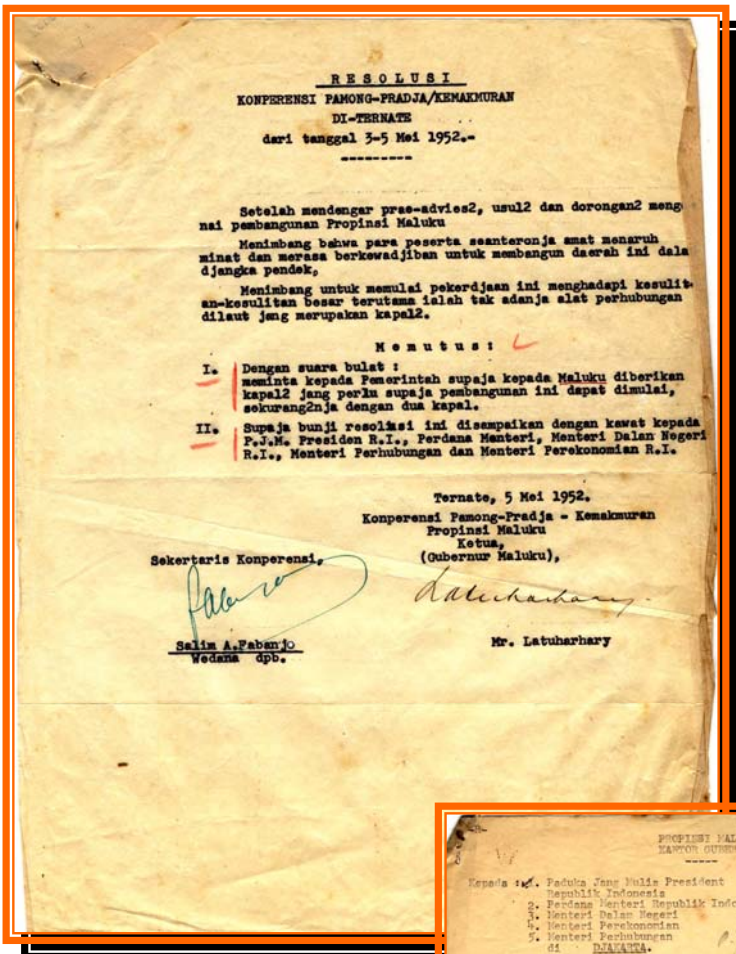
Transportasi



Peta situasi jalan Ternate Castella, Ternate
22 Maret 1932
BOW No. BV 12



Pembangunan jalan menuju Kolemata – Castella melalui daerah Gambessi- Sasalanden
22 Maret 1932
BOW No. BV 12



Resolusi Konferensi Pamong Praja – Kemakmuran di Ternate tentang permintaan dua buah kapal, 5 Mei 1952
Kabinet Presiden No. 2204



Perahu beratap " Pahata" dan " Rorehe" tertambat di tepi laut
Tobelo, Pulau Halmahera

KIT No. 539/38



Kapal uap "Campphys" berlabuh di Pelabuhan Ternate
KIT No. 541 / 34



Kapal uap "Plancius" berlayar menuju Ternate
KIT No. 541/59



Jalan protokol disepanjang pantai Ternate
KIT No. 92/78



Perahu Kollek sebagai alat transportasi tambangan di
Pelabuhan Tobelo, Halmahera

8 – 9 Juni 1954

*Kempen 540608 V V 9 dan
Kempen 540608 VV 12*

Budaya

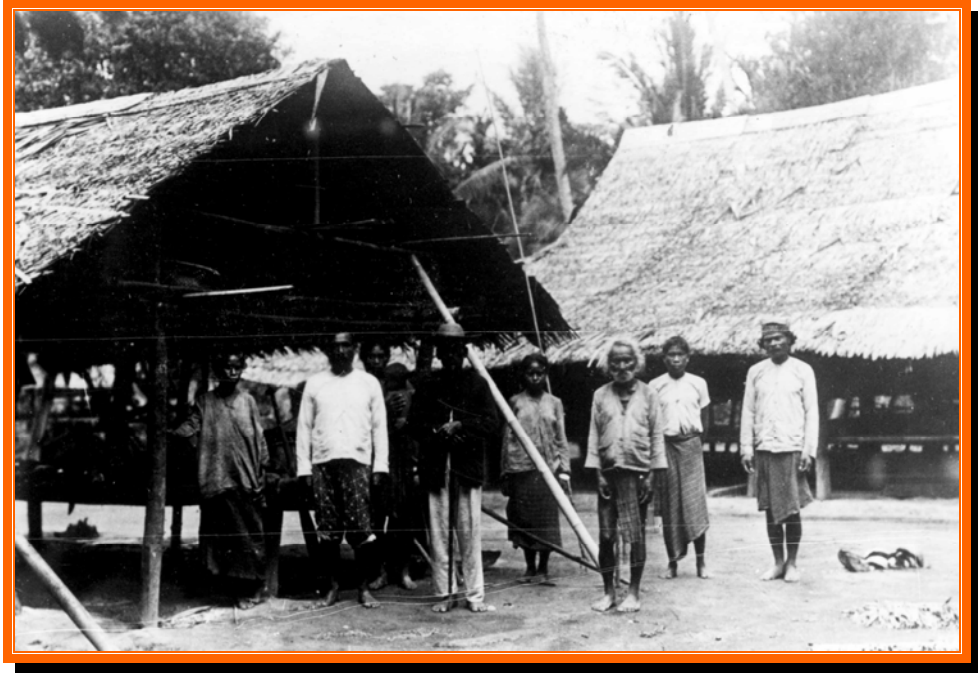


Kepala Distrik dan Kepala Kampung Galek, Halmahera, Maluku
KIT No. 327/56



Seorang guru beserta istri dan anaknya di depan rumahnya
di Afea, Halmahera

KIT No. 453/8



Para Sangaji dari Kampung Togal, Halmahera
KIT No. 327/58



Suku Tobelorens di Weda, Halmahera
KIT No. 452/14



Suku Sasana, Bacan
17 Oktober 1954
Kempen 541017 V V 6-1



Anak-anak Suku Gebe, di Pulau Gebe
23 September 1956
Kempen 560923



Permainan Toku pada masyarakat Morotai dan Halmahera.

KIT No. 408/2

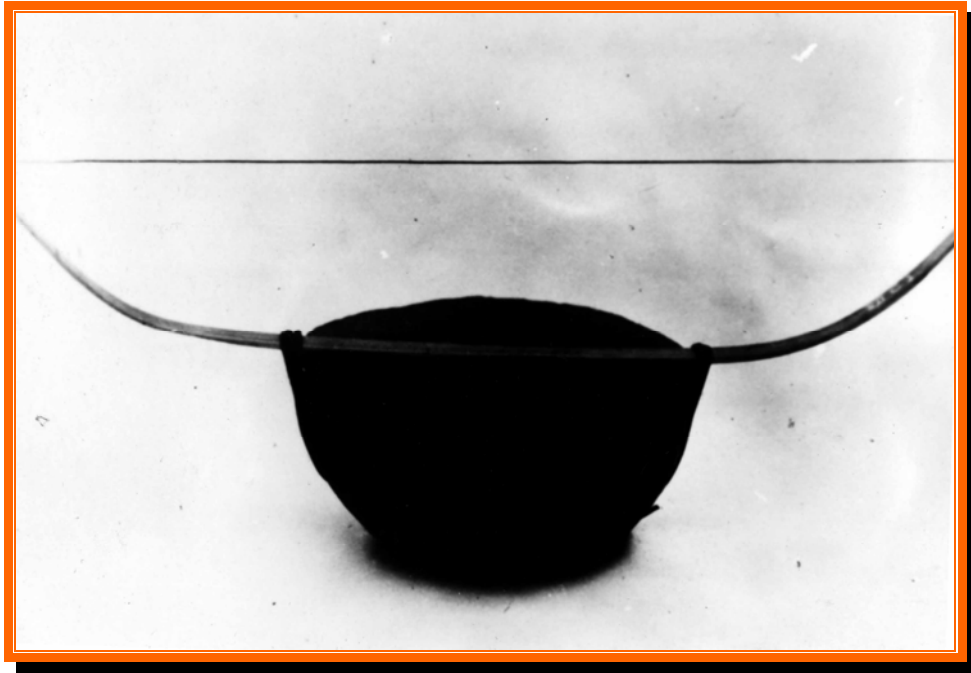


Lukisan di atas kulit pohon, pulau Halmahera
KIT No. 733/69



Beberapa instrumen (alat musik) petik dari Halmahera.

KIT No. 910/77



Alat musik Kumbi-kumbi berasal dari Ternate, Maluku.

KIT No. 909/63



Orkes seruling Bambu yang menyambut rombongan Mobile
Unit Kementerian Penerangan di Pelabuhan Weda, Halmahera,
7 Juli 1954

Kempen 540607 V V 1-3



Pemain musik Tifa yang mengiringi tarian pada malam resepsi
setelah Pelantikan Gubernur Irian Barat di Tidore
23 September 1956

Kempen 560923 V V 4-7



Pemain musik yang mengiringi Tari Gale
29 Agustus 1957

Kempen 570829 V V 1- 6



Pemain musik Bambu di Jailolo
31 Agustus 1957
Kempen 570831 V V 2- 4



Alat musik suling yang dimainkan oleh para pemuda Ternate
Kempen 90516 V V 1



Pertunjukan Tari adat Ternate
17 September 1951
Kempen 511117 V V 9



Pertunjukan Tari Cakalele
17 September 1951
Kempen 511117 V V 8



Pertunjukan Tarian Adat Jailolo
18 Juli 1954
Kempen 540718 V V 4-5



Tarian Soya-soya
30 Agustus 1957
Kempen 570830 V V 2 -9



Seorang wanita dalam pakaian adat Weda, Halmahera
7 Juni 1954

Kempen 540607 V V 2-3



Pakaian adat laki-laki dan perempuan Suku Morotai
19 Juli 1954

Kempen 540719 VV 1-1



Pakaian adat laki-laki suku Jailolo
31 Agustus 1957
Kempen 540831 V V 4-1 dan V V 4-2

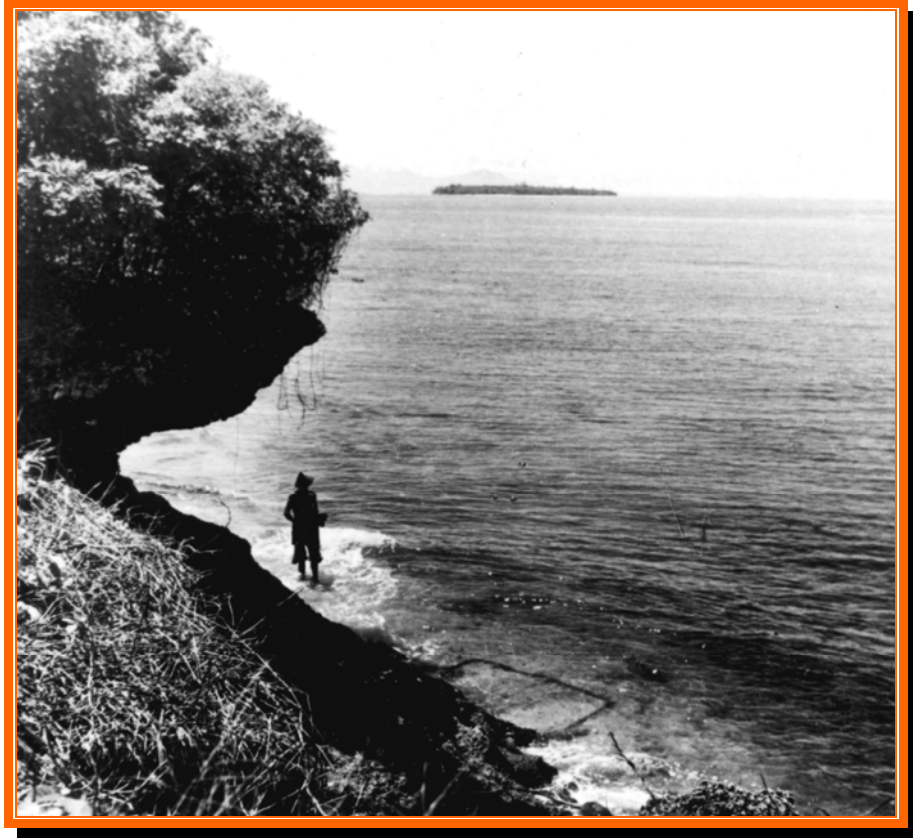
Pariwisata



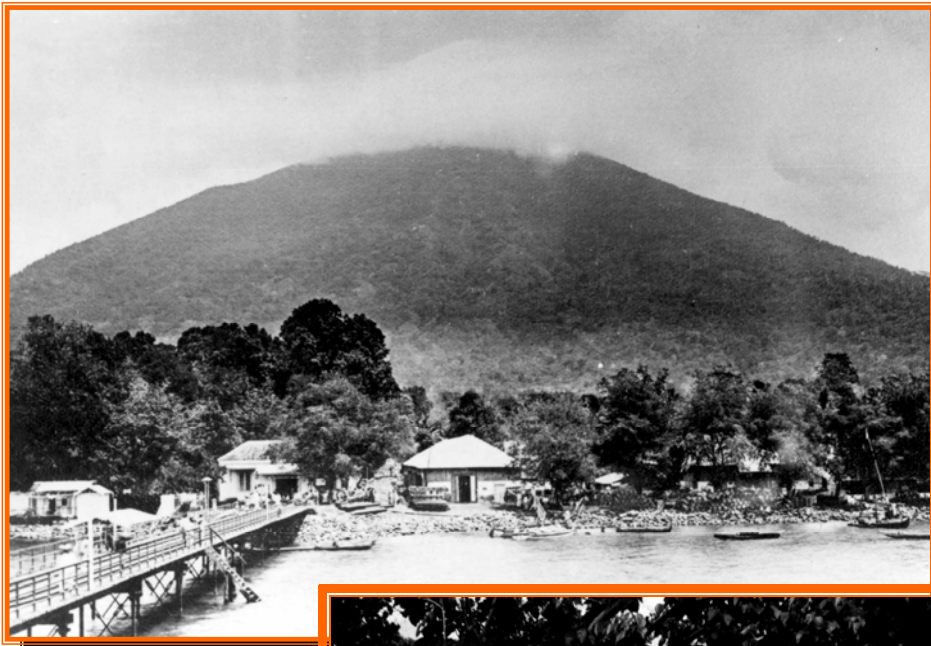
Pemandangan Gunung Berapi Gamalama tampak kapal-kapal
yang sedang berlayar di laut Ternate

Februari 1840

KIT 971 / 17



Pemandangan Pantai Morotai dengan latar belakang
Pulau Halmahera
1948
KIT 971 /15



Pemandangan Pantai Ternate dengan latar belakang
Gunung Berapi
17 November 1951
*Kempen 511117 VV 62 dan
KIT 148/59*



Tugu Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Weda,
Halmahera
12 Oktober 1954
Kempen 541012 V V 2-1

Daftar Arsip yang Diserahkan

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN

I. GEOGRAFIS

1. Peta Kota Ternate dan sekitarnya antara lain; Kampung Eropa, Kampung Cina, Explanade, Gereja, Benteng Oranje, Kampung Ternate, Kampung Makassar
2. Laporan singkat situasi pulau-pulau dan tempat-tempat di Maluku, seperti sebelah utara Magindanaw, Kerajaan Ternate, Tidore dan Batchian sampai Papua dan Neuw Guinea, Kopi, 11 Juni 1706
3. Peta Maluku, 1883 – 1885
4. Peta Halmahera, 1933,
5. Peta Pulau Tidore, Pulau Mare, Pulau Moti dan Pulau Makian, 1944
6. Peta Pulau Hiri, Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore, 1944

II. PEMERINTAHAN

7. Surat serah terima jabatan pengunduran diri Residen Ternate; J.H. Tobias dan pengangkatan C. Bosscher sebagai residen, 1853
8. Bagian dari Laporan Singkat Residen Ternate kepada Gubernur Kepulauan Maluku di Ambon tentang kejadian-kejadian di Karesidenen Ternate selama bulan Juli 1858

9. Catatan tentang jumlah penduduk di Pulau Ternate, Bacan, termasuk wilayah-wilayah kerajaan Ternate, Tidore, Bacan yang terdapat dalam Laporan Umum Karesidenan Ternate pada tahun 1862.
10. Laporan umum Karesidenan Ternate tentang wilayah, kependudukan, kepolisian, pengairan, situasi, dinas pekerjaan umum, perikanan, perdagangan pelabuhan, perputaran uang, dan keagamaan, 1867.
11. Bagian salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tanggal 10 Desember 1946 tentang Peraturan Pemilihan Dewan Kota Praja Ternate
12. Surat Dewan Daerah Serikat Sekerja PTT Maluku dan Irian Barat kepada Menteri Koordinasi Perhubungan Dengan Rakyat tentang keputusan-keputusan Konferensi Daerah SSPTT ke II Maluku dan Irian Barat di Ternate, 24 Oktober 1964
13. Undang-undang No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat, 4 Oktober 1999
14. Undang-undang No. 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 7 Juni 2000.

III. KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA KE MALUKU UTARA

A. Presiden

15. Presiden Soekarno berfoto bersama dengan Keluarga Sultan Ternate di Istana Kesultanan Ternate dalam rangkaian perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 17 November 1951
15. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati meninggalkan pelabuhan Ternate dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 17 Juli 1954
16. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati menggunakan perahu menuju ke pantai di Tidore dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
17. Presiden Soekarno disambut dengan acara adat menginjak telur pada saat tiba di Jailolo (Pulau Tidore) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
18. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati berserta rombongan menghadiri Rapat Umum di Pulau Makian dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
19. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati meneriakkan pekik Merdeka pada Rapat Umum di Makian dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
20. Presiden Soekarno tengah menerima persembahan dari rakyat Tobelo (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954

21. Masyarakat Tobelo menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disepanjang jalan dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
22. Presiden Soekarno menghadiri Rapat Umum di Buli (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
23. Masyarakat Labuha menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disepanjang jalan dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
24. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati menggunakan perahu motor menuju Weda (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
25. Presiden Soekarno memukul tetabuhan yang mengiringi tarian adat Weda (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954
26. Pidato Presiden Soekarno pada rapat umum di Beo (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954

B. Wakil Presiden

27. Wakil Presiden Moh. Hatta menerima sambutan di pelabuhan Labuha (Pulau Bacan) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 15 Maret 1951

28. Wakil Presiden Moh. Hatta berfoto bersama keluarga Kepala Daerah Ternate dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 16 Maret 1951
29. Wakil presiden Moh. Hatta menghadiri Rapat Umum di Ternate dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 16 Maret 1951
30. Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Jailolo (Pulau Halmahera) dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku Utara, 14 Oktober 1954
31. Peletakkan karangan bunga di Tugu Proklamasi Sasana oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan pembangunan di daerah Maluku Utara, 17 Oktober 1954
32. Peletakkan batu pertama gedung S.G.B Sasana oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku Utara, 17 Oktober 1954

C. Pejabat Lain

33. Sekjen Kementerian Penerangan Roeslan Abdul Gani foto bersama dengan istri Sultan Ternate dalam rangkaian perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 17 November 1951
34. Menteri Pertahanan Dr. F.L. Tobing mendampingi presiden tengah menerima ucapan selamat dari masyarakat yang hadir pada resepsi di rumah Kepala Daerah Ternate dalam rangkaian perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 17 Juli 1954

35. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Mr. Sumarman sedang mengadakan rapat dengan Pamong Praja di Ternate mendampingi Wajil Presiden dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan perkembangan pembangunan di daerah Maluku Utara, 14 Oktober 1954
36. Dari kiri ke kanan : Direktur Jenderal RRI Maladi, Menteri Negara urusan Umum K.H. Rusli Abdul Wahid, Wakil Perdana Menteri I Mr. Moh. Roem, Menteri Dalam Negeri Mr. Sunarjo, Menteri Penerangan Sudibjo tengah menyambut aubade pelajar di Tidore dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan Ke Maluku Utara, 2 Juni 1956

IV. KESULTANAN DI MALUKU UTARA

37. Bagian dari catatan perjalanan komisi untuk Empat negeri di Papua yang telah melakukan perjanjian persahabatan dengan Kesultanan Ternate, Agustus 1779 sampai Oktober 1780.
38. Ringkasan surat-surat rahasia Pangeran Noekoe dari Kesultanan Tidore, tahun 1800.
39. Sultan Nuku (Paduka Sri Sultan Saidul Jihad Muh. El. Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan), tanpa tahun
40. Surat ucapan terima kasih kepada Residen Ternate, atas pemberian nama Pangeran cucu pertama "Asa Nagara" Sultan Tidore, salinan, 25 Januari 1878. Tulisan dan bahasa Arab Melayu.
41. Mahkota Sultan Tidore, tanpa tahun

42. Sultan Bacan bergambar bersama pembesar Belanda di depan Istana Kesultanan Bacan
43. Sultan Bacan ke 18 , Haji Mohammad Usman
44. Mahkota Kesultanan Bacan, tanpa tahun
45. Istana Kesultanan Bacan, tanpa tahun
46. Masjid Kesultanan Bacan, tanpa tahun
47. Istana Kesultanan Ternate
48. Sultan Ternate, 1901

V. POLITIK

49. Beberapa pesawat tempur Amerika ketika perang dengan Jepang di Morotai.
50. Telegram Pemberitaan tentang pendaratan pasukan Sekutu dan penetapan pagkalan Militer Sekutu di Morotai, 5 Oktober 1945
51. Surat Direktur Kabinet Presiden Mr. Ratmoko kepada Perdana Menteri tentang penyampaian salinan surat kawat dari Dewan Raja-raja dan Dewan Maluku Utara tertanggal 13 Mei 1950 mengenai proklamasi berdirinya Provinsi Maluku dan Negara Republik Indonesia dengan penjelasan bahwa Maluku Utara menjadi inti provinsi Maluku, dengan lampiran

52. Keputusan Presiden RIS No. 204 tahun 1950 tentang penetapan keadaan darurat perang untuk daerah Maluku dan Selatan terhitung tanggal 4 Juli 1950, 4 Juli 1950
53. Poster ajakan melaksanakan pemilu " Tidak Turut Memilih -Tidak Turut Memerintah" di depan Kantor Kabupaten Daerah Ternate, 1 Juni 1954
54. Staf Kementerian Penerangan Sdr. Husni Abbas tengah memberi penjelasan Pemilihan Umum pada Rapat Umum di Weda, 7 Juni 1954
55. Rapat Umum tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemungutan Suara Weda, 7 Juni 1954
56. Pangkalan Angkatan udara Morotai , 3 September 1957

VI. SOSIAL - EKONOMI

57. Laporan pertanian tentang penanaman padi, jagung, tembakau, trbu, kopi, sagu, kapas, coklat, rempah-rempah, pala, cengkeh, lada, peternakan, 1862
58. Hasil survey tentang situasi ekonomi di daerah Ternate oleh Prof. Dr. J.H.F Kohlbrugge dari Utrecht, 29 September 1931
59. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 76/UM/54 tentang penghapusan adanya Inspeksi Djawatan Kehutanan Indonesia Timur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Djawatan Kehutanan tanggal 22 Januari 1951 No. 927/I/5, membentuk kehutanan-kehutanan provinsi yang terdiri dari kehutanan daerah

Maluku Utara yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Sub Daerah Hutan

60. Hasil rotan yang diangkut dari hutan di pantai Wajabula, Morotai
61. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 61/UM/54 tentang pembentukan kehutanan-kehutanan daerah untuk Provinsi Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Batas kehutanan Provinsi Maluku terdiri dari kehutanan daerah Maluku Utara batas administratif dan daerah pamong praja sesuai dengan daerah yang bersangkutan, 24 Juni 1954
62. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 157/UM/56 tentang perubahan kedudukan kehutanan-kehutanan daerah Maluku Utara sederajat dengan daerah hutan, 19 Oktober 1956
63. Nelayan Tidore bekerja dengan suka cita di Galela, Halmahera
64. Jaring dan bubu sebagai alat penangkap ikan di Halmahera
65. Para wanita menunbuk padi di ladang Galela, Halmahera
66. Pengolahan sagu di Loloda, Halmahera
67. Membuat sagu aren di Halmahera
68. Pasar tradisional di Halmahera

69. Penjual makanan dengan menggunakan gendongan di Soa Siu (Pulau Tidore), 25 September 1956
70. Gudang Yayasan Kopra di pantai Pelabuhan Wajabula (Pulau Morotai), 5 Juni 1954
71. Kebun Percobaan dari Jawatan Pertanian Ternate, 4 Juni 1954
72. Kantor PT. Pelayaran Rakyat Indonesia (PELINDO) di Ternate, 1 Juni 1954
73. Tempat pengumpulan kelapa di Koperasi Tani Kelapa di Rum (Pulau Tidore)
74. Kebun cacao/coklat di Halmahera
75. Pengumpul damar dari Halmahera di Kampung Polamea, Bacan
76. Tikar pandan untuk tidur dari Halmahera

VII. PENDIDIKAN

77. Laporan Afdeling Bacan Karasidenan Ternate tentang jumlah pelajar sekolah, usia pelajar sekolah dan jenis pekerjaan orang tua siswa pada sekolah pribumi milik pemerintah daerah Ternate tahun 1876
78. Laporan Afdeling Ternate Karesidenan Ternate tentang jumlah pelajar sekolah, usia pelajar sekolah dan jenis pekerjaan orang tua siswa pada sekolah pribumi milik pemerintah daerah Bacan tahun 1876

79. Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 24 tanggal 7 April 1900 tentang pemberian ijin ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Umum Kelas Dua di Laboeka (Bacan), Karesidenan Ternate
80. Murid sekolah Kristen pribumi di depan gedung sekolah di Buli, Halmahera
81. Sekelompok murid sekolah dengan guru dan guru bantu di Piru, Halmahera
82. Murid sekolah lanjutan sedang belajar didalam kelas di Galela, Halmahera
83. Pawai Pelajar Wanita dalam rangkaian kegiatan perjalanan Wakil Presiden ke Ternate Maluku Utara, 15 Oktober 1954
84. Murid Sekolah Rakyat sedang memainkan alat musik seruling bambu di Sasana, Pulau Bacan, 17 Oktober 1954
85. Bangunan Sekolah Rakyat di Labuha. Pulau Bacan, 17 Oktober 1954
86. Bangunan Sekolah Rakyat yang didanai atas swadaya rakyat di Soa Sio, Pulau Tidore, Juli 1957
87. Peresmian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Morotai, 3 September 1957
88. Surat LHJB Van Gorkom Duta Besar Belanda kepada Wakil Presiden RI tentang rencana kunjungan ke Ternate dalam rangka pemberian bantuan obat-obatan dan susu sejumlah Rp. 6.000.000 untuk korban gunung merapi GAMALAMA, 14 Oktober 1980

89. Rumah Sosial Budi Santausa di Ternate yang dibangun pada tahun 1953, 1 Juni 1954

VIII. AGAMA

90. Masjid tampak dari depan, Ternate, Maluku
91. Tempat peribadatan tradisional di Desa Todokki (Iboe), Halmahera
92. Jama'ah berfoto bersama didepan Mesjid Gorua, Tobelo, Halmahera, 8 Juni 1954
93. Gereja Protestan Kota Ternate, 1 Juni 1954
94. Rombongan Jama'ah Haji yang akan bertolak ke Mekka dari Pelabuhan Ternate dengan menumpang kapal, 2 Juni 1954
95. Rombongan Jama'ah Haji dan para pengantarnya sebelum bertolak dengan kapal dari Pelabuhan Ternate, 2 Juni 1954.

IX. BANGUNAN

96. Surat dari DPC Gapensi (Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia) Maluku Utara kepada Menteri Perhubungan tentang tanggapan terhadap tata cara pelelangan proyek Stasiun Bumi Kecil Soa Sio, Tobelo dan Sanana yang dilakukan oleh Pinbagpro wilayah Telekomunikasi XI, dengan lampiran. 10 Mei 1981.

97. Miniatur Rumah sebagai hiasan didalam upacara adapt pemakaman, Rumah Toba, Halmahera
98. Gedung Studio RRI di Ternate, 1 Juni 1954
99. Gambar denah dasar Benteng Kayu Merah, Ternate. 21 Januari 1891
100. Gambar denah Benteng atau Castella tua Gambama, Ternate. 1 Januari 1891
101. Gambar denah Benteng Kalimati/Kota Janji, Ternate
102. Gambar denah Benteng Tolukho, Maret 1891
103. Benteng Oranje, Ternate.
104. Tembok Benteng Oranje di Ternate
105. Situasi di dalam Benteng Oranje, Ternate
106. Tembok Benteng Tafasoho di Pulau Makian
107. Rumah penjaga pada Benteng Kalamatta Ternate
108. Surat Keputusan No. 37 tanggal 9 September 1892 tentang persetujuan pemberian rumah sederhana kepada penduduk sipil di Karesidenan Ternate, disertai lampiran
109. Pemukiman di kampung Tobaku, Halmahera.
110. Rumah penduduk asli di tepi laut, Ternate.

- 111. Rumah yang dibuat dari bambu dan beratap kirai di Ternate, 3 Juni 1954
- 112. Rumah buruh Tambang Mangan dengan latar belakang pemandangan Pantai Pulau Doi, -Halmahera, 6 Juni 1954
- 113. Perkampungan rakyat di Pantai Weda, Halmahera, 7 Juni 1954
- 114. Rumah di Wajabula, yang dibuat dari bahan-bahan seng, besi tua bekas peninggalan Tentara AS di Morotai, 5 Juni 1954

X. TRANSPORTASI

- 115. Peta situasi jalan Ternate Castella, Ternate, 22 Maret 1932
- 116. Pembangunan jalan menuju Koleemata – Castella melalui daerah Gambessi- Sasalanden, 22 Maret 1932
- 117. Resolusi Konferensi Pamong Praja – Kemakmuran di Ternate tentang permintaan dua buah kapal, 5 Mei 1952
- 118. Perahu beratap " Pahata" dan " Rorehe" tertambat di tepi laut Tobelo, Pulau Halmahera
- 119. Kapal uap "Campphys" berlabuh di Pelabuhan Ternate
- 120. Kapal uap "Plancius" berlayar menuju Ternate
- 121. Pemandangan di lereng Gunung Ternate
- 122. Jalan protokol disepanjang pantai Ternate

123. Perahu Kollek sebagai alat transportasi tambangan di Pelabuhan Tobelo, Halmahera, 8 Juni 1954

XI. BUDAYA

124. Kepala Distrik dan Kepala Kampung Galek, Halmahera, Maluku
125. Seorang guru beserta istri dan anaknya di depan rumahnya di Afea, Halmahera
126. Para Sangaji dari Kampung Togal, Halmahera
127. Suku Tobelorens di Weda, Halmahera
128. Suku Sasana, Bacan , 17 Oktober 1954
129. Anak-anak Suku Gebe, di Pulau Gebe, 23 September 1956
130. Permainan Toku pada masyarakat Morotai dan Halmahera.
131. Lukisan di atas kulit pohon, pulau Halmahera
132. Beberapa instrumen (alat musik) petik dari Halmahera.
133. Alat musik Kumbi-kumbi berasal dari Ternate, Maluku.
134. Orkes seruling bambu yang menyambut rombongan mobile Unit Kementerian Penerangan di Pelabuhan Weda, Halmahera, 7 Juli 1954

135. Pemain musik Tifa yang mengiringi tarian pada malam resepsi setelah Pelantikan Gubernur Irian Barat di Tidore, 23 September 1956
136. Pemain musik yang mengiringi Tari Gale, 29 Agustus 1957
137. Pemain musik bambu di Jailolo, 31 Agustus 1957
138. Alat musik suling yang dimainkan oleh para pemuda Ternate
139. Pertunjukan tari adat Ternate, 17 September 1951
140. Pertunjukan Tari Cakalele, 17 September 1951
141. Pertunjukan Tarian Adat Jailolo, 18 Juli 1954
142. Tarian Soya-soya, 30 Agustus 1957
143. Seorang wanita dalam pakaian adapt Weda, Halmahera, 7 Juni 1954
144. Pakaian adat laki-laki dan perempuan Suku Morotai, 19 Juli 1954
145. Pakaian adat laki-laki suku Jailolo, 31 Agustus 1957

XII. PARIWISATA

146. Pemandangan Gunung Berapi Gamalama tampak kapal-kapal yang sedang berlayar di laut Ternate, Februari 1840

147. Pemandangan Pantai Morotai dengan latar belakang Pulau Halmahera, 1948
148. Pemandangan Pantai Ternate dengan latar belakang Gunung Berapi, 17 November 1951
149. Tugu Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Weda, Halmahera, 12 Oktober 1954

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Maluku Utara Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.